



BAB I

PENDAHULUAN

DATA UMUM

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang didirikan pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1965 tanggal 2 Desember 1965, dengan Ibukota Kabupaten di Pelaihari.

LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah 3.841,37 Km² atau 10,34% (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022) dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, 135 desa/kelurahan. Daerah yang paling luas yaitu Kecamatan Kintap dengan luas 857,21 Km², Kecamatan Jorong dengan luas 697,84 Km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 419,05 Km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas 68,70 Km².

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada Tahun 2023 sebanyak 364.117 jiwa dengan rasio jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah 103,31 yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dimana dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 103-104 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 sebesar 1.156 orang. Latar belakang pendidikan dari pencari kerja ini sebagian besar adalah lulusan SMA/Sederajat yakni 530 jiwa, disusul lulusan SMK sebesar 455 jiwa.

Jumlah angkatan kerja yang tersedia berdasarkan data BPS tahun 2023 adalah sebanyak 67,97 persen dimana tingkat partisipasi Angkatan kerja sebanyak 67,12% dan 2,49% tingkat pengangguran terbuka. Lapangan pekerjaan utama adalah pada sektor pertanian yang mencapai 42,48% disusul sektor perdagangan sebesar 20,60% dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yang mencapai 13,52%.

SUMBER DAYA LAHAN

Tahun 2023 luasan lahan di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari lahan sawah seluas 71.174 Ha dan lahan tegal/kebun menurut jenis penggunaannya seluas 36,521 Ha, lading/huma seluas 12.630 Ha serta lahan sementara tidak diusahakan 9.436,64 Ha. Jagung merupakan tanaman pangan yang memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, yaitu seluas 16.408 hektar. Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman andalan Kabupaten Tanah Laut adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman kelapa sawit pada tahun 2023 mencapai 12.692 Ha. Sementara untuk tanaman karet, pada tahun 2023 sebesar 14.852 Ha.



SUMBER DAYA HUTAN

Luas hutan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 adalah sebesar 125.644,11 Ha. Bila dirinci menurut fungsinya, kawasan hutan lindung memiliki luas 13.688,39 Ha, kawasan hutan produksi 70.157,61 Ha, dan kawasan hutan konservasi 27.157,61 Ha dan kawasan tubuh air 435,74 Ha. Kawasan hutan lindung yang memiliki lahan dengan kondisi lahan kritis seluas 4.652,44 Ha dan kondisi lahan sangat kritis 5.173,04 Ha.

SUMBER DAYA AIR

Temperatur maksimum di daerah Tanah Laut pada Tahun 2023 berkisar antara 32,50°C sampai 37,40°C, temperatur minimum berkisar antara 18,80°C sampai 22,80°C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 27,40°C sampai 28,80°C.

Intensitas jumlah curah hujan dari 4,50 mm sampai 564,60 mm dengan jumlah hari hujan antara 4 sampai 25 hari setiap bulan. Musim kemarau/kering terjadi pada bulan Juni hingga Oktober, sebaliknya musim hujan/basah terjadi pada bulan November hingga Mei, meskipun beberapa waktu ke belakang musim panas dan hujan kadang berubah mengikuti perubahan iklim kawasan sekitar.

SUMBER DAYA MINERAL

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, beberapa tahun terakhir berperan penting dalam perekonomian Tanah Laut. Meskipun harus diakui pula lesunya perekonomian global juga berdampak pada lesunya sektor pertambangan yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tanah Laut. Selain batubara masih banyak potensi pertambangan yang belum digali secara optimal seperti bijih besi, bijih nikel, mangan, dan batu kromit, walaupun secara regional hanya sektor pertambangan batu bara dan bijih besi yang masih berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

STRUKTUR ORGANISASI

Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang bupati dan didampingi seorang wakil bupati. Sejak Tahun 1966 telah terjadi empat belas kali pergantian jabatan bupati. Pada Tahun 2023 Tanah Laut dipimpin oleh Drs. H. Sukamta, M.A.P dengan wakilnya H. Abdi Rahman yang dilantik pada tanggal 5 September 2018 dan berakhir pada tanggal 19 September 2023, yang kemudian digantikan oleh Penjabat Bupati Tanah Laut yaitu Ir. Syamsir Rahman, MS. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan Pemerintahan Kabupaten.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Kabupaten Tanah Laut telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya pada Tahun 2010 juga telah terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 dimana terjadi perubahan pada SKPD Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.



Kemudian di Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut di atas terjadi perubahan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dimana terjadi perubahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut diubah menjadi Inspektorat Kabupaten, serta kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, begitu juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang semula dihapus kemudian disisipkan kembali dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut, dan terakhir kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, mengikuti arah dan pedoman sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga penataan organisasi dapat efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Adapun Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Inspektorat Kabupaten;
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Dinas Kesehatan;
- 6) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 7) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- 8) Dinas Sosial;
- 9) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- 10) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 13) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 14) Dinas Perhubungan;
- 15) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 19) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- 20) Dinas Pariwisata;
- 21) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- 22) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 23) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;



- 24) Badan Pendapatan Daerah;
- 25) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 27) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 28) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 29) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 30) Kecamatan Pelaihari;
- 31) Kecamatan Tambang Ulang;
- 32) Kecamatan Kurau;
- 33) Kecamatan Bati Bati;
- 34) Kecamatan Batu Ampar;
- 35) Kecamatan Panyipatan;
- 36) Kecamatan Takisung;
- 37) Kecamatan Jorong;
- 38) Kecamatan Kintap;
- 39) Kecamatan Bajuin;
- 40) Kecamatan Bumi Makmur.

Pada tahun 2021 terdapat perubahan pola tata kelola di 15 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu pada UPT Puskesmas Asam-Asam, UPT Puskesmas Batakan, UPT Puskesmas Bumi Makmur, UPT Puskesmas Jorong, UPT Puskesmas Kait-Kait, UPT Puskesmas Kintap, UPT Puskesmas Padang Luas, UPT Puskesmas Panyipatan, UPT Puskesmas Pelaihari, UPT Puskesmas Sungai Cuka, UPT Puskesmas Sungai Riam, UPT Puskesmas Tambang Ulang, UPT Puskesmas Takisung, UPT Puskesmas Tanjung Habulu, UPT Puskesmas Tirta Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/944-KUM/2020 tanggal 30 Desember 2020 namun efektif pada tanggal 1 April 2021. Pada tahun 2022 terdapat lagi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/437-KUM/2022 tentang Penetapan 2 (dua) unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat dan 1 (satu) unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan daerah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada tanggal 14 Januari 2022, yaitu UPT Puskesmas Bentok Kampung, UPT Puskesmas Durian Bungkok dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 tahun 2018 terdapat perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yaitu pada 236 (dua ratus tiga puluh enam) Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pada 48 (empat puluh delapan) Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berlaku efektif paling lambat 1 Januari 2020. Kemudian di tahun 2019 telah didirikan satuan pendidikan baru SMPN 6 Kintap di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/606-KUM/2019. .

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran yang



telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi Laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:



- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, Transfer, Pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Surplus/Defisit-Laporan Operasional, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas pemerintah daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut;



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 21) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 24) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 2.2 Kebijakan keuangan 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan akuntansi 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
BAB V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah 5.1.1 Pendapatan-LRA 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan 5.1.4 Pendapatan-LO 5.1.5 Beban 5.1.6 Aset 5.1.7 Kewajiban 5.1.8 Ekuitas Dana
	5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB VII	Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 EKONOMI MAKRO/EKONOMI REGIONAL

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Tanah Laut Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut yaitu:

- 1) Tingkat Kemiskinan sebesar 3,73%;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,58%.
- 3) Gini Ratio sebesar 0,26%;
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,98%;
- 5) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,78%;
- 6) Tingkat Inflasi sebesar 2,43%;
- 7) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp20.165,71.

2.1.1 TINGKAT KEMISKINAN

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Laut

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Kab/Kota (%)	3,86	3,73	(0,13)
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	13,54	13,22	(0,32)
3	Provinsi (%)	4,49	4,29	0,20
4	Nasional (%)	9,57	9,36	0,21
5	Peringkat Provinsi	11,00	33,00	turun



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
6	Peringkat Nasional	409,00	528,00	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 sebesar 3,73% mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 0,13% Persentase penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut masih di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan pengangguran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,37	0,30	(0,07)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,63	0,61	(0,02)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,56	1,53	(0,03)
4	Peringkat Provinsi	9,00	33,00	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,06	0,07	0,01
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,15	0,16	0,01
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,38	0,00
4	Peringkat Provinsi	11,00	29,00	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

2.1.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebesar 3,58%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	4,17	3,58	(0,59)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,74	4,31	(0,43)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,90	5,32	0,58
4	Peringkat Provinsi	17,00	22,00	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,58%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,17%, atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. Namun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut masih lebih rendah dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

2.1.3 INDEKS GINI (GINI RATIO)

Indeks Gini atau Gini *Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- 1) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- 2) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut. Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebesar 0,26 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kab/ Kota	0,26	0,26	0,00
2	Tingkat Provinsi	0,31	0,31	0,00
3	Tingkat Nasional	0,38	0,38	0,00
4	Peringkat Provinsi	11	26	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Tanah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,26 Angka ini masih sama jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,26 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

2.1.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- 1) Rendah (< 60)
- 2) Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- 3) Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- 4) Sangat Tinggi (>80)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebesar 72,98 dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Laut

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten/Kota	70,35	72,98	2,63
2	Provinsi	71,84	74,66	2,82
3	Indonesia/Nasional	72,91	74,39	0,62
4	Peringkat Provinsi	7,00	9,00	turun
5	Peringkat Nasional	251,00	251,00	tetap

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Tanah Laut

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebesar 72,98 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 70,35 poin mengalami kenaikan sebesar 2,63 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

IPM di Kabupaten Tanah Laut pada saat ini berada pada urutan 9 dari 13 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan berada pada urutan 251 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat 21 dari 34 Provinsi di Indonesia.

2.1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut

No.	IPM (Tingkat)	Kabupaten/Kota		Provinsi Tahun 2023	Nasional Tahun 2023
		Tahun 2022	Tahun 2023		
1	PDRB Menurut Jenis Pengeluaran (harga konstan 2010) (Rp)	11.056.020,00	11.584.220,00	149.230.963,17	12.439.449.618,31
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,12	4,78	4,84	5,05
3	Peringkat Provinsi	6	6	21	0,00

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Tanah Laut

Selama kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 perekonomian Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan 4,78%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten

Tanah Laut menempati urutan 6 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.6 INFLASI

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*galloping inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*high inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Kemudian (iv) Hiperinflasi (*hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebesar 2,43% dengan kategori rendah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut (%)	6,98 (Banjarmasin)	2,43 (Banjarmasin)	(4,47)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	6,99	2,43	(4,47)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	(2,90)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,43%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 6,98%. Dengan demikian inflasi Kabupaten Tanah Laut sama dengan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Selatan namun lebih rendah dari tingkat inflasi nasional yang sebesar 2,61%.

2.1.7 STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Struktur perekonomian Kabupaten Tanah Laut dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam Miliaran

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	2.962,56	3.099,64
2	Pertambangan dan Penggalian	6.523,43	6.672,86
3	Industri Pengolahan	1.997,87	2.136,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16,69	18,30
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	30,30	32,32
6	Konstruksi	1.211,29	1.347,69



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.986,70	2.124,47
8	Transportasi dan Pergudangan	1.054,81	1.248,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	254,80	284,27
10	Informasi dan Komunikasi	513,58	548,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	235,49	254,06
12	<i>Real Estate</i>	327,41	358,99
13	Jasa Perusahaan	59,16	66,51
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	882,21	949,24
15	Jasa Pendidikan	643,16	671,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	192,62	210,81
17	Jasa Lainnya	127,10	142,80
18	Produk Domestik Bruto	19.019,18	20.165,71

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:
 1. Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
 - b. Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
 2. Dana Insentif Daerah
 3. Dana Otonomi Khusus
 4. Dana Keistimewaan
 5. Dana Desa
 - b. Transfer Antar Daerah terdiri dari:
 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
 2. Bantuan Keuangan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari 3 jenis pendapatan yaitu:
 - a. Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. Dana Darurat;



- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
- d. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan anggaran pendapatan yang dilaksanakan Tahun 2023 meliputi:

- 1) Melakukan review atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap pendapatan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini;
- 2) Melakukan pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya yang terkait dengan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Meningkatkan manajemen pendapatan daerah;
- 4) Meningkatkan koordinasi eksternal maupun internal dengan para pengelola pendapatan.

2.2.2 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah meliputi:

- 1. Belanja Operasi
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah;
 - f. Belanja Bantuan Sosial;
- 2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap Lainnya.
- 3. Belanja Tidak Terduga
- 4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Selain itu, perubahan yang terjadi adalah dikenalkannya sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari kegiatan yang direncanakan dan dibiayai melalui APBD.

Terkait dengan adanya sub kegiatan yang sifatnya *close list*, maka saat ini masih dilakukan pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, sesuai dengan hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Sambil menunggu hasil pemutakhiran maka beberapa sub kegiatan yang belum bisa dicantumkan dalam PPAS untuk sementara indikator dan alokasi dananya disematkan ke sub kegiatan yang sudah ada, untuk kemudian disesuaikan dan dimasukkan dalam kesepakatan rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan harus berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau



kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok SKPD.

Pada tahun 2023, belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut.

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja hibah kepada Partai Politik dan belanja barang dan jasa yang wajib/mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta program/kegiatan wajib/mengikat yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja lainnya di setiap SKPD.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dianggarkan pada SKPD terkait.
- c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program penguatan pembangunan perdesaan.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam/non alam maupun bencana sosial.
- f. Belanja daerah setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- g. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. Belanja daerah mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.
- i. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19.

2.2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berkaitan dengan arah kebijakan

pembiayaan daerah tentunya harus meliputi dua hal tersebut, baik dari sisi penerimaannya maupun dari sudut pengeluarannya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus pada tahun anggaran bersangkutan.

Pembiayaan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan daerah terkait dengan penerimaan pembiayaan daerah dikarenakan proyeksi pendapatan untuk tahun 2023 lebih kecil dari proyeksi belanja, sehingga anggaran yang disusun mengalami defisit. Artinya pengeluaran akan lebih besar dari pendapatan. Atas dasar itu maka kebijakan yang ditempuh adalah bagaimana mengamankan belanja yang lebih besar dari pendapatan agar tetap tersedia dananya melalui penerimaan pembiayaan.

Dari 6 (enam) jenis penerimaan pembiayaan, yaitu; SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling memungkinkan dapat mengamankan proyeksi belanja daerah agar tetap terbiayai adalah melalui SiLPA.

Pilihan kebijakan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit dari SiLPA adalah yang paling tepat, karena SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, baik karena kelebihan target pendapatan, terjadinya penghematan belanja maupun masih adanya akumulasi dari SiLPA tahun-tahun sebelumnya yang terus terbawa sampai sekarang karena masih belum digunakan cukup signifikan dan dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

2.2.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode Akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan



setara kas selama satu periode Akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Berdasarkan PSAP 13 pada paragraf 119 disebutkan bahwa Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Adapun untuk Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) merupakan laporan yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan Entitas Pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Asumsi indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2023 seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan di atas, dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023.

Tabel 10 Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD Perubahan Tahun 2023

Kode	Uraian	APBD 2023	APBD-P 2023
4	PENDAPATAN	1.761.088.881.265,00	1.739.292.358.915,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	223.171.641.465,00	215.796.462.766,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.536.761.239.800,00	1.522.295.931.980,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.156.000.000,00	1.199.964.169,00
5	BELANJA	2.255.548.951.409,00	2.502.266.740.528,00
5.1	Belanja Operasi	1.434.964.476.863,00	1.574.603.639.931,00
5.2	Belanja Modal	557.346.687.055,00	659.146.721.106,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	22.172.915.145,00	22.172.915.145,00
5.4	Belanja Transfer	241.064.872.346,00	246.343.464.346,00
	Total Surplus/(Defisit)	(494.460.070.144,00)	(762.974.381.613,00)



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (murni) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp1.761.088.881.265,00 dan anggaran belanja sebesar Rp2.255.548.951.409,00 sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar Rp494.460.070.144,00.

Kemudian dengan adanya kondisi yang memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan dilakukan perubahan APBD melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Oktober 2023 ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp1.739.292.358.915,00 dan anggaran belanja sebesar Rp2.502.266.740.528,00 sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar Rp762.974.381.613,00.

Defisit anggaran tersebut ditutupi dengan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp906.703.550.940,00. Penerimaan pembiayaan juga dipergunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan sebesar Rp58.318.896.928,00.

Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp2.259.475.998.716,28 dan belanja sebesar Rp1.998.834.649.326,00 serta belanja transfer sebesar Rp244.652.753.666,00 sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp15.988.595.724,28.

Realisasi Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp906.953.911.440,78 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp58.318.896.928,00 maka sisa Pembiayaan Neto sebesar Rp848.635.014.512,78.

Sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 (SILPA) adalah jumlah surplus sebesar Rp15.988.595.724,28 ditambah sisa atas Pembiayaan Neto sebesar Rp848.635.014.512,78, maka jumlah akumulasi SILPA Tahun Anggaran 2023 posisi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp864.623.610.237,06.



3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam hal pencapaian kinerja Keuangan diketahui bersama bahwa target realisasi pendapatan tercapai sesuai dengan yang diharapkan, dimana pencapaiannya di atas 100 persen, hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh *stakeholder* dan SKPD yang bekerja keras dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun diketahui bersama bahwa perlambatan ekonomi regional cukup mempengaruhi komponen penerimaan pendapatan secara keseluruhan, namun dengan berbagai metode baik dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi berbagai sumber penerimaan daerah yang dilaksanakan berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan perencanaan yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2023.

Pencapaian realisasi belanja diketahui bersama bahwa tingkat serapan anggaran tahun 2023 mencapai 89,66 persen, hal ini cukup menggembirakan dalam hal persentasenya dimana pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut dapat menggenjot realisasi belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023, meskipun masih belum mencapai target dari yang dianggarkan hal ini dikarenakan efisiensi yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* dan SKPD untuk dapat merealisasikan kegiatan yang benar-benar prioritas.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut.

4.1 IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PERTAMA KALI

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali baru mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Tahun 2023 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut disajikan dengan basis akrual sama dengan tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 dan 2022.

4.2 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Tanah Laut.

4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PELAPORAN KEUANGAN

Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut:

- 1) Basis Kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas yang berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;
- 2) Basis Akrual untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.4.1 AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA / LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Pendapatan LRA diakui saat kas telah diterima/masuk ke rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Pendapatan LO diakui pada saat munculnya hak tanpa melihat diterima/masuknya kas di Rekening Kas Umum Daerah;
- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- 4) Pendapatan Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Pengukuran

Seluruh komponen pendapatan LRA dan LO disajikan berdasarkan asas:

- 1) Pendapatan LRA dan Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan Pengeluaran);
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO dan pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Pendapatan LO disajikan dalam laporan Operasional (LO) dengan basis akrual sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan LRA dan pendapatan LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.2 AKUNTANSI BELANJA - BEBAN

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD berupa SP2D GU/SP2D LS/SP2D GU Nihil/SP2D TU Nihil dan nota debet Bank;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- 3) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;



- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu;
- 5) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen surat perintah pencairan dana SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode Akuntansi;
- 6) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah disahkan oleh pengguna anggaran pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode Akuntansi.

Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (*threshold capitalization*). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut.

1. Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
2. Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas;
3. Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke atas;
4. Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
5. Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pengukuran

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja.

4.4.3 AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima/timbulnya hak pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA;
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan/munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah.



Pengukuran

Seluruh komponen penerimaan pembiayaan disajikan berdasarkan:

- 1) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasi dengan pengeluaran);
- 2) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penilaian

Seluruh komponen pembiayaan diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pembiayaan maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pembiayaan.

4.4.4 AKUNTANSI ANGGARAN, AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT DAN AKUNTANSI NON ANGGARAN

Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos-pos di luar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan.

Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan;
- 4) Ekuitas Akhir;

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.5 AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai. Setara Kas Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa adanya resiko perubahan nilai yang signifikan.

4.4.6 AKUNTANSI PIUTANG

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realized value*). Alat untuk menyesuainya adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Pengakuan Piutang

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

Pengukuran Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

Terhadap semua piutang baik yang telah diatur oleh peraturan daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dan lain-lain untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut.

Tabel 11 Penyisihan Piutang

No.	Umur Piutang	Kategori	Penyisihan Piutang (%)
1	0 < 1 Tahun	Lancar	0,50
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	30



No.	Umur Piutang	Kategori	Penyisihan Piutang (%)
3	>2 -3 Tahun	Diragukan	50
4	>3 Tahun	Macet	100

4.4.7 AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai:
2. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam angka kegiatan operasional pemerintah;
3. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
4. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
5. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengukuran

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Penilaian

Seluruh komponen persediaan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai persediaan maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

4.4.8 AKUNTANSI INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut.

- 1) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) berisiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen terdiri dari, Pembelian Surat Utang Negara, Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan Investasi Non Permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat serta tujuan lainnya. Dana Bergulir ini dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos penerimaan kembali pinjaman dan bagi hasil usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penyajian Dana Bergulir di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, tetapi secara periodik harus dilakukan penyesuaian nilai terhadap dana bergulir di Neraca dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dan Tidak Tertagih sehingga menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pengukuran Dana Bergulir dalam bentuk perguliran ternak (sapi) dari hasil perhitungan jumlah ternak dikalikan harga standar atau harga pasar pada akhir periode akuntansi yang ada pada SKPD pengelola perguliran ternak tersebut.

Piutang bunga yang timbul dari perguliran ternak sapi betina jika ada diperlakukan menambah nilai dana bergulir (investasi non permanen) dan merupakan jumlah yang akan ditagihkan sesuai perjanjian. Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk dana bergulir yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih yang ditentukan dengan menggunakan umur tunggakan dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 12 Tarif Penyisihan Investasi Non Permanen

No.	Umur Dana Bergulir	Kategori	Penyisihan Dana Bergulir (%)
1	0 – 4 tahun	Lancar	0
2	> 4 – 5 tahun	Ragu Tertagih	50
3	> 5 tahun	Macet	100

Pengukuran pengelolaan kapal kepada nelayan diukur sebesar nilai aset beserta alat tangkap dan kelengkapan yang diserahkan kepada nelayan berdasarkan perjanjian sewa pakai kapal antara nelayan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini SKPD yang menangani.

Pengakuan nilai investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal kepada nelayan dihitung berdasarkan nilai kapal beserta alat tangkap dan kelengkapannya oleh nelayan berdasarkan perjanjian/kontrak yang dibuat oleh SKPD terkait dengan nelayan/kelompok nelayan.

Besaran penyisihan investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal nelayan mengikuti kebijakan akuntansi piutang. Apabila perjanjian/kontrak sewa pakai kapal telah berakhir maka kapal wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah dapat dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai baru dengan nelayan dan dapat menambah nilai investasi non permanen lainnya. Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah apabila tidak dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai kapal yang baru akan dicatat sebagai aset lain-lain. Pengukuran atas nilai aset kapal yang tidak digunakan lagi dengan perpanjangan kontrak baru mengikuti kebijakan akuntansi aset

4.4.9 AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.



5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.

7) Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Apabila aset tetap telah habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulanan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai sisa masa manfaatnya;
- 2) aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penambahan masa manfaat atas aset tetap renovasi dan *overhaul* pada tabel masa manfaat dilakukan untuk aset tetap renovasi dan *overhaul* yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, artinya pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan.

Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.

Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

Aset Donasi

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan jenis asetnya. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

- 1) Tagihan piutang penjualan angsuran;
- 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
- 3) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 4) Aset tidak berwujud;
- 5) Aset lain-lain.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan.

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun.

4.4.10 AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4.4.11 BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.4.12 AKUNTANSI EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya;
 - b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

RINCIAN DARI PENJELASAN DARI MASING-MASING POS PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Penjelasan mengenai berbagai komponen Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

5.1.1 PENDAPATAN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>1.739.292.358.915,00</u>	<u>2.259.475.998.716,28</u>	<u>2.159.239.661.099,87</u>

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>215.796.462.766,00</u>	<u>211.724.647.374,28</u>	<u>193.890.015.753,87</u>

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 13 Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pendapatan Asli Daerah	215.796.462.766,00	211.724.647.374,28	98,11	193.890.015.753,87	9,20
	Jumlah	215.796.462.766,00	211.724.647.374,28	98,11	193.890.015.753,87	9,20

5.1.1.1.1 PAJAK DAERAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>49.300.000.000,00</u>	<u>52.667.553.207,68</u>	<u>45.363.440.225,80</u>

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tabel 14 Rincian Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pajak Hotel	88.500.000,00	73.185.181,00	82,70	88.001.904,00	(16,84)
2	Pajak Restoran	5.450.000.000,00	6.718.943.786,48	123,28	4.792.261.448,80	40,20
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	750.000.000,00	792.811.642,00	105,71	487.100.153,00	62,76
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.700.000.000,00	5.926.132.144,48	126,09	4.305.161.295,80	37,65
3	Pajak Hiburan	100.000.000,00	87.546.100,00	87,55	65.345.000,00	33,98
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	100.000.000,00	87.546.100,00	87,55	65.345.000,00	33,98
4	Pajak Reklame	600.000.000,00	487.839.911,00	81,31	585.759.806,00	(16,72)
	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Me gatron	515.000.000,00	445.730.036,00	86,55	515.078.891,00	(13,46)
	Pajak Reklame Kain	70.000.000,00	36.234.675,00	51,76	46.717.875,00	(22,44)
	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	0,00	18.087.840,00	(100,00)
	Pajak Reklame Berjalan	15.000.000,00	5.875.200,00	39,17	5.875.200,00	0,00
5	Pajak Penerangan Jalan	25.455.000.000,00	26.119.223.496,00	102,61	24.940.489.239,00	4,73
	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri	25.405.000.000,00	26.082.634.396,00	102,67	24.887.516.287,00	4,80
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	50.000.000,00	36.589.100,00	73,18	52.972.952,00	(30,93)
6	Pajak Parkir	210.000.000,00	215.947.600,00	102,83	118.382.800,00	82,41
7	Pajak Air Tanah	1.311.500.000,00	1.476.416.123,00	112,57	1.357.979.711,00	8,72
8	Pajak Sarang Burung walet	75.000.000,00	78.524.200,00	104,70	75.090.000,00	4,57
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000.000,00	2.720.337.870,20	136,02	1.630.843.755,00	66,81
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.350.000.000,00	5.799.583.299,00	108,40	5.249.042.846,00	10,49
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.660.000.000,00	8.890.005.641,00	102,66	6.460.243.716,00	37,61
	BPHTB-Pemindahan Hak	5.700.000.000,00	5.820.353.896,00	102,11	5.448.746.032,00	6,82
	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.960.000.000,00	3.069.651.745,00	103,70	1.011.497.684,00	203,48
	Jumlah	49.300.000.000,00	52.667.553.207,68	106,83	45.363.440.225,80	16,10

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp7.304.112.981,88 atau 16,10% dari tahun sebelumnya. Kenaikan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah ini yang paling dominan disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada BPHTB-Pemberian Hak Baru yaitu sebesar Rp2.429.761.925,00 atau sebesar 203,48% dari tahun 2022.

5.1.1.1.2 RETRIBUSI DAERAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
8.506.734.000,00	7.682.930.350,00	6.971.598.007,00

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.682.930.350,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.971.598.007,00. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Retribusi daerah pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD pengelola penerimaan. Anggaran dan realisasi pada TA 2023 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 15 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
A	Retribusi Jasa Umum					
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	335.027.000,00	194.760.000,00	58,13	223.380.000,00	(12,81)
2	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	85.000.000,00	80.100.000,00	94,24	82.700.000,00	(3,14)
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.539.200.000,00	1.343.499.000,00	87,29	1.401.111.000,00	(4,11)
	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	199.700.000,00	238.549.000,00	119,45	236.403.000,00	0,91
	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	535.920.000,00	321.560.000,00	60,00	425.476.000,00	(24,42)
	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	803.580.000,00	783.390.000,00	97,49	739.232.000,00	5,97
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	445.175.000,00	248.843.000,00	55,90	306.330.500,00	(18,77)
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	22.330.000,00	(51,63)
6	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	350.000.000,00	351.762.750,00	100,50	314.499.500,00	11,85
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	562.424.000,00	571.265.600,00	101,57	562.424.000,00	1,57
	Jumlah	3.327.626.000,00	2.801.030.350,00	84,18	2.912.775.000,00	(3,84)
B	Retribusi Jasa Usaha					
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.980.330.500,00	1.904.845.500,00	96,19	1.401.833.000,00	35,88
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	16.800.000,00	19.100.000,00	113,69	0,00	100,00
	Retribusi Penyewaan Bangunan	837.630.500,00	819.340.500,00	97,82	337.995.000,00	142,41
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	595.000.000,00	658.380.000,00	110,65	495.792.500,00	32,79
	Retribusi Pemakaian Ruang	65.900.000,00	77.590.000,00	117,74	46.214.000,00	67,89



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	75.185.000,00	125,31	72.915.000,00	3,11
	Retribusi Pemakaian Alat	405.000.000,00	255.250.000,00	63,02	448.916.500,00	(43,14)
2	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	240.000.000,00	179.049.000,00	74,60	189.442.000,00	(5,49)
3	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	100.002.500,00	84.962.000,00	84,96	81.700.500,00	3,99
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	757.225.000,00	342.570.000,00	45,24	492.663.000,00	(30,47)
5	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	60.000.000,00	45.576.000,00	75,96	59.796.000,00	(23,78)
6	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.041.550.000,00	1.145.842.000,00	110,01	899.829.000,00	27,34
	Jumlah	4.179.108.000,00	3.702.844.500,00	88,60	3.125.263.500,00	18,48
C	Retribusi Perizinan Tertentu					
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan bangunan	1.000.000.000,00	1.179.055.500,00	117,91	933.559.507,00	26,30
	Jumlah	1.000.000.000,00	1.179.055.500,00	117,91	933.559.507,00	26,30
	Jumlah Total	8.506.734.000,00	7.682.930.350,00	90,32	6.971.598.007,00	10,20

Untuk Pendapatan Retribusi yang dikelola gabungan dari beberapa SKPD dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 16 Rincian Retribusi Daerah Yang Dikelola Beberapa SKPD

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	%
1	Retribusi Penyewaan Bangunan	837.630.500,00	819.340.500,00	97,82
	- Dinas Pendidikan	290.049.500,00	292.800.500,00	100,95
	- Dinas Kesehatan	169.100.000,00	165.000.000,00	97,58
	- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	126.576.000,00	111.850.000,00	88,37
	- Dinas Pariwisata	149.280.000,00	133.240.000,00	89,26
	- Badan Pendapatan Daerah	102.625.000,00	116.450.000,00	113,47
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	595.000.000,00	658.380.000,00	110,65
	- Dinas PUPRP	95.000.000,00	131.545.000,00	138,47
	- Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	500.000.000,00	526.835.000,00	105,37
3	Retribusi Pemakaian Ruangan	65.900.000,00	77.590.000,00	117,74
	- Dinas Kesehatan	900.000,00	1500000	166,67
	- Sekretariat Daerah	50.000.000,00	46.490.000,00	92,98



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	%
	- Badan Pendapatan Daerah	15.000.000,00	29.600.000,00	197,33
4	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.041.550.000,00	1.145.842.000,00	110,01
	- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.800.000,00	32.832.000,00	304,00
	- Dinas Pariwisata	1.030.750.000,00	1.113.010.000,00	107,98

Pendapatan Retribusi sebesar Rp7.682.930.350,00 ini terdiri dari Pendapatan Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.801.030.350,00, Pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp3.702.844.500,00 dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp1.179.055.500,00. Pendapatan retribusi daerah di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp711.332.343,00 atau 10,20% dari tahun sebelumnya. Kenaikan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah paling dominan disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada Retribusi Penyewaan Bangunan yaitu sebesar Rp481.345.500,00 atau 142,41 dari Tahun 2022.

5.1.1.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
12.005.308.674,00	12.005.672.488,00	11.010.810.384,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Jumlah realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama Tahun Anggaran 2023 adalah Rp12.005.672.488,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.010.810.384,00 terdiri atas:

Tabel 17 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Kalsel	11.394.000.000,00	11.394.363.814,00	100,00	10.425.528.033,00	9,29
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank BPR	461.308.674,00	461.308.674,00	100,00	106.005.337,00	335,17
3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Baratala	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	479.277.014,00	(68,70)
Jumlah		12.005.308.674,00	12.005.672.488,00	100,00	11.010.810.384,00	9,04

Pada tahun 2023 pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp994.862.104,00 atau 9,04%. Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD adalah bagian laba dari penyertaan modal di Bank Kalsel, PD. Baratala Tuntung Pandang dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.1.1.4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
145.984.420.092,00	139.368.491.328,60	130.544.167.137,07

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp139.368.491.328,60 dan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp130.544.167.137,07 terdiri atas:

Tabel 18 Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	164.391.200,00	100,00	171.026.425,00	(3,88)
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang tidak Dipisahkan	638.950.500,00	677.948.345,00	106,10	619.032.742,00	9,52
	Hasil Sewa BMD	563.950.500,00	488.898.345,00	86,69	544.032.742,00	(10,13)
	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	75.000.000,00	189.050.000,00	252,07	75.000.000,00	152,07
3	Jasa Giro	5.164.000.000,00	9.739.677.145,90	188,61	18.455.368.622,97	(47,23)
	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.984.000.000,00	9.465.098.770,06	189,91	18.071.530.348,14	(47,62)
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	180.000.000,00	274.578.375,84	152,54	383.838.274,83	(28,47)
	Pend.Lain-lain Dana BOS	0,00	32.961.636,76	100,00	0,00	100,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	510.267.500,00	100,00	0,00	100,00
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	24.000.000.000,00	42.088.043.095,68	175,37	0,00	100,00
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	28.000.0000,00	1.474.067.161,50	5.264,53	494.340.932,00	(198,19)
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	7.897.950,00	(100,00)
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	28.000.000,00	1.474.067.161,50	5.264,53	486.442.982,00	203,03
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	100.410.125,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	113.000.000,00	123.184.677,36	109,01	1.622.030.176,84	(92,41)
9	Pendapatan Denda PBBP2	51.000.000,00	379.389.679,14	743,90	308.410.195,00	23,01
10	Pendapatan dari Pengembalian	2.500.365.667,00	2.391.340.049,18	95,64	565.087.472,00	323,18
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	(100,00)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	92.659.000,00	152.681.089,00	164,78	401.587.962,00	(61,98)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	654.000,00	1.167.000,00	178,44	0,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	195.786.464,00	196.266.464,75	100,25	0,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	73.210.675,00	73.210.675,00	100,00	0,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	74.381.400,00	198.319.100,00	266,62	0,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.830.000,00	23.830.000,00	100,00	0,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	279.406.668,00	279.054.549,65	99,87	0,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	1.295.936.606,00	1.059.347.920,78	81,74	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	133.844.454,00	353.344.350,00	264,00	0,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	276.537.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	54.118.900,00	54.118.900,00	100,00	0,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	0,00	0,00	0,00	161.499.510,00	(100,00)
11	Pendapatan BLUD	113.489.103.925,00	81.785.120.838,08	72,06	108.030.172.461,23	(24,29)
12	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	2.100.000,00	100,00	0,00	100,00
13	Lain - Lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	178.287.985,03	(100,00)
	Jumlah	145.984.420.092,00	139.368.491.328,60	95,47	130.544.167.137,07	6,76

1. Hasil Penjualan Angkutan sebesar Rp164.391.200,00 merupakan pendapatan dari penjualan mobil dinas Wakil Bupati berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1035-KUM/2023 tentang Penetapan Penilai Pemerintah Dalam Rangka Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa Melalui Lelang Kepada Pejabat Negara Kabupaten Tanah Laut Tanggal 30 Agustus 2023.
2. Hasil Sewa BMD merupakan pendapatan yang berasal dari penyewaan tanah dan bangunan yang dikelola oleh BPKAD.
3. Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran sewa beli dan sewa pakai kapal pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
4. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Remunerasi TDF sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Rp7.918.382.521,00, Pendapatan Deposito di Bank Kalsel Rp29.802.739.725,96 dan Pendapatan Bunga Dana Cadangan Rp4.366.920.848,72.

5. Pendapatan Hasil Dana Bergulir merupakan Pendapatan bunga pada hasil pengelolaan dana bergulir sapi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar Rp8.824.324.191,53 atau 6,76% dari tahun sebelumnya. Kenaikan Realisasi Lain-lain PAD yang sah ini yang paling dominan disebabkan oleh Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp42.088.043.095,68.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.522.295.931.980,00	Rp2.047.480.166.938,0	Rp1.963.205.983.275,00

Rincian Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 19 Pendapatan Transfer

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Dana Perimbangan	1.287.512.438.980,00	1.733.919.341.926,00	134,67	1.667.151.026.122,00	4,00
2	Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	112.923.793.000,00	112.845.982.320,00	99,93	114.436.736.400,00	(1,39)
3	Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	121.859.700.000,00	200.714.842.692,00	164,71	181.618.220.753,00	10,51
Jumlah		1.522.295.931.980,00	2.047.480.166.938,00	134,50	1.963.205.983.275,00	4,29

5.1.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.287.512.438.980,00	1.733.919.341.926,00	1.667.151.026.122,00

Jumlah realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.733.919.341.926,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.667.151.026.122,00 terdiri atas:

Tabel 20 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil	548.181.440.800,00	996.224.548.856,00	181,73	936.789.879.264,00	6,34
2	Dana Alokasi Umum	493.534.142.000,00	511.784.754.631,00	103,70	491.839.636.893,00	4,06
3	DAK Fisik	71.473.033.180,00	66.466.496.948,00	93,00	89.691.850.759,00	(25,89)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
4	DAK Non Fisik	174.323.823.000,00	159.443.541.491,00	91,46	148.829.659.206,00	7,13
Jumlah		1.287.512.438.980,00	1.733.919.341.926,00	134,67	1.667.151.026.122,00	4,00

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah realisasi Dana Perimbangan selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.733.919.341.926,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.667.151.026.122,00 terdiri atas:

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Merupakan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak/sumber daya alam dari Pemerintah Pusat, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21 Rincian Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	52.791.001.000,00	66.154.786.329,00	125,31	37.468.975.205,00	76,56
2	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	12.813.349.000,00	14.054.017.246,00	109,68	9.792.397.000,00	43,52
3	Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND	0,00	0,00	0,00	191.211.600,00	(100,00)
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00	0,00	9.810,00	(100,00)
5	Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	363.567.992,00	(100,00)
6	Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi	171.366.000,00	180.114.300,00	105,11	0,00	100,00
7	Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara (Royalty)	479.411.408.800,00	905.332.140.658,00	188,84	886.407.324.498,00	2,14
8	Dana Bagi Hasil SDA Provisi Sumber Daya Hutan	0,00	0,00	0,00	608.082.162,00	(100,00)
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	621.201.000,00	7.918.622.112,00	1.274,73	0,00	100,00
10	Dana Bagi Hasil SDA Perikanan	2.373.115.000,00	2.584.868.211,00	108,92	1.958.311.000,00	31,99
Jumlah		548.181.440.800,00	996.224.548.856,00	181,73	936.789.879.267,00	6,34

Dana Bagi Hasil pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp59.434.669.589,00 atau 6,34%. Kenaikan Dana Bagi Hasil ini yang paling dominan disebabkan oleh Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara sebesar Rp28.685.811.124,00.

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, rincian Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai berikut.

Tabel 22 Dana Alokasi Umum (DAU)

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Dana Alokasi Umum <i>Block Grant</i>	469.329.142.000,00	337.048.019.631,00	68,29	491.839.636.893,00	(31,47)
2	DAU Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00	100,00
3	DAU Bidang Pekerjaan Umum	0,00	38.246.623.000,00	100,00	0,00	100,00
4	DAU Bidang Pendidikan	0,00	51.977.805.000,00	100,00	0,00	100,00
5	DAU Bidang Kesehatan	0,00	41.733.239.000,00	100,00	0,00	100,00
6	DAU PPPK	23.205.000.000,00	41.779.068.000,00	180,04	0,00	100,00
Jumlah		493.534.142.000,00	511.784.754.631,00	98,85	491.839.636.893,00	4,06

Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp511.784.754.631,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp19.945.117.738,00 atau 4,06% dari tahun sebelumnya.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp66.466.496.948,00 sebagai berikut.

Tabel 23 Dana Alokasi Khusus (DAK)

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	DAK Bidang Pendidikan					
	DAK Bidang Pendidikan PAUD	901.228.000,00	584.855.000,00	64,90	198.515.000,00	194,62
	DAK Bidang Pendidikan SD	2.315.388.000,00	2.168.253.847,00	93,65	8.895.453.690,00	(75,63)
	DAK Bidang Pendidikan SMP	7.984.133.000,00	7.456.197.856,00	93,39	1.769.934.990,00	321,27
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	424.979.515,00	285.994.600,00	67,30	201.080.000,00	42,23
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	177.539.000,00	(100,00)
2	DAK Bidang Kesehatan					



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	3.441.079.653,00	(100,00)
	DAK Bidang Kesehatan dan KB - KB	1.310.601.750,00	1.157.755.000,00	88,34	1.144.157.000,00	1,19
	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	77.055.000,00	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	5.977.020.000,00	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	2.376.000.000,00	1.872.514.116,00	78,81	15.733.906.340,00	(88,10)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	14.668.727.915,00	12.874.497.894,00	87,77	296.883.840,00	4.236,54
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	398.774.460,00	(100,00)
3	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	5.256.882.750,00	(100,00)
4	DAK Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	357.771.036,00	(100,00)
5	DAK Bidang Pekerjaan Umum					
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.441.975.000,00	21.778.380.000,00	97,04	10.762.859.500,00	102,35
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	16.454.105.000,00	(100,00)
	DAK Air Minum	15.000.000.000,00	14.238.048.635,00	94,92	11.033.469.000,00	29,04
	DAK Sanitasi	4.050.000.000,00	4.050.000.000,00	100,00	1.950.000.000,00	107,69
	DAK Irigasi	0,00	0,00	0,00	4.274.239.500,00	(100,00)
6	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	1.291.125.000,00	(100,00)
	Jumlah	71.473.033.180,00	66.466.496.948,00	93,00	89.691.850.759,00	(25,89)

Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan sebesar Rp23.225.353.811,00 atau 25,89%. Penurunan paling dominan terdapat pada DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp159.443.541.491,00 sebagai berikut.

Tabel 24 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	DAK Non Fisik Bidang Pendidikan					
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	39.545.400.000,00	36.763.903.862,00	92,97	34.913.634.262,00	5,30
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	100,00	1.240.000.000,00	74,19
	Tunjangan Profesi Guru PNSD	92.107.622.000,00	92.107.620.000,00	100,00	87.015.173.489,00	5,85
	Tambahan penghasilan Guru PNSD	1.504.297.000,00	1.748.096.950,00	116,21	1.485.145.500,00	17,71
	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bantuan Operasional PAUD	7.022.400.000,00	6.993.640.286,00	99,59	6.659.495.000,00	5,02
	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	1.942.800.000,00	1.920.877.346,00	98,87	1.546.200.000,00	24,23
2	DAK Non Fisik Bidang Kesehatan					
	BOKKB -Bantuan Operasional Kesehatan	5.008.550.000,00	0,00	(100,00)	12.601.997.531,00	(100,00)
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	410.496.000,00	3.683.415.108,00	897,31	0,00	100,00
	Bantuan Operasional Kesehatan	17.578.172.000,00	12.304.720.400,00	70,00	0,00	100,00
	Bantuan Operasional Kesehatan KB Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bantuan Operasional Kesehatan KB	5.105.716.000,00	0,00	0,00	2.381.946.870,00	(100,00)
3	Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM	406.770.000,00	334.149.250,00	82,15	293.245.149,00	13,95
4	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	427.800.000,00	341.004.873,00	79,71	244.776.000,00	39,31
5	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	354.013.405,00	(100,00)
6	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.103.800.000,00	1.086.113.416,00	98,40	94.032.000,00	1.055,05
Jumlah		174.323.823.000,00	159.443.541.491,00	91,46	148.829.659.206,00	7,13

Dana Alokasi Khusus Non Fisik mengalami kenaikan sebesar Rp10.613.882.285,00 atau 7,13%. Kenaikan paling dominan terdapat pada DAK Non Fisik- Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp5.092.446.511,00.



5.1.1.2.2 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
112.923.793.000,00	112.845.982.320,00	114.436.736.400,00

Jumlah realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp112.845.982.320,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp114.436.736.400,00 terdiri atas:

Tabel 25 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	10.342.946.000,00	(100,00)
2	Dana Desa	112.923.793.000,00	112.845.982.320,00	99,93	104.093.790.400,00	8,41
	Jumlah	112.923.793.000,00	112.845.982.320,00	99,93	114.436.736.400,00	(1,39)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp1.590.754.080,00 atau 1,39% dari tahun sebelumnya. Realisasi Dana Insentif Daerah tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp10.342.946.000,00. Realisasi Dana Desa tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar Rp112.845.982.320,00 dan sebesar Rp104.093.790.400,00.

5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari pendapatan APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu yang dialokasikan dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Rincian Dana Insentif Daerah (DID) sebagai berikut.

Tabel 26 Dana Insentif Daerah

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	10.342.946.000,00	(100,00)
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	10.342.946.000,00	(100,00)

Jumlah realisasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.342.946.000,00.

5.1.1.2.2.2 Dana Desa

Dana Desa adalah bagian dari dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Dana Desa sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 27 Dana Desa

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Dana Desa	112.923.793.000,00	112.845.982.320,00	99,93	104.093.790.400,00	8,41
Jumlah		112.923.793.000,00	112.845.982.320,00	99,93	104.093.790.400,00	8,41

Jumlah realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp112.845.982.320,00, sedangkan realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp104.093.790.400,00.

5.1.1.2.3 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
121.859.700.000,00	200.714.842.692,00	181.618.220.753,00

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp200.714.842.692,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp181.618.220.753,00 terdiri atas:

Tabel 28 Pendapatan Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pendapatan Dana Bagi Hasil	121.859.700.000,00	200.714.842.692,00	164,71	181.618.220.753,00	10,51
2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		121.859.700.000,00	200.714.842.692,00	164,71	181.618.220.753,00	10,51

Selama tahun 2023 Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp19.096.621.939,00 atau 10,51%. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut.

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

Tabel 29 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.416.222.816,00	16.798.599.935,00	147,15	22.554.874.481,00	(25,52)
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.002.982.258,00	13.809.891.493,00	138,06	12.669.510.340,00	9,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	87.561.093.343,00	150.849.282.634,00	172,28	127.866.382.092,00	17,97
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	578.433.029,00	794.463.634,00	137,35	432.495.949,00	83,69



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	12.300.968.554,00	18.462.604.996,00	150,09	18.094.957.891,00	2,03
	Jumlah	121.859.700.000,00	200.714.842.692,00	164,71	181.618.220.753,00	10,51

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp19.096.621.939,00 atau 10,51% dari tahun sebelumnya. Kenaikan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak paling dominan disebabkan oleh Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp22.982.900.542,00.

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Tabel 30 Bantuan Keuangan

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bantuan Keuangan Umum pada tahun 2023 sebesar Rp0,00. Jumlah realisasi Bantuan Keuangan Umum pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun sebelumnya.

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>1.199.964.169,00</u>	<u>271.184.404,00</u>	<u>2.143.662.071,00</u>

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.1.3.1 PENDAPATAN HIBAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>1.199.964.169,00</u>	<u>271.184.404,00</u>	<u>2.143.662.071,00</u>

Realisasi Pendapatan Hibah selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp271.184.404,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.143.662.071,00 merupakan Pendapatan Hibah yang diperoleh dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri dan Sumbangan Pihak Ketiga Sejenis dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31 Pendapatan Hibah

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.156.000.000,00	51.220.225,00	4,43	0,00	100,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	43.964.169,00	219.964.179,00	500,33	2.143.662.071,00	(89,74)
Jumlah		1.199.964.169,00	271.184.404,00	22,60	2.143.662.071,00	(87,35)

Pendapatan Hibah dari pihak ketiga dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 32 Rincian Pendapatan Hibah

No.	Pemberi Hibah	Jumlah	Keterangan
1	Sumbangan Pihak Ketiga:		
	PT. Charoend Phokpand	12.500.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Peternakan
	PT. Pugung Raya	118.839.654,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Perkebunan
	PT. Patriot Intan AB	22.200.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Peternakan
	PT. Adhom Farm Indonesia	11.000.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Peternakan
	PT. Ciomas Adisatwa	12.500.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Peternakan
	PT. Berkat Usaha Mandiri	9.225.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Pelaksanaan konstruksi
	Sumbangan Masyarakat	33.699.525,00	Sumbangan Masyarakat
Jumlah		219.964.179,00	

5.1.1.3.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Jumlah realisasi Lain - Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 merupakan Lain-Lain Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 33 Rincian Lain – Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.2 BELANJA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
2.502.266.740.528,00	2.243.487.402.992,00	1.863.861.922.192,92

Belanja adalah semua transaksi pengeluaran oleh Pemerintah Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Belanja terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.574.603.639.931,00	1.406.532.036.717,00	1.241.627.856.198,92

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan Akuntansi Belanja Dan Beban sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Tabel 34 Rincian Belanja Operasi

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Pegawai	775.304.987.027,00	680.923.079.524,00	87,83	653.956.945.688,00	4,12
2	Belanja Barang dan Jasa	682.220.290.124,00	612.312.178.068,00	89,75	520.933.208.907,92	17,54
3	Belanja Hibah	106.017.572.780,00	103.264.959.125,00	97,40	44.321.201.603,00	132,99
4	Belanja Bantuan Sosial	11.060.790.000,00	10.031.820.000,00	90,70	22.416.500.000,00	(55,25)
Jumlah		1.574.603.639.931,00	1.406.532.036.717,00	89,33	1.241.627.856.198,92	13,28

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp164.904.180.518,08 atau sebesar 13,28% dari tahun sebelumnya.

5.1.2.1.1 BELANJA PEGAWAI

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
775.304.987.027,00	680.923.079.524,00	653.956.945.688,00

Jumlah realisasi Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp680.923.079.524,00 dan Rp653.956.945.688,00 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 35 Rincian Belanja Pegawai

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	424.018.458.333,00	355.673.033.345,00	83,88	344.136.034.135,00	3,35
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	215.322.839.135,00	196.601.367.692,00	91,31	193.043.112.050,00	1,84
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	105.748.684.935,00	100.704.523.189,00	95,23	87.285.442.015,00	15,37
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.238.872.156,00	20.159.793.625,00	90,65	22.428.513.779,00	(10,12)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	170.310.279,00	130.787.480,00	76,79	726.393.709,00	(81,99)
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	852.480.000,00	741.600.000,00	86,99	912.450.000,00	(18,72)
7	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	591.600.000,00	589.234.500,00	99,60	0,00	100,00
8	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	100.442.189,00	73.839.693,00	73,51	0,00	100,00
9	Belanja Pegawai BLUD	6.261.300.000,00	6.248.900.000,00	99,80	5.425.000.000,00	15,19
	Jumlah	775.304.987.027,00	680.923.079.524,00	87,83	653.956.945.688,00	4,12

Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp26.966.133.836,00 atau sebesar 4,12% dari tahun sebelumnya.

Tabel 36 Rincian Belanja Pegawai per SKPD

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	392.218.079.193,00	348.895.281.560,00	88,95
2	Dinas Kesehatan	127.573.828.834,00	111.289.348.709,00	87,24
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9.559.845.000,00	8.496.567.682,00	88,88
4	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	8.656.116.291,00	7.171.899.551,00	82,85
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.766.555.914,00	5.997.032.349,00	88,63
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.550.596.421,00	2.209.735.809,00	86,64
7	Dinas Sosial	4.166.000.260,00	3.365.538.103,00	80,79
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	7.209.532.981,00	6.025.277.345,00	83,57
9	Dinas Pengendalian Masyarakat, KB, P3A	5.106.151.528,00	4.410.558.631,00	86,38
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.300.403.044,00	4.376.031.004,00	82,56
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.981.537.121,00	3.902.546.752,00	78,34
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.193.504.989,00	4.363.439.848,00	84,02
13	Dinas Perhubungan	5.760.784.006,00	5.054.768.645,00	87,74
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.836.888.971,00	3.229.887.314,00	84,18
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan	4.757.366.413,00	4.391.162.525,00	92,30
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.408.214.793,00	3.039.222.631,00	89,17
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.700.753.521,00	3.231.726.390,00	87,33
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.104.849.778,00	3.603.010.113,00	87,77
19	Dinas Pariwisata	4.270.436.648,00	3.622.075.892,00	84,82



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	24.351.065.845,00	20.568.222.293,00	84,47
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.333.580.283,00	6.289.886.821,00	85,77
22	Sekretariat Daerah	23.371.528.791,00	20.854.190.451,00	89,23
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27.920.158.254,00	25.134.733.483,00	90,02
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.444.592.919,00	5.906.752.254,00	79,34
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.113.769.343,00	7.605.725.320,00	93,74
26	Badan Pendapatan Daerah	8.679.692.380,00	7.314.187.805,00	84,27
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	4.949.323.143,00	4.274.212.902,00	86,36
28	Inspektorat Kabupaten	12.119.828.117,00	11.257.482.444,00	92,88
29	Kantor Kecamatan Bajuin	2.474.420.610,00	2.022.974.179,00	81,76
30	Kantor Kecamatan Bati-Bati	3.096.852.863,00	2.650.539.834,00	85,59
31	Kantor Kecamatan Batu Ampar	2.617.211.628,00	1.987.413.748,00	75,94
32	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	3.031.670.921,00	2.430.126.089,00	80,16
33	Kantor Kecamatan Jorong	2.527.947.082,00	1.959.603.017,00	77,52
34	Kantor Kecamatan Kintap	2.072.920.647,00	1.782.111.322,00	85,97
35	Kantor Kecamatan Kurau	2.390.172.229,00	2.001.660.844,00	83,75
36	Kantor Kecamatan Pelaihari	9.764.662.647,00	8.937.102.114,00	91,52
37	Kantor Kecamatan Panyipatan	2.914.228.761,00	2.089.763.540,00	71,71
38	Kantor Kecamatan Takisung	2.860.884.142,00	2.638.694.616,00	92,23
39	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	2.956.404.794,00	2.170.245.964,00	73,41
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.192.625.922,00	4.372.339.631,00	84,20
Jumlah		775.304.987.027,00	680.923.079.524,00	87,83

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp355.673.033.345,00 pada tabel di atas terdiri dari:

Tabel 37 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	233.138.976.759	196.201.565.851,00	84,16
2	Dinas Kesehatan	76.817.053.446	64.107.245.299,00	83,45
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.760.145.000	4.293.357.729,00	90,19
4	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	4.567.225.911	3.695.652.518,00	80,92
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.403.262.549	3.036.655.705,00	89,23
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.278.857.550	1.157.562.181,00	90,52
7	Dinas Sosial	2.095.733.236	1.662.209.713,00	79,31
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3.915.675.856	2.931.917.087,00	74,88
9	Dinas Pengendalian Masyarakat, KB, P3A	2.584.496.345	2.248.227.273,00	86,99
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.748.140.949	2.139.375.061,00	77,85



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.441.377.750	1.813.012.435,00	74,26
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.475.154.949	2.165.197.702,00	87,48
13	Dinas Perhubungan	2.884.027.281	2.479.991.506,00	85,99
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.701.940.363	1.422.548.034,00	83,58
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan	2.187.044.840	2.118.067.735,00	96,85
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.634.509.303	1.405.167.529,00	85,97
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.784.098.274	1.574.076.689,00	88,23
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.957.896.497	1.812.760.373,00	92,59
19	Dinas Pariwisata	2.092.375.530	1.671.839.543,00	79,90
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	13.726.705.195	10.844.376.674,00	79,00
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.641.218.133	3.073.428.759,00	84,41
22	Sekretariat Daerah	9.862.794.277	8.432.771.655,00	85,50
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.844.974.813	2.423.509.630,00	85,19
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.471.118.154	2.471.828.213,00	71,21
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.446.485.348	3.264.936.469,00	94,73
26	Badan Pendapatan Daerah	3.168.625.468	2.185.536.039,00	68,97
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.413.816.603	2.030.620.697,00	84,12
28	Inspektorat Kabupaten	5.004.907.317	4.578.874.765,00	91,49
29	Kantor Kecamatan Bajuin	1.239.357.331	1.019.056.623,00	82,22
30	Kantor Kecamatan Bati-Bati	1.741.508.941	1.437.902.751,00	82,57
31	Kantor Kecamatan Batu Ampar	1.330.940.391	998.028.672,00	74,99
32	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	1.601.046.632	1.304.661.196,00	81,49
33	Kantor Kecamatan Jorong	1.263.967.980	1.000.595.951,00	79,16
34	Kantor Kecamatan Kintap	1.074.465.723	874.583.302,00	81,40
35	Kantor Kecamatan Kurau	1.154.179.418	1.011.241.814,00	87,62
36	Kantor Kecamatan Pelaihari	5.202.545.482	4.934.447.192,00	94,85
37	Kantor Kecamatan Panyipatan	1.625.238.807	1.070.188.602,00	65,85
38	Kantor Kecamatan Takisung	1.504.553.667	1.416.577.571,00	94,15
39	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	1.598.026.526	1.099.948.417,00	68,83
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.633.989.739	2.263.488.390,00	85,93
Jumlah		424.018.458.333,00	355.673.033.345,00	83,88

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp196.601.367.692,00 pada tabel di atas terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 38 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan PNS

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55.275.393.434	53.842.413.086,00	97,41
2	Dinas Kesehatan	44.495.475.388	40.933.203.410,00	91,99
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.799.700.000	4.203.209.953,00	87,57
4	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	4.088.890.380	3.476.247.033,00	85,02
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.363.293.365	2.960.376.644,00	88,02
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.271.738.871	1.052.173.628,00	82,74
7	Dinas Sosial	2.070.267.024	1.703.328.390,00	82,28
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3.293.857.125	3.093.360.258,00	93,91
9	Dinas Pengendalian Masyarakat, KB, P3A	2.521.655.183	2.162.331.358,00	85,75
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.552.262.095	2.236.655.943,00	87,63
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.540.159.371	2.089.534.317,00	82,26
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.718.350.040	2.198.242.146,00	80,87
13	Dinas Perhubungan	2.876.756.725	2.574.777.139,00	89,50
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.134.948.608	1.807.339.280,00	84,65
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan	2.570.321.573	2.273.094.790,00	88,44
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.773.705.490	1.634.055.102,00	92,13
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.916.655.247	1.657.649.701,00	86,49
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.146.953.281	1.790.249.740,00	83,39
19	Dinas Pariwisata	2.178.061.118	1.950.236.349,00	89,54
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	10.624.360.650	9.723.845.619,00	91,52
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.692.362.150	3.216.458.062,00	87,11
22	Sekretariat Daerah	12.798.424.235	11.750.631.316,00	91,81
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.523.831.285	2.349.830.228,00	93,11
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.973.474.765	3.434.924.041,00	86,45
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.667.283.995	4.340.788.851,00	93,00
26	Badan Pendapatan Daerah	2.874.048.788	2.612.357.007,00	90,89
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.535.506.540	2.243.592.205,00	88,49
28	Inspektorat Kabupaten	7.114.920.800	6.678.607.679,00	93,87
29	Kantor Kecamatan Bajuin	1.235.063.279	1.003.917.556,00	81,28
30	Kantor Kecamatan Bati-Bati	1.355.343.922	1.212.637.083,00	89,47
31	Kantor Kecamatan Batu Ampar	1.286.271.237	989.385.076,00	76,92
32	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	1.430.624.289	1.125.464.893,00	78,67
33	Kantor Kecamatan Jorong	1.263.979.102	959.007.066,00	75,87
34	Kantor Kecamatan Kintap	998.454.924	907.528.020,00	90,89
35	Kantor Kecamatan Kurau	1.235.992.811	990.419.030,00	80,13



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
36	Kantor Kecamatan Pelaihari	4.562.117.165	4.002.654.922,00	87,74
37	Kantor Kecamatan Panyipatan	1.288.989.954	1.019.574.938,00	79,10
38	Kantor Kecamatan Takisung	1.356.330.475	1.222.117.045,00	90,10
39	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	1.358.378.268	1.070.297.547,00	78,79
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.558.636.183	2.108.851.241,00	82,42
Jumlah		215.322.839.135,00	196.601.367.692,00	91,31

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPR serta KDH/WKDH sebesar Rp741.600.000,00 pada tabel di atas terdiri dari:

Tabel 39 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	312.480.000	201.600.000,00	64,52
2	Sekretariat Daerah	540.000.000	540.000.000,00	100,00
Jumlah		852.480.000,00	741.600.000,00	86,99

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp589.234.500,00 pada tabel di atas terdiri dari:

Tabel 40 Rincian Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Badan Pendapatan Daerah	591.600.000,00	589.234.500,00	99,60
Jumlah		591.600.000,00	589.234.500,00	99,60

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp73.839.693,00 pada tabel di atas terdiri dari:

Tabel 41 Rincian Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Badan Pendapatan Daerah	100.442.189,00	73.839.693,00	73,51
Jumlah		100.442.189,00	73.839.693,00	73,51

Realisasi Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp6.248.900.000,00 pada tabel di atas merupakan Belanja Pegawai BLUD RSUD H. Boejasin, sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 42 Rincian Belanja Pegawai BLUD

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	BLUD RSUD H. Boejasin	6.261.300.000,00	6.248.900.000,00	99,80
Jumlah		6.261.300.000,00	6.248.900.000,00	99,80

5.1.2.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
682.220.290.124,00	612.312.178.068,00	520.933.208.907,92

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp612.312.178.068,00 dan Rp520.933.208.907,92 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 43 Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Barang	86.634.679.074,00	72.398.550.977,00	83,57	62.842.238.710,00	15,21
2	Belanja Jasa	278.588.000.267,00	249.841.404.222,00	89,68	229.781.522.717,00	8,73
3	Belanja Pemeliharaan	105.057.580.428,00	97.816.392.204,00	93,11	67.165.991.058,00	45,63
4	Belanja Perjalanan Dinas	78.921.265.938,00	66.348.777.851,00	84,07	45.122.842.241,00	47,04
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.989.860.000,00	17.701.974.360,00	98,40	14.367.849.698,00	23,21
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	27.958.693.844,00	26.643.247.178,00	95,30	27.527.531.405,00	(3,21)
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	87.070.210.573,00	81.561.831.276,00	93,67	74.125.233.078,92	10,03
Jumlah		682.220.290.124,00	612.312.178.068,00	89,75	520.933.208.907,92	17,54

Tabel 44 Rincian Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	84.413.379.074,00	70.211.868.427,00	83,18	62.820.064.710,00	11,77
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.221.300.000,00	2.186.682.550,00	98,44	22.174.000,00	9.761,47
3	Belanja Jasa Kantor	184.319.843.010,00	162.560.956.736,00	88,20	150.075.772.330,00	8,32



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
4	Belanja Premi Asuransi	63.601.678.400,00	61.944.307.997,00	97,39	60.926.358.860,00	1,67
5	Belanja Sewa Tanah	55.000.000,00	35.640.000,00	64,80	1.500.000,00	2.276,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.015.906.799,00	6.227.404.990,00	88,76	5.156.888.641,00	20,76
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.150.817.189,00	693.667.000,00	60,28	1.159.430.400,00	(40,17)
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	157.957.000,00	129.792.000,00	82,17	56.430.000,00	130,01
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.359.487.419,00	5.142.828.760,00	95,96	4.513.046.000,00	13,95
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.864.302.350,00	3.600.198.492,00	93,17	3.419.761.062,00	5,28
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	52.000.000,00	51.777.700,00	99,57	46.742.150,00	10,77
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	280.000.000,00	185,71
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.954.418.200,00	8.403.566.172,00	70,30	3.940.592.024,00	113,26
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	246.500.000,00	242.264.375,00	98,28	205.001.250,00	18,18
15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	10.089.900,00	9.000.000,00	89,20	0,00	100,00
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.807.838.171,00	10.626.239.214,00	82,97	10.387.510.351,00	2,30
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.611.390.237,00	2.411.840.788,00	92,36	1.257.145.157,00	91,85
18	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.638.352.020,00	84.778.312.202,00	94,58	55.518.935.550,00	52,70
19	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	(100,00)
20	Belanja Perjalanan Dinas	78.921.265.938,00	66.348.777.851,00	84,07	45.122.842.241,00	47,04
21	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.927.860.000,00	17.670.974.360,00	98,57	14.367.849.698,00	22,99
22	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	62.000.000,00	31.000.000,00	50,00	0,00	100,00
23	Belanja Barang dan Jasa BOS	27.958.693.844,00	26.643.247.178,00	95,30	27.527.531.405,00	(3,21)
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	87.070.210.573,00	81.561.831.276,00	93,67	74.125.233.078,92	10,03
Jumlah		682.220.290.124,00	612.312.178.068,00	89,75	520.933.208.907,92	17,54



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp91.373.902.176,08 atau sebesar 17,54% dari tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp81.561.831.276,00 pada tabel di atas terdiri dari:

Tabel 45 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD

No.	Uraian	Nilai
1	Belanja Persediaan	3.725.145.257,00
2	Belanja Jasa	49.336.827.742,00
3	Belanja Pemeliharaan	1.322.796.319,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	3.811.334.487,00
5	Belanja Barang	23.365.727.471,00
Jumlah		81.561.831.276,00

5.1.2.1.3 BELANJA HIBAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>106.017.572.780,00</u>	<u>103.264.959.125,00</u>	<u>44.321.201.603,00</u>

Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Jumlah realisasi Belanja Hibah selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp103.264.959.125,00 dan Rp44.321.201.603,00 terdiri atas:

Tabel 46 Belanja Hibah

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi (Rp)	
			(Rp)	(Rp)		
1	Belanja Dana BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1.532.519.437,00	(100,00)
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	58.362.722.000,00	58.319.190.800,00	99,93	3.188.021.000,00	1.729,32
3	Belanja Hibah kepada BUMD	615.100.000,00	456.618.582,00	74,23	0,00	100,00
4	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	45.575.052.230,00	43.024.451.193,00	94,40	31.511.219.048,00	36,54
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.698.550,00	1.464.698.550,00	100,00	1.464.698.550,00	0,00
6	Belanja Hibah Dana BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	6.624.743.568,00	(100,00)
Jumlah		106.017.572.780,00	103.264.959.125,00	97,40	44.321.201.603,00	132,99



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp58.943.757.522,00 atau sebesar 132,99% dari tahun sebelumnya.

Adapun penjelasan secara rinci atas Hibah sebesar Rp103.264.959.125,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 47 Rincian Belanja Hibah Per SKPD

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.868.688.255,00	12.616.077.139,00	98,04
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	12.407.660.000,00	12.247.106.800,00	98,71
3	Dinas Kesehatan	615.100.000,00	456.618.582,00	74,23
4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	406.899.136,00	396.791.820,00	97,52
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.150.000.000,00	4.028.631.770,00	97,08
8	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6.486.579.839,00	6.277.300.000,00	96,77
9	Sekretariat Daerah	9.120.000.000,00	8.797.986.464,00	96,47
10	Kantor Kecamatan Bajuin	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
11	Kantor Kecamatan Bati-Bati	988.000.000,00	598.402.000,00	60,57
12	Kantor Kecamatan Batu Ampar	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
13	Kantor Kecamatan Jorong	1.000.000.000,00	681.440.000,00	68,14
14	Kantor Kecamatan Kintap	842.580.000,00	842.580.000,00	100,00
15	Kantor Kecamatan Kurau	766.325.000,00	672.875.000,00	87,81
16	Kecamatan Bumi Makmur	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
17	Kantor Kecamatan Pelaihari	1.562.645.000,00	1.427.754.000,00	91,37
18	Kantor Kecamatan Panyipatan	1.000.000.000,00	901.580.000,00	90,16
19	Kantor Kecamatan Takisung	942.335.000,00	709.755.000,00	75,32
20	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	1.000.000.000,00	749.300.000,00	74,93
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48.860.760.550,00	48.860.760.550,00	100,00
Jumlah		106.017.572.780,00	103.264.959.125,00	97,40

Adapun penjelasan secara rinci atas Hibah Dana BOP PAUD dapat dijelaskan pada **Lampiran 14**.

5.1.2.1.4 BELANJA BANTUAN SOSIAL

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
11.060.790.000,00	10.031.820.000,00	22.416.500.000,00

Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp10.031.820.000,00 dan Rp22.416.500.000,00 dimana realisasi Tahun Anggaran 2023 ini merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat.

Tabel 48 Rincian Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	495.600.000	495.600.000,00	100,00	0,00	100,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	7.602.990.000,00	7.360.020.000,00	96,80	22.416.500.000,00	(67,17)
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.962.200.000,00	2.176.200.000,00	73,47	0,00	100,00
Jumlah		11.060.790.000,00	10.031.820.000,00	90,70	22.416.500.000,00	(55,25)

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp12.384.680.000,00 atau sebesar 55,25% dari tahun sebelumnya.

Disamping itu penjelasan secara rinci atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.031.820.000,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 49 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu (DAK Fisik Bedah Rumah)	0,00	0,00	0,00	7.835.000.000,00	(100,00)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.565.190.000,00	9.536.220.000,00	90,26	14.581.500.000,00	(34,60)
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	495.600.000,00	495.600.000,00	100,00	0,00	100,00
Jumlah		11.060.790.000,00	10.031.820.000,00	90,70	22.416.500.000,00	(55,25)

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal untuk tahun 2023 terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.612.744.454,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp118.702.153.452,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp181.244.711.046,00, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp283.953.961.471,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp732.986.495,00. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 50 Realisasi Belanja Modal 2023

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Tanah	26.312.057.067,00	1.612.744.454,00	6,13	240.492.000,00	570,60



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.751.870.998,00	118.702.153.452,00	90,78	91.151.091.039,00	30,23
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	193.456.505.513,00	181.244.711.046,00	93,69	104.788.622.560,00	72,96
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	301.479.559.023,00	283.953.961.471,00	94,19	200.681.712.555,00	41,49
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	839.257.500,00	732.986.495,00	87,34	395.678.300,00	85,25
6	Belanja Modal Aset Lainnya	6.307.471.005,00	5.515.155.692,00	87,44	0,00	100,00
JUMLAH		659.146.721.106,00	591.761.712.610,00	89,78	397.257.596.454,00	48,96

5.1.2.2.1 BELANJA MODAL TANAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u><u>26.312.057.067,00</u></u>	<u><u>1.612.744.454,00</u></u>	<u><u>240.492.000,00</u></u>

Jumlah realisasi Belanja Modal Tanah selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp1.612.744.454,00 dan Rp240.492.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 51 Belanja Modal Tanah

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.242.191.728,00	523.714.000,00	42,16	12.490.000,00	4.093,07
2	Tanah Persil Lainnya	200.572.639,00	38.954.000,00	19,42	228.002.000,00	(82,92)
3	Tanah Lapangan Olahraga	4.081.768.000,00	315.641.841,00	7,73	0,00	100,00
4	Tanah untuk Jalan	19.862.524.700,00	99.537.000,00	0,50	0,00	100,00
5	Tanah untuk Bangunan Air	925.000.000,00	634.897.613,00	68,64	0,00	100,00
JUMLAH		26.312.057.067,00	1.612.744.454,00	6,13	240.492.000,00	570,60

Tabel 52 Rincian Belanja Modal Tanah

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	323.726.000,00	265.582.000,00	82,04	12.490.000,00	2.026,36
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	200.572.639,00	38.954.000,00	19,42	228.002.000,00	(82,92)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan	21.487.524.700,00	825.184.613,00	3,84	0,00	100,00
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.081.768.000,00	315.641.841,00	7,73	0,00	100,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	169.019.478,00	167.382.000,00	99,03	0,00	100,00
6	Dinas Kesehatan	49.446.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Jumlah		26.312.057.067,00	1.612.744.454,00	6,13	240.492.000,00	570,60

Realisasi Belanja Modal Tanah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.372.252.454,00 atau sebesar 570,60% dari tahun sebelumnya.

5.1.2.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>130.751.870.998,00</u>	<u>118.702.153.452,00</u>	<u>91.151.091.039,00</u>

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp118.702.153.452,00 dan Rp91.151.091.039,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Alat Besar	658.338.915,00	622.624.441,00	94,58	75.571.037,00	723,89
2	Belanja Modal Alat Angkutan	15.550.562.460,00	13.827.350.366,00	88,92	6.040.401.000,00	128,91
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	124.186.350,00	98.774.000,00	79,54	168.080.266,00	(41,23)
4	Belanja Modal Alat Pertanian	331.956.596,00	318.143.114,00	95,84	3.660.000,00	8.592,43
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.602.221.196,00	28.696.459.471,00	96,94	12.340.034.317,00	132,55
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	6.901.514.416,00	6.523.135.114,00	94,52	532.026.725,00	1.126,09
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	61.041.596.677,00	53.879.271.988,00	88,27	60.789.923.750,00	(11,37)
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.939.187.206,00	1.294.050.936,00	66,73	3.756.171.304,00	(65,55)
9	Belanja Modal Komputer	14.052.157.110,00	12.968.054.022,00	92,29	6.608.864.440,00	96,22
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	168.300.000,00	(100,00)
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	157.327.556,00	142.315.000,00	90,46	200.378.200,00	(28,98)
12	Belanja Modal Alat Peraga	1.567.236,00	615.000,00	39,24	358.600.000,00	(99,83)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	21.351.960,00	20.400.000,00	95,54	25.530.000,00	(20,09)
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	369.903.320,00	310.960.000,00	84,07	83.550.000,00	272,18
Jumlah		130.751.870.998,00	118.702.153.452,00	90,78	91.151.091.039,00	30,23

Tabel 54 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pengadaan Alat-alat Bantu	658.338.915,00	622.624.441,00	94,58	75.571.037,00	723,89
2	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	15.065.906.240,00	13.352.190.366,00	88,63	5.562.700.000,00	140,03
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	484.656.220,00	475.160.000,00	98,04	437.601.000,00	8,58
4	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	40.100.000,00	(100,00)
5	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	33.862.869,00	(100,00)
6	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	75.071.570,00	51.076.000,00	68,04	1.200.000,00	4.156,33
7	Pengadaan Alat Ukur	49.114.780,00	47.698.000,00	97,12	133.017.397,00	(64,14)
8	Pengadaan Alat Pengolahan	331.956.596,00	318.143.114,00	95,84	3.660.000,00	8.592,43
11	Pengadaan Alat Kantor	4.055.385.014,00	3.867.704.172,00	95,37	1.046.812.161,00	269,47
10	Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.431.658.807,00	24.724.177.749,00	97,22	11.211.566.881,00	120,52
11	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	115.177.375,00	104.577.550,00	90,80	81.655.275,00	28,07
12	Pengadaan Alat Studio	2.941.178.766,00	2.681.035.114,00	91,16	364.940.725,00	634,65
13	Pengadaan Alat Komunikasi	58.998.000,00	48.600.000,00	82,38	87.536.000,00	(44,48)
14	Pengadaan Peralatan Pemancar	3.901.337.650,00	3.793.500.000,00	97,24	79.550.000,00	4.668,70
15	Pengadaan Alat Kedokteran	26.908.021.994,00	22.532.733.806,00	83,74	39.251.146.725,00	(42,59)
16	Pengadaan Alat Kesehatan Umum	34.133.574.683,00	31.346.538.182,00	91,83	21.538.777.025,00	45,54
17	Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.663.110.805,00	1.039.646.336,00	62,51	1.631.084.554,00	(36,26)
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	276.076.401,00	254.404.600,00	92,15	120.053.750,00	111,91



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ Penurunan %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.895.533.000,00	(100,00)
20	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	0,00	109.500.000,00	(100,00)
21	Pengadaan Komputer Unit	11.274.173.533,00	10.489.242.229,00	93,04	5.784.885.623,00	81,32
22	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.777.983.577,00	2.478.811.793,00	89,23	823.978.817,00	200,83
23	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	168.300.000,00	(100,00)
24	Belanja Modal Alat Pelindung	136.512.720,00	123.325.000,00	90,34	69.508.200,00	77,43
25	Belanja Modal Alat SAR	20.814.836,00	18.990.000,00	91,23	130.870.000,00	(85,49)
26	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.567.236,00	615.000,00	39,24	358.600.000,00	(99,83)
27	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	21.351.960,00	20.400.000,00	95,54	25.530.000,00	(20,09)
28	Belanja Modal Peralatan Olahraga	369.903.320,00	310.960.000,00	84,07	83.550.000,00	272,18
Jumlah		130.751.870.998,00	118.702.153.452,00	90,78	91.151.091.039,00	30,23

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp27.551.062.413,00 atau sebesar 30,23% dari tahun sebelumnya.

5.1.2.2.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
193.456.505.513,00	181.244.711.046,00	104.788.622.560,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp181.244.711.046,00 dan Rp104.788.622.560,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 55 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	191.716.508.971,00	179.771.147.314,00	93,77	96.021.771.688,00	87,22
2	Belanja Modal Monumen	270.386.712,00	268.240.000,00	99,21	179.161.000,00	49,72
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.469.609.830,00	1.205.323.732,00	82,02	8.587.689.872,00	(85,96)
Jumlah		193.456.505.513,00	181.244.711.046,00	93,69	104.788.622.560,00	72,96



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 56 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	191.716.508.971,00	179.771.147.314,00	93,77	96.021.771.688,00	87,22
2	Pengadaan Bangunan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	270.386.712,00	268.240.000,00	99,21	179.161.000,00	49,72
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.469.609.830,00	1.205.323.732,00	82,02	8.587.689.872,00	(85,96)
Jumlah		193.456.505.513,00	181.244.711.046,00	93,69	104.788.622.560,00	72,96

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp76.456.088.486,00 atau sebesar 72,96% dari tahun sebelumnya.

5.1.2.2.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>301.479.559.023,00</u>	<u>283.953.961.471,00</u>	<u>200.681.712.555,00</u>

Jumlah realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp283.953.961.471,00 dan Rp200.681.712.555,00 terdiri atas:

Tabel 57 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	164.755.225.515,00	156.458.463.374,00	94,96	124.333.924.938,00	25,84
2	Belanja Modal Bangunan Air	115.358.868.629,00	107.620.794.329,00	93,29	59.051.040.417,00	82,25
3	Belanja Modal Instalasi	12.751.685.811,00	11.414.958.100,00	89,52	2.924.785.300,00	290,28
4	Belanja Modal Jaringan	8.613.779.068,00	8.459.745.668,00	98,21	14.371.961.900,00	(41,14)
Jumlah		301.479.559.023,00	283.953.961.471,00	94,19	200.681.712.555,00	41,49

Tabel 58 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pengadaan Jalan	143.913.628.347,00	136.961.216.318,00	95,17	92.430.628.008,00	48,18
2	Pengadaan Jembatan	20.841.597.168,00	19.497.247.056,00	93,55	31.903.296.930,00	(38,89)
3	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	14.541.834.929,00	13.539.539.000,00	93,11	4.264.206.800,00	217,52
4	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	0,00	0,00	0,00	2.804.942.000,00	(100,00)
5	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai	39.242.391.593,00	36.686.816.900,00	93,49	10.205.464.917,00	259,48



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
	dan Penanggulangan Bencana Alam					
6	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	1.290.087.000,00	(100,00)
7	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	35.574.376.455,00	33.512.102.635,00	94,20	28.522.227.400,00	17,49
8	Pengadaan Bangunan Air Kotor	26.000.265.652,00	23.882.335.794,00	91,85	11.964.112.300,00	99,62
9	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	12.751.685.811,00	11.414.958.100,00	89,52	1.796.364.300,00	535,45
10	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	1.128.421.000,00	(100,00)
11	Pengadaan Jaringan Listrik	8.613.779.068,00	8.459.745.668,00	98,21	14.371.961.900,00	(41,14)
Jumlah		301.479.559.023,00	283.953.961.471,00	94,19	200.681.712.555,00	41,49

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp83.272.248.916,00 atau sebesar 41,49% dari tahun sebelumnya.

5.1.2.2.5 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
839.257.500,00	732.986.495,00	16.548.300,00

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp732.986.495,00 dan Rp16.548.300,00 terdiri atas:

Tabel 59 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	12.098.300,00	(100,00)
2	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	(100,00)
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	829.700.000	727.531.495,00	87,69	0,00	100,00
4	Pengadaan Tanaman	9.557.500,00	5.455.000,00	57,08	0,00	100,00
Jumlah		839.257.500,00	732.986.495,00	87,34	16.548.300,00	4.329,38

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp716.438.195,00 atau sebesar 4.329,38% dari tahun sebelumnya.

5.1.2.2.6 BELANJA MODAL ASET LAINNYA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>6.307.471.005,00</u>	<u>5.515.155.692,00</u>	<u>379.130.000,00</u>

Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Lainnya selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp5.515.155.692,00 dan Rp379.130.000,00. Rincian Belanja Aset lainnya sebagai berikut.

Tabel 60 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Software	113.371.500,00	0,00	0,00	379.130.000,00	(100,00)
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	199.050.000,00	197.000.000,00	98,97	0,00	100,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	495.049.505,00	474.913.500,00	95,93	0,00	100,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.500.000.000,00	4.843.242.192,00	88,06	0,00	100,00
Jumlah		6.307.471.005,00	5.515.155.692,00	87,44	379.130.000,00	1.354,69

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.136.025.692,00 atau sebesar 1.354,69% dari tahun sebelumnya.

5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>22.172.915.145,00</u>	<u>540.899.999,00</u>	<u>746.426.000,00</u>

Belanja Tak Terduga adalah Belanja yang dialokasikan untuk keadaan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan/atau bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tak Terduga pada Tahun 2023 digunakan untuk bantuan tidak terencana sebesar Rp540.899.999,00. Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp205.526.001,00 atau sebesar 27,53% dari tahun sebelumnya. Rincian Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut.

Tabel 61 Rincian Belanja Tak Terduga

No.	Uraian	TA. 2023	
		Nomor SK Bupati	Realisasi
1	Korban Bencana Angin Puting Beliung, Angin Kencang Serta Ombak Besar, dan Kebakaran di Kabupaten Tanah Laut	188.45/426-KUM/2023	268.500.000,00
2	Pengembalian Kelebihan Pelimpahan Hasil Bersih Lelang Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	188.45/211-KUM/2023	1.899.999,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA. 2023	
		Nomor SK Bupati	Realisasi
3	Korban Angin Puting Beliung dan Kebakaran di Kabupaten Tanah Laut	188.45/1073-KUM/2023	168.000.000,00
4	Korban Angin Puting Beliung dan Kebakaran di Kabupaten Tanah Laut	188.45/1008-KUM/2023	28.500.000,00
5	Korban Bencana Angin Puting Beliung dan Bencana Kebakaran di Kabupaten Tanah Laut	188.45/1229-KUM/2023	17.500.000,00
6	Korban Bencana Angin Puting Beliung dan Bencana Kebakaran di Kabupaten Tanah Laut	188.45/1397-KUM/2023	56.500.000,00
Jumlah			540.899.999,00

5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>246.343.464.346,00</u>	<u>244.652.753.666,00</u>	<u>224.230.043.540,00</u>

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

5.1.2.4.1 BELANJA BAGI HASIL

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>6.124.680.450,00</u>	<u>6.111.780.450,00</u>	<u>4.895.286.950,00</u>

Belanja Bagi Hasil Pendapatan untuk tahun 2023 dan 2022 terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp4.917.100.000,00 dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.194.680.450,00.

Grafik 1 Realisasi Belanja Bagi Hasil 2023





5.1.2.4.1.1 BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
4.930.000.000,00	4.917.100.000,00	4.100.025.000,00

Jumlah realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp4.917.100.000,00 dan Rp4.100.025.000,00.

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp817.075.000,00 atau sebesar 19,93% dari tahun sebelumnya.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah tidak bisa disalurkan sepenuhnya dikarenakan adanya kendala dalam proses perubahan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2023. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan bagi hasil yang disalurkan kepada Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pendapatan Pajak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

5.1.2.4.1.2 BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.194.680.450,00	1.194.680.450,00	795.261.950,00

Jumlah realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.194.680.450,00 dan Rp795.261.950,00. Belanja bagi hasil retribusi daerah ini merupakan bagi hasil yang disalurkan kepada Pemerintah Desa.

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp399.418.500,00 atau sebesar 50,22% dari tahun sebelumnya.

5.1.2.4.2 BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
240.218.783.896,00	238.540.973.216,00	219.334.756.590,00

Jumlah realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah Rp238.540.973.216,00 dan Rp219.334.756.590,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 62 Rincian Belanja Bantuan Keuangan

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	240.218.783.896,00	238.540.973.216,00	99,30	219.334.756.590,00	8,76
	Jumlah	240.218.783.896,00	238.540.973.216,00	99,30	219.334.756.590,00	8,76

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp19.206.216.626,00 atau sebesar 8,76% dari tahun sebelumnya.

Adapun Belanja Bantuan Keuangan ke Desa tidak dapat terealisasi dikarenakan ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati nomor 22 Tahun 2023, adapun dengan rincian belanja bantuan keuangan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 63 Rincian Belanja Bantuan Keuangan ke Desa

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	238.618.783.896,00	238.540.973.216,00	99,97	115.240.966.190,00	106,99
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	1.600.000.000,00	0,00	0,00	104.093.790.400,00	(100,00)
Jumlah		240.218.783.896,00	238.540.973.216,00	99,30	219.334.756.590,00	8,76

5.1.3 SURPLUS / (DEFISIT)

Surplus/Defisit merupakan selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut TA 2023 surplus sebesar Rp15.988.595.724,28 atau 2,10% dari anggaran defisit Rp762.974.381.613,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp295.377.738.906,95 atau 94,59%. Perhitungan surplus/defisit Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut.

Tabel 64 Surplus/Defisit TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pendapatan	1.739.292.358.915,00	2.259.475.998.716,28	129,91	2.159.239.661.099,87	4,64
2	Belanja	2.502.266.740.528,00	2.243.487.402.992,00	89,66	1.863.861.922.192,92	20,37
Jumlah		(762.974.381.613,00)	15.988.595.724,28	(2,10)	295.377.738.906,95	(94,59)

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>906.703.550.940,00</u>	<u>906.953.911.440,78</u>	<u>611.325.812.033,83</u>

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari pencairan Dana Cadangan, penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, pembiayaan utang Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Penerimaan dari Pembiayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp906.953.911.440,78 atau 100,03% dari total anggaran sebesar Rp906.703.550.940,00. Penerimaan pembiayaan



mencakup penerimaan Kas Daerah yang berasal dari Penggunaan SiLPA tahun lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 65 Rincian Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah	TA. 2023		TA. 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Penggunaan SILPA	831.703.550.940,00	831.703.550.940,78	604.990.188.933,83
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dari BPR Tanah Laut	0,00	248.360.500,00	6.004.455.100,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	0,00	112.018.000,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	2.000.000,00	219.150.000,00
Pencairan Dana Cadangan	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	0,00
Jumlah	906.703.550.940,00	906.953.911.440,78	611.325.812.033,83

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp906.953.911.440,78 pada tahun 2023 terdiri atas realisasi penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp831.703.550.940,78, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp248.360.500,00 dari BPR Tanah Laut dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp2.000.000,00 berasal dari penerimaan kembali Piutang Daerah atas pengelolaan sapi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp295.628.099.406,95 atau sebesar 48,35% dari tahun sebelumnya.

5.1.4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
58.318.896.928,00	58.318.896.928,00	75.000.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal Daerah, pembentukan Dana Cadangan, pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp58.318.896.928,00 atau 100% dari total anggaran sebesar Rp58.318.896.928,00. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan pemberian investasi daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 66 Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah	TA. 2023		TA. 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	40.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Penyertaan Modal Investasi Daerah	28.318.896.928,00	28.318.896.928,00	25.000.000.000,00
Jumlah	58.318.896.928,00	58.318.896.928,00	75.000.000.000,00



Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp16.681.103.072,00 atau sebesar 22,24% dari tahun sebelumnya. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 sebagai berikut.

- a. Pengeluaran Pembiayaan untuk Dana Cadangan sebesar Rp20.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/519-KUM/2022 Tanggal 23 Februari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.
- b. Pengeluaran Pembiayaan berupa Pinjaman Modal Usaha dan Penyaluran Dana yang ditempatkan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/253-KUM/2023 Tanggal 10 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Realisasi Investasi Daerah Berupa Penempatan Penyaluran Dana Investasi kepada Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- c. Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal ke Bank Kalsel sebesar Rp28.318.896.928,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tanggal 30 September 2022 tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 122 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022 tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
(85.410.272.399,00)	864.623.610.237,06	831.703.550.940,78

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.2.1 SALDO AWAL SAL

Saldo Awal Sisa Anggaran Lebih tahun 2023 adalah sebesar Rp831.703.550.940,78 merupakan sisa SAL tahun 2022.

5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp831.703.550.940,78 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2023.

Tabel 67 Penggunaan SAL Tahun Berjalan

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Penggunaan SAL	831.703.550.940,78	604.990.188.933,83	226.713.362.006,95	37,47

5.2.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Surplus Anggaran tahun 2023 sebesar Rp15.988.595.724,28 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp848.635.014.512,78 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp864.623.610.237,06 SiLPA Tahun Anggaran 2023 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja dan transfer, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 1) Dari target pendapatan sebesar Rp1.739.292.358.915,00 realisasinya sebesar Rp2.259.475.998.716,28 sehingga terdapat pencapaian di atas target pendapatan sebesar Rp520.183.639.801,28. Pelampauan target pendapatan terutama pada Pendapatan Transfer terlampaui sebesar Rp525.184.234.958,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.522.295.931.980,00 dan terealisasi sebesar Rp2.047.480.166.938,00.
- 2) Dari anggaran belanja sebesar Rp2.502.266.740.528,00 realisasinya sebesar Rp2.243.487.402.992,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp258.779.337.536,00. Sisa belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut.
 - a. Selisih kurang anggaran Belanja Operasi sebesar Rp168.071.603.214,00 yang terdiri atas:
 - selisih kurang anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp94.381.907.503,00;
 - selisih kurang anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp69.908.112.056,00;
 - selisih kurang anggaran Belanja Hibah sebesar Rp2.752.613.655,00;
 - selisih kurang anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.028.970.000,00.
 - b. Selisih kurang anggaran Belanja Modal sebesar Rp67.385.008.496,00 yang terdiri atas:
 - selisih kurang Belanja Modal Tanah sebesar Rp24.699.312.613,00;
 - selisih kurang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp12.049.717.546,00;
 - selisih kurang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp12.211.794.467,00;
 - selisih kurang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp17.525.597.552,00;
 - selisih kurang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp106.271.005,00;
 - selisih kurang Belanja Modal Aset Lainnya Rp792.315.313,00;
 - c. Selisih kurang anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp21.632.015.146,00.
 - d. Selisih kurang atau lebih pada Belanja Bagi Hasil sebesar Rp12.900.000,00
 - e. Selisih kurang anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp1.677.810.680,00.
- 3) Dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp906.703.550.940,00 realisasinya sebesar Rp906.953.911.440,78 dengan rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dengan anggaran sebesar Rp831.703.550.940,78 terealisasi sebesar Rp831.703.550.940,78, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah anggaran sebesar Rp75.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp75.000.000.000,00. Untuk Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan realisasi sebesar Rp250.360.500,00 melebihi anggaran sebesar nilai tersebut.
- 4) Dari anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp58.318.896.928,00 realisasi sebesar Rp58.318.896.928,00 terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp20.000.000.000,00, Penyertaan Modal sebesar Rp28.318.896.928,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan anggaran sesuai dengan realisasinya.



5.2.4 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (SAL)

Jumlah SAL per 31 Desember 2023 sebesar Rp864.623.610.237,06 terdiri atas saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp822.762.733.899,50, Kas di BLUD sebesar Rp39.376.080.136,75, Kas di Dana BOS sebesar Rp2.484.796.200,81, dan Kas Lainnya Rp0,00. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagai berikut.

Tabel 68 Saldo Anggaran Lebih Akhir

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Saldo Akhir SAL	864.623.610.237,06	831.703.550.940,78	32.920.059.296,28	3,96
1	Saldo Akhir Kas Daerah	822.762.733.899,50	762.266.975.672,06	60.495.758.227,44	7,94
2	Saldo Akhir Kas BLUD	39.376.080.136,75	65.761.548.698,67	(26.385.468.561,92)	(40,12)
3	Saldo Akhir Kas BOS	2.484.796.200,81	3.626.594.575,05	(1.141.798.374,24)	(31,48)
4	Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	48.431.995,00	(48.431.995,00)	(100,00)

5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

5.3.1 ASET

31 Desember 2023
(Rp)

5.301.949.613.413,75

31 Desember 2022
(Rp)

5.036.136.501.789,41

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.3.1.1 ASET LANCAR

31 Desember 2023
(Rp)

1.205.347.772.253,08

31 Desember 2022
(Rp)

929.001.492.664,02

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

5.3.1.1.1 KAS DI KAS DAERAH

31 Desember 2023
(Rp)

822.762.733.899,50

31 Desember 2022
(Rp)

762.266.975.672,06

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp822.762.733.899,50 dan Rp762.266.975.672,06 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 69 Saldo Kas Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Kas Umum Daerah Bank Kalsel No. 007.00.03.00003.8	822.762.733.899,50	762.266.975.672,06	60.495.758.227,44	7,94
Jumlah		822.762.733.899,50	762.266.975.672,06	60.495.758.227,44	7,94

Pada saldo Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 terdiri atas saldo kas terikat (yang dibatasi penggunaannya) dan saldo kas murni (saldo kas yang bersumber dari pendapatan daerah) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 70 Rincian Saldo Kas Umum Daerah Tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Kas Terikat		
1	Sisa DAK Fisik	130.833.611,00
2	Sisa DAK Non Fisik	10.687.296.353,00
3	Sisa Kas Murni	811.944.603.935,50
Total Saldo Kas		822.762.733.899,50

Sisa saldo kas pada rekening kas umum secara terinci dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut.

1) Sisa DAK Fisik

Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berada pada Kas Umum Daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp130.833.611,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 71 Sisa DAK Fisik

No.	Tahun	PAGU	Pagu Total Yang Diterima RKUD	Total Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah	Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah
1	2018	126.882.632.000,00	120.284.900.729,00	120.004.071.872,60	280.828.856,40
2	2019	109.209.362.000,00	103.104.915.132,00	102.741.731.482,00	363.183.650,00
3	2020	55.434.498.910,00	53.583.533.126,00	52.688.357.923,00	895.175.203,00
4	2021	81.530.572.000,00	77.929.750.716,00	77.628.520.725,00	301.229.991,00
5	2022	95.035.002.928,00	89.691.850.759,00	88.997.207.433,00	694.643.326,00
6	2023	71.473.033.180,00	66.466.496.948,00	66.335.663.337,00	130.833.611,00

Mutasi penggunaan Dana Alokasi Khusus pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 72 Penggunaan DAK Fisik 2023

No	Bidang	Penyaluran	Realisasi	sis
REGULER				
1	Pendidikan	10.495.301.303,00	10.430.644.233,00	64.657.070,00
	Subbid PAUD	584.855.000,00	584.855.000,00	0,00
	Subbid SD	2.168.253.847,00	2.168.253.847,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	Bidang	Penyaluran	Realisasi	sisa
	Subbid SMP	7.456.197.856,00	7.391.540.786,00	64.657.070,00
	Subbid SKB	285.994.600,00	285.994.600,00	0,00
	Subbid perpustakaan daerah	0,00	0,00	0,00
2	Kesehatan	15.904.767.010,00	15.904.767.010,00	0,00
	subbid Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	1.872.514.116,00	1.872.514.116,00	0,00
	Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00
	Pengendalian Penyakit	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00
	Penguatan Sistem Kesehatan	12.631.497.894,00	12.631.497.894,00	0,00
	Kefarmasian	0,00	0,00	0,00
	Keluarga Berencana	1.157.755.000,00	1.157.755.000,00	0,00
3	Jalan	0,00	0,00	0,00
	Subbid Jalan (Reguler)	0,00	0,00	0,00
4	Air Minum	14.238.048.635,00	14.200.704.367,00	37.344.268,00
	Subbid Air Minum	14.238.048.635,00	14.200.704.367,00	37.344.268,00
5	Sanitasi	4.050.000.000,00	4.050.000.000,00	0,00
	Subbid Sanitasi	4.050.000.000,00	4.050.000.000,00	0,00
6	Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00
	Subbid Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00
PENUGASAN				0,00
7	Jalan	21.778.380.000,00	21.749.547.727,00	28.832.273,00
	Subbid Jalan	21.778.380.000,00	21.749.547.727,00	28.832.273,00
8	Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
	Subbid Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
9	Pertanian	0,00	0,00	0,00
	Subbid Pertanian (Ketahanan Pangan)	0,00	0,00	0,00
10	Irigasi	0,00	0,00	0,00
	Subbid Irigasi			0,00
11	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	Bidang	Penyaluran	Realisasi	sisa
	Subbid Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		66.466.496.948,00	66.335.663.337,00	130.833.611,00

2) **Sisa DAK Non Fisik**

Sisa DAK Non Fisik yang berada pada Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp10.687.296.353,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 73 Sisa DAK Non Fisik 2023

No	Uraian	Penyaluran	Realisasi	Sisa
1	Tunjangan Profesi Guru	99.756.688.600,00	97.146.070.423,00	2.610.618.177,00
2	Tambahan Penghasilan Guru	1.787.249.450,00	1.403.650.000,00	383.599.450,00
3	Tunjangan Khusus Guru	2.503.568.900,00	287.482.200,00	2.216.086.700,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan	7.643.987.997,00	2.839.943.946,00	4.804.044.051,00
5	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.105.716.000,00	4.653.175.765,00	452.540.235,00
6	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.103.800.000,00	1.009.423.700,00	94.376.300,00
7	Dana Fasilitas Penanaman Modal	427.800.000,00	367.612.060,00	60.187.940,00
8	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	406.770.000,00	340.926.500,00	65.843.500,00
Jumlah		118.735.580.947,00	108.048.284.594,00	10.687.296.353,00

Adapun rincian mutasi penggunaan Dana DAK Non fisik Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

a) **Tunjangan Profesi Guru PNSD**

Sisa Tunjangan Profesi Guru pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.610.618.177,00. Berikut perkembangan saldo sisa tunjangan Profesi Guru PNSD dari tahun ke tahun pada Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 74 Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru

No.	Tahun	Realisasi Penyaluran ke RKUD	Realisasi Pembayaran	Pengembalian	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
1	2010	11.694.415.200,00	11.764.110.700,00	0,00	(69.695.500,00)
2	2011	27.685.533.980,00	27.542.301.400,00	0,00	143.232.580,00
3	2012	49.538.180.580,00	49.006.722.810,00	0,00	531.457.770,00
4	2013	64.711.039.770,00	57.501.575.600,00	0,00	7.209.464.170,00
5	2014	89.572.005.170,00	82.510.141.760,00	41.192.400,00	7.020.671.010,00
6	2015	102.215.322.010,00	88.075.520.700,00	248.534.304,00	13.891.267.006,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Tahun	Realisasi Penyaluran ke RKUD	Realisasi Pembayaran	Pengembalian	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
7	2016	94.253.946.464,00	93.237.421.740,00	32.980.285,00	983.544.439,00
8	2017	86.963.796.585,00	85.086.206.030,00	18.807.170,00	1.858.783.385,00
9	2018	93.173.587.000,00	88.309.157.300,00	0,00	4.864.429.700,00
10	2019	95.585.044.200,00	94.047.384.240,00	0,00	1.537.659.960,00
11	2020	92.572.521.960,00	87.318.826.687,00	0,00	5.253.695.273,00
12	2021	104.497.615.273,00	99.904.970.184,00	10.158.878,00	4.582.486.211,00
13	2022	91.597.659.700,00	83.948.591.100,00	0,00	7.649.068.600,00
14	2023	99.756.688.600,00	97.146.070.423,00	0,00	2.610.618.177,00

b) Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD

Sisa Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp383.599.450,00. Berikut perkembangan saldo Sisa Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 75 Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

No.	Tahun	Realisasi Penyaluran ke RKUD	Realisasi Pembayaran	Pengembalian	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
1	2011	6.329.252.000,00	5.994.752.000,00	0,00	334.500.000,00
2	2012	4.891.500.000,00	4.269.500.000,00	0,00	622.000.000,00
3	2013	4.867.000.000,00	3.519.500.000,00	0,00	1.347.500.000,00
4	2014	3.650.500.000,00	2.608.000.000,00	0,00	1.042.500.000,00
5	2015	2.839.000.000,00	2.673.000.000,00	86.400.000,00	252.400.000,00
6	2016	2.568.400.000,00	2.363.500.000,00	0,00	204.900.000,00
7	2017	2.093.400.000,00	1.440.000.000,00	0,00	653.400.000,00
8	2018	1.452.000.000,00	776.250.000,00	0,00	675.750.000,00
9	2019	1.140.770.000,00	532.250.000,00	0,00	608.520.000,00
10	2020	747.000.000,00	715.500.000,00	0,00	31.500.000,00
11	2021	646.967.000,00	592.000.000,00	2.137.500,00	57.104.500,00
12	2022	1.542.250.000,00	1.503.097.500,00	0,00	39.152.500,00
13	2023	1.787.249.450,00	1.403.650.000,00	0,00	383.599.450,00

c) Tunjangan Khusus Guru

Sisa Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.216.086.700,00. Berikut perkembangan saldo Sisa Tunjangan Khusus Guru dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 76 Sisa Dana Tunjangan Khusus Guru

No.	Tahun	Penyaluran ke RKUD	Realisasi	Sisa Penyaluran
1	s/d 2018	0,00	0,00	3.035.117.400,00
2	2019	1.425.059.000,00	1.185.727.200,00	3.274.449.200,00
3	2020	0,00	262.428.900,00	3.012.020.300,00
4	2021	3.012.020.300,00	238.676.400,00	2.773.343.900,00
5	2022	2.773.343.900,00	269.775.000,00	2.503.568.900,00
6	2023	2.503.568.900,00	287.482.200,00	2.216.086.700,00

Data sebelum tahun 2019 tidak dapat disajikan karena adanya keterbatasan sumber data yang diperlukan.

d) Bantuan Operasional Kesehatan

Sisa Bantuan Operasional Kesehatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 4.804.044.051,00. Berikut perkembangan saldo Sisa bantuan Operasional Kesehatan dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 77 Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan

No.	Tahun	Penyaluran ke RKUD	Realisasi	Sisa Penyaluran
1	2	3	4	5
1	s/d 2018	0,00	0,00	4.999.852.235,00
2	2019	21.521.860.000,00	14.695.933.460,00	6.825.926.540,00
3	2020	29.987.232.540,00	12.442.731.749,00	17.544.500.791,00
4	2021	17.544.500.791,00	11.339.560.465,00	6.204.940.326,00
5	2022	18.803.100.000,00	11.159.112.003,00	7.643.987.997,00
6	2023	7.643.987.997,00	2.839.943.946,00	4.804.044.051,00

Data sebelum tahun 2019 tidak dapat disajikan karena adanya keterbatasan sumber data yang diperlukan.

e) Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Sisa Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada tahun 2023 adalah sebesar Rp452.540.235,00. Berikut perkembangan saldo Sisa Bantuan Operasional Keluarga Berencana dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 78 Sisa Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana

No.	Tahun	Penyaluran ke RKUD TA. 2023	Realisasi	Sisa Penyaluran TA. 2023
1	s/d 2018	0,00	0,00	566.703.170,00
2	2019	2.365.615.000,00	1.534.262.380,00	831.352.620,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Tahun	Penyaluran ke RKUD TA. 2023	Realisasi	Sisa Penyaluran TA. 2023
3	2020	3,136,358,000,00	2.319.579.945,00	816.778.055,00
4	2021	3.432.414.000,00	2.030.804.870,00	1.401.609.130,00
5	2022	3.783.556.000,00	2.361.255.108,00	1.422.300.892,00
6	2023	5.105.716.000,00	4.653.175.765,00	452.540.235,00

Data sebelum tahun 2019 tidak dapat disajikan karena adanya keterbatasan sumber data yang diperlukan.

f) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Sisa Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2023 adalah Rp288.004.356,00

g) Dana Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sisa Dana Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tahun 2023 adalah Rp94.376.300,00

h) Dana Fasilitas Penanaman Modal

Sisa Dana Fasilitas Penanaman Modal pada tahun 2023 adalah Rp60.187.940,00

i) Dana Peningkatan Koperasi dan UKM

Sisa Dana Peningkatan Koperasi dan UKM pada tahun 2023 adalah sebesar Rp65.843.500,00. Berikut perkembangan saldo Sisa Dana Peningkatan Koperasi dan UKM dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 79 Sisa Dana Peningkatan Koperasi dan UKM

No.	Tahun	Pagu Tahun Anggaran	Penyaluran ke RKUD TA. 2023	Realisasi	Sisa Penyaluran TA. 2023
1	s/d 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2019	358.000.000,00	358.000.000,00	327.183.833,00	30.816.167,00
3	2020	417.358.000,00	417.358.000,00	269.932.040,00	147.425.960,00
4	2021	390.304.000,00	390.304.000,00	279.349.149,00	110.954.851,00
5	2022	404.200.000,00	404.200.000,00	331.579.250,00	72.620.750,00
6	2023	406.770.000,00	334.149.250,00	340.926.500,00	65.843.500,00

Data sebelum tahun 2019 tidak dapat disajikan karena adanya keterbatasan sumber data yang diperlukan.

j) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp35.451.013,00 Berikut perkembangan saldo Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 80 Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

No.	Tahun	Pagu Tahun Anggaran	Penyaluran ke RKUD	Realisasi	Sisa Penyaluran
1	s/d 2018	0,00	0,00	0,00	91.617.233,00
2	2019	1.205.909.000,00	1.114.291.767,00	1.132.703.816,00	73.205.184,00
3	2020	417.358.000,00	1.153.072.816,00	1.134.918.819,00	91.359.181,00
4	2021	1.221.514.000,00	1.130.154.819,00	995.732.987,00	225.781.013,00
5	2022	225.781.013,00	0,00	190.330.000,00	35.451.013,00

Data sebelum tahun 2019 tidak dapat disajikan karena adanya keterbatasan sumber data yang diperlukan.

3) Sisa Kas Murni

Sisa Kas Murni Tahun 2023 adalah sebesar Rp811.944.603.935,50 merupakan saldo per 31 Desember 2023 di Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 007.0003.00.003.8 selain saldo terikat yang sudah dijelaskan sebelumnya.

5.3.1.1.2 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

31 Desember 2023

(Rp)

0,00

31 Desember 2022

(Rp)

0,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.1.3 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

31 Desember 2023

(Rp)

0,00

31 Desember 2022

(Rp)

0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.1.4 KAS DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

31 Desember 2023

(Rp)

39.376.080.136,75

31 Desember 2022

(Rp)

65.761.548.698,67

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp39.376.080.136,75 dan Rp65.761.548.698,67 terdiri dari saldo Kas pada RSUD dan PKM yang merupakan UPT Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 81 Kas BLUD

No	Uraian	Saldo Kas BLUD (Rp)		Saldo Kas BOK (Rp)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		Bank	Tunai				(Rp)	%
1	RSUD H. Boejasin	26.082.177.350,31	6.482.848,00	0,00	26.088.660.198,31	55.780.757.755,31	(29.692.097.557,00)	(53,23)
2	RSUD KH. Mansyur	5.065.045.137,47	16.820.484,00	0,00	5.081.865.621,47	2.939.306.449,79	2.142.559.171,68	72,89
3	PKM Angsau	405.619.509,16	0,00	48.574.223,00	454.193.732,16	744.723.112,65	(290.529.380,49)	(39,01)
4	PKM Asam-Asam	251.349.653,49	0,00	114.270.329,00	365.619.982,49	352.385.006,78	13.234.975,71	3,76



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Saldo Kas BLUD (Rp)		Saldo Kas BOK (Rp)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		Bank	Tunai				(Rp)	%
5	PKM Batakan	386.842.749,54	0,00	135.510.841,00	522.353.590,54	429.909.061,42	92.444.529,12	21,50
6	PKM Bati-Bati	459.080.880,96	436.000,00	101.657.109,00	561.173.989,96	656.553.204,40	(95.379.214,44)	(14,53)
7	PKM Bumi Makmur	136.078.359,96	0,00	191.627.739,00	327.706.098,96	307.118.300,35	20.587.798,61	6,70
8	PKM Jorong	120.913.353,31	0,00	240.946.205,00	361.859.558,31	373.222.546,68	(11.362.988,37)	(3,04)
9	PKM Kait-Kait	193.431.893,62	0,00	98.139.914,00	291.571.807,62	143.147.125,19	148.424.682,43	103,69
10	PKM Kintap	697.025.142,01	0,00	25.187.581,00	722.212.723,01	535.390.302,93	186.822.420,08	34,89
11	PKM Kurau	205.083.316,09	0,00	85.225.221,00	290.308.537,09	364.203.200,94	(73.894.663,85)	(20,29)
12	PKM Padang Luas	381.428.022,04	0,00	327.402.857,00	708.830.879,04	315.312.222,20	393.518.656,84	124,80
13	PKM Panyipatan	167.400.142,37	0,00	116.699.948,00	284.100.090,37	539.629.524,25	(255.529.433,88)	(47,35)
14	PKM Pelaihari	22.439.118,33	0,00	559.142.404,00	581.581.522,33	19.650.348,87	561.931.173,46	2.859,65
15	PKM Sungai Cuka	83.303.256,15	0,00	100.666.168,00	183.969.424,15	132.379.770,03	51.589.654,12	38,97
16	PKM Sungai Riam	14.338.133,49	0,00	98.329.776,00	112.667.909,49	156.621.322,03	(43.953.412,54)	(28,06)
17	PKM Tajau Pecah	135.830.725,58	0,00	164.240.489,00	300.071.214,58	217.127.851,01	82.943.363,57	38,20
18	PKM Tambang Ulang	101.841.927,95	0,00	273.350.822,00	375.192.749,95	278.580.051,97	96.612.697,98	34,68
19	PKM Takisung	707.313.440,27	0,00	47.581.578,00	754.895.018,27	1.035.634.920,65	(280.739.902,38)	(27,11)
20	PKM Tanjung Habulu	115.818.811,52	0,00	78.316.333,00	194.135.144,52	104.123.815,43	90.011.329,09	86,45
21	PKM Tirtajaya	202.101.313,67	0,00	291.599.200,00	493.700.513,67	160.714.435,05	332.986.078,62	207,19
22	PKM Durian Bungkok	85.924.749,22	251.000,00	0,00	86.175.749,22	35.535.756,83	50.639.992,39	142,50
23	PKM Bentok Kampung	147.286.063,59	0,00	0,00	147.286.063,59	130.473.833,96	16.812.229,63	12,89
24	Balai Labkes	12.417.035,01	0,00	0,00	12.417.035,01	9.048.779,95	3.368.255,06	37,22
25	PKM Panggung	73.004.982,64	526.000,00	0,00	73.530.982,64	0,00	73.530.982,64	100,00
Jumlah		36.253.095.067,75	24.516.332,00	3.098.468.737,00	39.376.080.136,75	65.761.548.698,67	(26.385.468.561,92)	(40,12)

Saldo Kas BLUD terdiri dari Saldo Kas BLUD dari pendapatan pelayanan BLUD, pendapatan hasil kerjasama dan Dana BOK pada Puskesmas per tanggal 31 Desember 2023. Rincian lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 1.1. Kas di Badan Layanan Umum Daerah.**

5.3.1.1.5 KAS DI DANA BOS

31 Desember 2023

(Rp)

2.484.796.200,81

31 Desember 2022

(Rp)

3.626.594.575,05

Kas di Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.484.796.200,81 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.626.594.575,05. Kas Dana BOS terdiri dari Kas Pengelolaan dana BOS berada pada 49 SMPN, 235 SDN dan BOP PAUD Negeri dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Perhitungan dana BOS Tahun 2023 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 82 Rincian Kas BOS

URAIAN	NILAI
Saldo Awal BOP PAUD	26.509.341,00
Saldo Awal BOP Kesetaraan	21.922.654,00
Saldo Awal Kas BOS SD	2.518.265.185,05
Saldo Awal Kas BOS SMP	1.108.329.390,00
Total Saldo Awal	3.675.026.570,05
Pendapatan BOP PAUD	6.993.640.286,00
Pendapatan BOP Kesetaraan	1.920.877.346,00
Pendapatan BOS SD	29.050.365.312,00
Pendapatan BOS SMP	8.194.144.471,00
Pendapatan Lain-Lain BOS SD	25.432.022,00
Pendapatan Lain-Lain BOS SMP	7.529.614,76
Total Pendapatan	46.191.989.051,76
Belanja BOP PAUD	6.999.369.260,00
Belanja BOP Kesetaraan	1.913.895.021,00
Belanja BOS SD	29.782.025.284,00
Belanja BOS SMP	8.686.929.856,00
Total Belanja	47.382.219.421,00
Saldo akhir BOP PAUD	20.780.367,00
Saldo akhir BOP Kesetaraan	28.904.979,00
Saldo akhir Kas BOS SD	1.812.037.235,05
Saldo akhir Kas BOS SMP	623.073.619,76
TOTAL SALDO AKHIR KAS BOS	2.484.796.200,81

Saldo Awal Kas BOS sebesar Rp3.675.026.570,05 merupakan saldo awal Kas BOS SD dan SMP sebesar Rp3.626.594.575,05 serta Saldo kas BOP PAUD dan BOP Kesetaraan sebelumnya yang terdapat pada Kas Lainnya kemudian di tahun 2023 direklasifikasi ke Rekening Kas BOS sebesar Rp48.431.995,00.

Rincian rekapitulasi Dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran 1.2 dan Lampiran 1.3**.

5.3.1.1.6

KAS LAINNYA

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

0,00

48.431.995,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp48.431.995,00. Kas Lainnya merupakan saldo dari Penyaluran BOP PAUD dan BOP Kesetaraan per 31 Desember 2022 sebesar Rp48.341.995,00 merupakan Bantuan Operasional pada PAUD di Kabupaten Tanah Laut yang dilakukan reklas ke Kas BOS pada tahun 2023.

PIUTANG

Piutang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer Antar Daerah dan Piutang Lainnya. Rincian Piutang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 83 Piutang

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Piutang Pajak	19.797.098.657,28	17.671.672.015,00	2.125.426.642,28	12,03
2	Piutang Retribusi Daerah	1.093.972.500,00	745.347.500,00	348.625.000,00	46,77
3	Piutang Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	486.943.067,00	0,00	486.943.067,00	100,00
4	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	48.790.952.811,12	30.678.546.590,64	18.112.406.220,48	59,04
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	226.152.417.256,00	0,00	226.152.417.256,00	100,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	58.444.898.394,85	50.656.124.065,67	7.788.774.329,18	15,38
7	Piutang Lainnya	678.050.000,00	771.850.000,00	(93.800.000,00)	(12,15)
Jumlah		355.444.332.686,25	100.523.540.171,31	254.920.792.514,94	253,59

Penjelasan atas masing-masing piutang tersebut adalah sebagai berikut.

5.3.1.1.7 PIUTANG PAJAK DAERAH

31 Desember 2023
(Rp)

19.797.098.657,28

31 Desember 2022
(Rp)

17.671.672.015,00

Saldo Piutang Pajak merupakan tagihan pajak daerah yang belum dipungut per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp19.797.098.657,28 dan Rp17.671.672.015,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 84 Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pajak PBB – P2	19.788.393.064,00	17.670.922.015,00	2.117.471.049,00	11,98
2	Pajak Restoran / Rumah Makan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
3	Pajak Reklame	7.955.593,28	0,00	7.955.593,28	100,00
Jumlah		19.797.098.657,28	17.671.672.015,00	2.125.426.642,28	12,03

Dari tabel Piutang Pajak Daerah tersebut dapat dijelaskan:

- 1) Saldo Piutang PBB-P2 selama tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 85 Piutang PBB-P2

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal piutang bruto PBB P2	17.670.922.015,00
Koreksi Saldo awal Piutang PBB	0,00
Penambahan Piutang PBB P2 Th. 2023	3.016.051.115,00
Pengurangan Piutang PBB P2 di tahun 2023	898.580.066,00
Saldo akhir piutang bruto PBB P2	19.788.393.064,00



Penambahan Piutang PBB pada tahun 2023 sebesar Rp3.016.051.115,00 merupakan piutang yang berasal dari total rincian piutang per Nomor Objek Pajak (NOP) pada Aplikasi SmartGov pada Badan Pendapatan Daerah. Daftar Piutang PBB-P2 terdapat pada **Lampiran 2.1**.

- 2) Piutang atas Pajak Restoran/Rumah Makan sebesar Rp750.000,00 merupakan Piutang yang berasal dari penerimaan jasa restoran oleh 2 (dua) penyedia yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah namun belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 antara lain Rumah Makan Kyta sebesar Rp350.000,00 atas ketetapan bulan Desember 2015 dan Rumah Makan Ramona sebesar Rp400.000,00 atas ketetapan bulan Oktober dan November 2015. Piutang Pajak Restoran/Rumah Makan ini termasuk dalam kategori piutang macet karena umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sehingga penyisihan piutang sebesar Rp750.000,00.
- 3) Piutang Pajak Reklame sebesar Rp7.955.593,28 merupakan piutang yang berasal dari 6 wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pembayaran pajak reklame sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Penyisihan pajak reklame adalah sebesar Rp39.777,96 sehingga piutang pajak reklame neto adalah sebesar Rp7.915.815,32.

Daftar Piutang PBB-P2 terdapat pada **Lampiran 2.2**.

Dari piutang tersebut sudah dilakukan penyisihan piutang. Perhitungan Piutang Pajak Neto dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 86 Piutang Pajak Neto

No.	Uraian	Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Piutang Neto
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pajak PBB – P2	19.788.393.064,00	14.419.855.695,08	5.368.537.368,92
2	Pajak Restoran/ Rumah Makan	750.000,00	750.000,00	0,00
3	Pajak Reklame	7.955.593,28	39.777,96	7.915.815,32
Jumlah		19.797.098.657,28	14.420.645.473,04	5.376.453.184,24

5.3.1.1.8 PIUTANG RETRIBUSI

31 Desember 2023

(Rp)

1.093.972.500,00

31 Desember 2022

(Rp)

745.347.500,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah merupakan tagihan atas retribusi daerah yang belum dipungut per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.093.972.500,00 dan Rp745.347.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 87 Piutang Retribusi Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Retribusi Pasar	982.522.000,00	679.577.000,00	302.945.000,00	44,58
2	Piutang Parkir Dinas Perhubungan	61.140.000,00	34.140.000,00	27.000.000,00	79,09
3	Piutang Parkir Dinas operasi, UK dan Perdagangan	31.630.500,00	31.630.500,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
4	Piutang Retribusi Dinas Pariwisata	18.680.000,00	0,00	18.680.000,00	100,00
Jumlah		1.093.972.500,00	745.347.500,00	348.625.000,00	46,77

Piutang Retribusi Pasar

Piutang atas Retribusi Pasar sebesar Rp982.522.000,00 merupakan nilai bruto piutang atas sewa warung, kios/los yang belum dibayar oleh penyewa sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Piutang bruto atas retribusi pasar diketahui sebesar Rp982.522.000,00 dan penyisihan piutang dengan nilai Rp412.761.900,00.

Daftar Piutang Retribusi Pasar terdapat pada **Lampiran 3.1**.

Piutang Retribusi Parkir

Piutang Retribusi Parkir sebesar Rp92.770.500,00 merupakan nilai bruto yang terdiri dari Piutang Retribusi Parkir dari Dinas Perhubungan sebesar Rp61.140.000,00 dan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan sebesar Rp31.630.500,00.

Saldo piutang bruto retribusi parkir dari dua SKPD tersebut telah dilakukan penyisihan piutang dengan nilai Rp34.275.000,00 pada Dinas Perhubungan serta penyisihan piutang dengan nilai Rp31.630.500,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan. Piutang pada Dinas Pariwisata sebesar Rp18.680.000,00 merupakan piutang retribusi pada 3 lokasi rest area yaitu Gunung Kayangan, Mina Tirta dan Area Ground Camping dan telah dilakukan penyisihan sebesar Rp93.400,00.

Aging schedule dan persentase penyisihan sebagai dasar perhitungan penyisihan sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Daftar piutang Retribusi Parkir terdapat pada **Lampiran 3.2, Lampiran 3.3 dan Lampiran 3.4**.

Perhitungan Piutang Retribusi neto dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 88 Piutang Retribusi Neto

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Neto (Rp)
1	Retribusi Pasar	982.522.000,00	412.761.900,00	569.760.100,00
2	Dinas Perhubungan	61.140.000,00	34.275.000,00	26.865.000,00
3	Dinas operasi, UK dan Perdagangan	31.630.500,00	31.630.500,00	0,00
4	Dinas Pariwisata	18.680.000,00	93.400,00	18.586.600,00
Jumlah		1.093.972.500,00	478.760.800,00	615.211.700,00

5.3.1.1.9 PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

31 Desember 2023
(Rp)

486.943.067,00

31 Desember 2022
(Rp)

0,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp486.943.067,00 dan sebesar Rp0,00. Saldo piutang hasil kekayaan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

daerah yang dipisahkan ini merupakan pendapatan dari bagian laba yang dibagikan (dividen) atas penyertaan modal pada PD. Baratala Tuntung Pandang yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 89 Piutang Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	PD. Baratala	486.943.067,00	0,00	486.943.067,00	100,00
Jumlah		486.943.067,00	0,00	486.943.067,00	100,00

Piutang Hasil Kekayaan yang Dipisahkan ini telah dilakukan penyisihan sebesar Rp2.434.715,34 sehingga Piutang Hasil Kekayaan Yang Dipisahkan neto sebesar Rp484.508.351,66.

5.3.1.1.10 PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

31 Desember 2023

(Rp)

48.790.952.811,12

31 Desember 2022

(Rp)

30.678.546.590,64

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp48.790.952.811,12 dan sebesar Rp30.678.546.590,64 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 90 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	292.251.833,12	360.299.547,12	(68.047.714,00)	(18,89)
2	Piutang Tuntutan Perbendaharaan	111.055.000,00	111.055.000,00	0,00	0,00
3	Piutang BLUD	10.219.536.448,00	3.738.127.295,40	6.481.409.152,60	173,39
4	Piutang Sewa Pakai Kapal	1.645.700.000,00	1.740.950.000,00	(95.250.000,00)	(5,47)
5	Piutang Sapi Jantan	310.394.100,00	292.641.600,00	17.752.500,00	6,07
6	Piutang Sapi Betina	2.234.180.000,00	132.800.000,00	2.101.380.000,00	1.582,36
7	Piutang Izin Usaha Pertambangan	952.382.510,00	952.382.510,00	0,00	0,00
8	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya				
	- BPR	33.000.000.000,00	23.248.360.500,00	9.751.639.500,00	41,95
	- Dinas Kesehatan	0,00	23.830.000,00	(23.830.000,00)	(100,00)
	- DPPKBP3A	0,00	269.500,00	(269.500,00)	(100,00)
	-PDAM	25.452.920,00	0,00	25.452.920,00	100,00
9	Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF	0,00	77.830.638,12	(77.830.638,12)	(100,00)
Jumlah		48.790.952.811,12	30.678.546.590,64	18.112.406.220,48	59,04



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

1. Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

31 Desember 2023

(Rp)

292.251.833,12

31 Desember 2022

(Rp)

360.299.547,12

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp292.251.833,12 dan Rp360.299.547,12. Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan saldo dari 6 (enam) orang yang telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas kerugian daerah. Rincian bruto Piutang Tuntutan Ganti Rugi sebagai berikut.

Tabel 91 Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	RHM	28.542.234,00	43.589.948,00	(15.047.714,00)	(34,52)
2	H.JR/IQB	25.683.765,00	28.683.765,00	(3.000.000,00)	(10,46)
3	NASR	55.799.998,85	55.799.998,85	0,00	0,00
4	HJ.AST/PT.RUJ	93.141.441,43	93.141.441,43	0,00	0,00
5	CV.ACG/HJ.NS	6.136.699,84	6.136.699,84	0,00	0,00
6	HJ. S/CV.H	82.947.694,00	82.947.694,00	0,00	0,00
7	MST	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		292.251.833,12	360.299.547,12	(68.047.714,00)	(18,89)

Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ini telah dilakukan penyisihan dengan nilai Rp292.251.833,12. Rincian lebih lanjut dimuat dalam **Lampiran 4.1**.

2. Piutang Tuntutan Perbendaharaan

31 Desember 2023

(Rp)

111.055.000,00

31 Desember 2022

(Rp)

111.055.000,00

Saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp111.055.000,00 dan sebesar Rp111.055.000,00 Saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan saldo dari 2 (dua) orang yang telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas kerugian daerah. Rincian bruto Piutang Tuntutan Perbendaharaan sebagai berikut.

Tabel 92 Rincian Piutang Tuntutan Perbendaharaan

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	KART	111.055.000,00	111.055.000,00	0,00	0,00
Jumlah		111.055.000,00	111.055.000,00	0,00	0,00

Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP) ini telah dilakukan penyisihan dengan nilai Rp111.055.000,00. Rincian lebih lanjut dimuat dalam **Lampiran 4.2**.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

3. Piutang BLUD

31 Desember 2023
(Rp)

10.219.536.448,00

31 Desember 2022
(Rp)

3.738.127.295,40

Piutang BLUD merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Piutang BLUD merupakan piutang negara yang terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan lainnya. Saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp10.219.536.448,00 dan Rp3.738.127.295,40.

Piutang BLUD Bruto dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 93 Piutang BLUD Bruto

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	PKM BATI-BATI	0,00	3.797.100,00	(3.797.100,00)	(100,00)
2	PKM PANYIPATAN	7.611.304,00	1.304,00	7.610.000,00	583.588,96
3	PKM SUNGAI CUKA	128,00	6.698.038,00	(6.697.910,00)	(100,00)
4	PKM KINTAP	3,00	814.305,00	(814.302,00)	(100,00)
5	PKM BATAKAN	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6	PKM DURIAN BUNGKUK	431.100,00	0,00	431.100,00	100,00
7	PKM TAKISUNG	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
8	RSUD KH MANSYUR	0,00	1.688.082,40	(1.688.082,40)	(100,00)
9	RSUD H BOEJASIN	10.211.001.413,00	3.725.125.966,00	6.485.875.447,00	174,11
Jumlah		10.219.536.448,00	3.738.127.295,40	6.481.409.152,60	173,39

Piutang Neto BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 94 Piutang BLUD Neto

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Neto (Rp)
1	PKM BATI-BATI	0,00	0,00	0,00
2	PKM PANYIPATAN	7.611.304,00	38.441,20	7.572.862,80
3	PKM SUNGAI CUKA	128,00	0,64	127,36
4	PKM KINTAP	3,00	0,02	2,98
5	PKM BATAKAN	2.500,00	750,00	1.750,00
6	PKM DURIAN BUNGKUK	431.100,00	2.155,50	428.944,50
7	PKM TAKISUNG	490.000,00	2.450,00	487.550,00
8	RSUD KH MANSYUR	0,00	0,00	0,00
9	RSUD H BOEJASIN	10.211.001.413,00	51.055.007,07	10.159.946.405,93
Jumlah		10.219.536.448,00	51.098.804,42	10.168.437.643,58

Rincian lengkap Piutang BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 4.3**.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4. Piutang Sewa Pakai Kapal

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>1.645.700.000,00</u>	<u>1.740.950.000,00</u>

Piutang Sewa Pakai kapal merupakan piutang atas hasil pengelolaan kapal pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang belum dilunasi. Saldo Piutang Sewa Pakai Kapal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.645.700.000,00 dan Rp1.740.950.000,00 terdiri atas:

Tabel 95 Piutang Sewa Pakai Kapal Bruto

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Perjanjian 30 Desember 2010	28.000.000,00	39.000.000,00	(11.000.000,00)	(28,21)
2	Perjanjian 30 Desember 2011	10.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)
3	Perjanjian 08 Januari 2013	529.500.000,00	550.500.000,00	(21.000.000,00)	(3,81)
4	Perjanjian 01 April 2013	495.500.000,00	547.750.000,00	(52.250.000,00)	(9,54)
5	Perjanjian 01 Juli 2013	582.700.000,00	588.700.000,00	(6.000.000,00)	(1,02)
Jumlah		1.645.700.000,00	1.740.950.000,00	(95.250.000,00)	(5,47)

Piutang Sewa Pakai Kapal Alat Tangkap beserta kelengkapannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.645.700.000,00 merupakan Piutang Sewa Kapal untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Terhadap piutang ini telah dilakukan penyisihan dengan nilai Rp1.645.700.000,00 sebagai berikut.

Tabel 96 Piutang Sewa Pakai Kapal Neto

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Neto (Rp)
1	Perjanjian 30 Desember 2010	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
2	Perjanjian 30 Desember 2011	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3	Perjanjian 08 Januari 2013	529.500.000,00	529.500.000,00	0,00
4	Perjanjian 01 April 2013	495.500.000,00	495.500.000,00	0,00
5	Perjanjian 01 Juli 2013	582.700.000,00	582.700.000,00	0,00
Jumlah		1.645.700.000,00	1.645.700.000,00	0,00

Rincian Piutang Sewa Pakai Kapal pada **Lampiran 4.4**.

5. Piutang Sapi Jantan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>310.394.100,00</u>	<u>292.641.600,00</u>

Saldo Piutang Sapi Jantan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp310.394.100,00 dan Rp292.641.600,00. Piutang Sapi Jantan sebesar Rp310.394.100,00 merupakan nilai bruto atas penjualan sapi jantan yang telah dilakukan penyisihan sebesar piutang yaitu Rp259.814.100,00. Rincian Piutang Sapi Jantan terdapat pada **Lampiran 4.5**.



6. Piutang Sapi Betina

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>2.234.180.000,00</u>	<u>132.800.000,00</u>

Saldo Piutang Sapi Betina per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.234.180.000,00 dan Rp132.800.000,00. Piutang Sapi Betina sebesar Rp2.234.180.000,00 merupakan nilai bruto atas penjualan sapi betina setelah dilakukan verifikasi ke peternak oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah dilakukan penyisihan sebesar Rp76.834.300,00. Rincian Piutang Sapi Betina terdapat pada **Lampiran 4.6**.

7. Piutang Izin Usaha Pertambangan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>952.382.510,00</u>	<u>952.382.510,00</u>

Pada tahun 2020 sebelumnya Piutang Izin Usaha Pertambangan masuk ke dalam rekening Piutang Retribusi, dan pada tahun 2023 direklasifikasi ke rekening Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah.

Dengan adanya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka semua perda pajak dan retribusi yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak boleh dipungut lagi. Salah satunya Peraturan Daerah Retribusi Izin Usaha Pertambangan; Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang retribusi daerah, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 perda – perda yang tidak diatur dalam UU 28 Tahun 2009 tidak boleh dipungut lagi dan dicabut kecuali sisa-sisa piutang tahun sebelumnya;

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 11.b/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 25 Mei 2019 Pemerintah Daerah sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan namun berdasarkan Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 540/390/BMB/DESDM tanggal 22 Januari 2021 menyatakan bahwa Piutang Izin Usaha Pertambangan sebesar Rp1.119.369.010,00 menjadi kewenangan dan tercatat di Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Saldo Piutang Izin Usaha Pertambangan sebesar Rp952.382.510,00 merupakan piutang bruto yang telah dilakukan penyisihan sebesar Rp952.382.510,00. Namun berdasarkan *aging schedule* piutang, diketahui bahwa Piutang Retribusi Izin Usaha Pertambangan umur piutangnya masuk dalam kategori piutang macet karena di atas 3 tahun. Jadi pencatatan netonya Rp0,00 dan sampai saat ini masih dalam proses penagihan.

8. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>33.025.452.920,00</u>	<u>23.272.460.000,00</u>

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp33.025.452.920,00 dan Rp23.272.460.000,00 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 97 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	BPR	33.000.000.000,00	23.248.360.500,00	9.751.639.500,00	41,95
2	Dinas Kesehatan	0,00	23.830.000,00	(23.830.000,00)	(100,00)
3	DPPKBP3A	0,00	269.500,00	(269.500,00)	(100,00)
4	PT.Air Minum Berkah banua	25.452.920,00	0,00	25.452.920,00	100,00
Jumlah		33.025.452.920,00	23.272.460.000,00	9.752.992.920,00	(41,91)

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya sebesar Rp33.025.452.920,00 terdiri dari Pinjaman yang diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut untuk pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat sebesar Rp33.000.000.000,00 dan Piutang Listrik PT. Air Minum Berkah Banua sebesar Rp25.452.920,00. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya neto dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 98 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya Neto

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Neto (Rp)
1	BPR	33.000.000.000,00	14.550.000.000,00	18.450.000.000,00
2	PT. Air Minum Berkah Banua	25.452.920,00	127.264,60	25.325.655,40
Jumlah		33.025.452.920,00	14.550.127.264,60	18.475.325.655,40

Rincian piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya terdapat pada **Lampiran 4.7**.

9. Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>77.830.638,12</u>

Saldo Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp77.830.638,12. Piutang Remunerasi Dana TDF ini merupakan hasil pengelolaan Dana TDF atas dana transfer non tunai yang tersimpan di Bank Indonesia pada Rekening Lain BI TDF TKD Kab Tanah Laut Nomor Rekening 519000452980.

Perhitungan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Neto dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 99 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Neto

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Neto (Rp)
1	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	292.251.833,12	292.251.833,12	0,00
2	Piutang Tuntutan Perbendaharaan	111.055.000,00	111.055.000,00	0,00
3	Piutang BLUD	10.219.536.448,00	51.098.804,42	10.168.437.643,58
4	Piutang Sewa Pakai Kapal	1.645.700.000,00	1.645.700.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Neto (Rp)
5	Piutang Sapi Jantan	310.394.100,00	259.814.100,00	50.580.000,00
6	Piutang Sapi Betina	2.234.180.000,00	76.834.300,00	2.157.345.700,00
7	Piutang Izin Usaha Pertambangan	952.382.510,00	952.382.510,00	0,00
8	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	33.025.452.920,00	14.550.127.264,60	18.475.325.655,40
Jumlah		48.790.952.811,12	17.939.263.812,14	30.851.688.998,98

5.3.1.1.11 PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

226.152.417.256,00

0,00

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan piutang atas Dana Bagi Hasil Provinsi yang belum disalurkan ke Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2023. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp226.152.417.256,00 dan Rp0,00. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

Tabel 100 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	DBH PBB	16.972.083.986,00	0,00	16.972.083.986,00	100,00
2	DBH PPh Ps.21, Ps.25/29	2.471.636.103,00	0,00	2.471.636.103,00	100,00
3	DBH CHT	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DBH SDA Mineral dan Batu Bara	206.150.705.452,00	0,00	206.150.705.452,00	100,00
5	DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi	219.671.645,00	0,00	219.671.645,00	100,00
6	DBH SDA Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DBH SDA Kehutanan	338.320.070,00	0,00	338.320.070,00	100,00
Jumlah		226.152.417.256,00	0,00	226.152.417.256,00	100,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah berasal dari Dana Bagi Hasil Transfer sebesar Rp226.152.411.000,00 yang disalurkan dalam bentuk Treasury Deposit Facilities (TDF) yang masuk rekening TDF Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Bank Indonesia tanggal 2 dan 3 Januari 2024 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-74/WPB.19/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Penyampaian Rekening Koran TDF TKD Pemda di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023. Piutang Transfer Pemerintah Pusat ini tidak dilakukan penyisihan piutang sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual. Daftar Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada **Lampiran 5**.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.1.12 PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH

31 Desember 2023

(Rp)

58.444.898.394,85

31 Desember 2022

(Rp)

50.656.124.065,67

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp58.444.898.394,85 dan Rp50.656.124.065,67. Saldo Piutang Transfer Antar Daerah tersebut merupakan sisa Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan 31 Desember 2023 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai berikut.

Tabel 101 Pergub Bagi Hasil Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	No. Peraturan Gubernur	Nilai Yang Disalurkan (Rp)	Keterangan
1.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Pergub Nomor 101 Tahun 2023	47.272.851.903,22	Triwulan III dan IV Tahun 2023
2	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pergub Nomor 100.3.3.1/010/KUM/2024	4.301.386.146,35	Triwulan IV Tahun 2023
3	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pergub Nomor 100.3.3.1/010/KUM/2024	3.648.325.531,28	Triwulan IV Tahun 2023
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	Pergub Nomor 100.3.3.1/010/KUM/2024	147.726.897,00	Triwulan IV Tahun 2023
5	Pajak Rokok	Pergub Nomor 100.3.3.1/010/KUM/2024	3.074.607.917,00	Triwulan IV Tahun 2023
Jumlah			58.444.898.394,85	

Piutang Transfer Antar Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 102 Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	47.272.851.903,22	47.040.468.111,67	232.383.791,55	0,49
2	Pajak Rokok	3.074.607.917,00	3.390.735.535,00	(316.127.618,00)	(9,32)
3	Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT-AP)	147.726.897,00	224.920.419,00	(77.193.522,00)	(34,32)
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.301.386.146,35	0,00	4.301.386.146,35	100,00
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBnKB)	3.648.325.531,28	0,00	3.648.325.531,28	100,00
Jumlah		58.444.898.394,85	50.656.124.065,67	7.788.774.329,18	15,38

Rincian lengkap daftar Piutang Transfer Antar Daerah pada Lampiran 6. Piutang Transfer Antar Daerah ini tidak dilakukan penyisihan piutang sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrua.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.1.13 PIUTANG LAINNYA

31 Desember 2023
(Rp)

678.050.000,00

31 Desember 2022
(Rp)

771.850.000,00

Saldo Piutang Lainnya merupakan saldo piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran atau Piutang sewa beli kapal per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp678.050.000,00 dan sebesar Rp771.850.000,00 merupakan saldo bruto dari tagihan penjualan angsuran atas kerjasama pemanfaatan kapal dan alat tangkap ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Rincian piutang bruto tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 103 Rincian Piutang Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Piutang Lancar Tagihan Penjualan Angsuran/Sewa Beli Kapal	678.050.000,00	771.850.000,00	(93.800.000,00)	(12,15)
Jumlah		678.050.000,00	771.850.000,00	(93.800.000,00)	(12,15)

Rincian lebih lanjut dimuat dalam **Lampiran 7**.

Saldo bruto tersebut di atas telah dilakukan penyisihan dengan persentase 100% karena umur piutangnya di atas 3 tahun. Penyisihan Piutang Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dengan nilai Rp678.050.000,00. Piutang neto dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 104 Rincian Piutang Neto Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Neto (Rp)
1	Piutang Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	678.050.000,00	678.050.000,00	0,00
Jumlah		678.050.000,00	678.050.000,00	0,00

5.3.1.1.14 PENYISIHAN PIUTANG

31 Desember 2023
(Rp)

33.519.154.800,52

31 Desember 2022
(Rp)

26.067.607.198,26

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp33.519.154.800,52 dan sebesar Rp26.067.607.198,26. Rincian Penyisihan bruto tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 105 Penyisihan Piutang

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	14.420.645.473,04	13.273.843.532,31	1.146.801.940,73	8,64
2	Penyisihan Piutang Retribusi	478.760.800,00	346.088.475,00	132.672.325,00	38,33
3	Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.434.715,34	0,00	2.434.715,34	100,00
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	17.939.263.812,14	11.675.825.190,95	6.263.438.621,19	53,64



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5	Penyisihan Piutang Lain-lain	678.050.000,00	771.850.000,00	(93.800.000,00)	(12,15)
Jumlah		33.519.154.800,52	26.067.607.198,26	7.451.547.602,26	28,59

5.3.1.1.15 BEBAN DIBAYAR DIMUKA

31 Desember 2023
(Rp)

176.227.213,00

31 Desember 2022
(Rp)

0,00

Saldo Beban Dibayar di muka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp176.227.213,00 dan sebesar Rp0,00. Beban dibayar dimuka merupakan kelebihan pembayaran PPh 21 pada 9 (Sembilan) SKPD sebagai berikut.

Tabel 106 Beban Dibayar Dimuka

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Bapenda	32.088.886,00	0,00	32.088.886,00	100,00
2	BPKAD	1.781.232,00	0,00	1.781.232,00	100,00
3	BAPPEDA	21.396.696,00	0,00	21.396.696,00	100,00
4	DUKCAPIL	25.190.682,00	0,00	25.190.682,00	100,00
5	DKPP	8.416.564,00	0,00	8.416.564,00	100,00
6	Dinas Pariwisata	16.935.351,00	0,00	16.935.351,00	100,00
7	DPTSP	27.537.353,00	0,00	27.537.353,00	100,00
8	Inspektorat	12.260.454,00	0,00	12.260.454,00	100,00
9	Setda	30.619.995,00	0,00	30.619.995,00	100,00
Jumlah		176.227.213,00	0,00	176.227.213,00	100,00

5.3.1.1.16 PERSEDIAAN

31 Desember 2023
(Rp)

18.622.756.917,29

31 Desember 2022
(Rp)

22.842.008.750,19

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp18.622.756.917,29 dan Rp22.842.008.750,19. Saldo Persediaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 memiliki sumber penerimaan yang berasal dari APBD sebesar Rp. 11.942.753.105,94, BOS sebesar Rp.763.666.184,38, serta BLUD sebesar Rp. 5.916.337.626,97 dengan total sebesar Rp18.622.756.917,29. Saldo Realisasi Persediaan yang berasal dari APBD per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp503.836.249,66 atau sebesar 4.40% dari tahun sebelumnya. Saldo Realisasi Persediaan yang berasal dari BOS per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp385.609.630,37 atau sebesar 33.55% dari tahun sebelumnya. Saldo Realisasi Persediaan yang berasal dari BLUD per 31 Desember 2023 mengalami



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

penurunan sebesar Rp4.337.478.452,19 atau sebesar 42.30% dari tahun sebelumnya. Untuk rincian masing-masing sumber yang tercatat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 107 Rincian Persediaan pada masing-masing SKPD yang bersumber dari APBD

No.	Nama Unit SKPD dan Sub Unit SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42.322.940,00	37.071.575,00	5.251.365,00	14,17
2	Dinas Kesehatan	9.723.813.443,40	7.019.712.405,08	2.704.101.038,32	38,52
3	RSUD Haji Boejasin	53.823.950,00	221.847.245,00	(168.023.295,00)	(75,74)
4	RSUD K.H. Mansyur	714.215.602,74	1.243.066.164,20	(528.850.561,46)	(42,54)
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	140.480.600,00	206.721.773,00	(66.241.173,00)	(32,04)
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	7.717.000,00	1.023.352.438,00	(1.015.635.438,00)	(99,25)
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	732.500,00	1.026.000,00	(293.500,00)	(28,61)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	450.000,00	142.000,00	308.000,00	216,90
9	Dinas Sosial	31.254.600,00	1.113.713,00	30.140.887,00	2.706,34
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2.739.200,00	1.094.500,00	1.644.700,00	150,27
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.789.690,00	277.254.191,00	(253.464.501,00)	(91,42)
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	81.375.000,00	45.756.200,00	35.618.800,00	77,84
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	520.012.520,00	683.926.700,00	(163.914.180,00)	(23,97)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.580.000,00	4.966.859,00	(2.386.859,00)	(48,06)
15	Dinas Perhubungan	7.775.000,00	35.911.844,00	(28.136.844,00)	(78,35)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.473.000,00	2.256.400,00	(783.400,00)	(34,72)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	403.000,00	464.000,00	(61.000,00)	(13,15)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.826.382,00	2.803.000,00	(976.618,00)	(34,84)
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.257.495,00	0,00	4.257.495,00	0,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	453.600,00	1.338.000,00	(884.400,00)	(66,10)
21	Dinas Pariwisata	2.877.000,00	950.880,00	1.926.120,00	202,56
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	143.429.000,00	265.166.750,00	(121.737.750,00)	(45,91)
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	310.578.790,00	142.147.200,00	168.431.590,00	118,49
24	Sekretariat Daerah	23.574.295,00	13.218.680,00	10.355.615,00	78,34
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7.404.000,00	11.562.000,00	(4.158.000,00)	(35,96)
26	Inspektorat Kabupaten	26.322.644,00	73.676.857,00	(47.354.213,00)	(64,27)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.046.342,00	3.058.000,00	(1.011.658,00)	(33,08)
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.735.500,00	8.289.100,00	1.446.400,00	17,45
29	Badan Pendapatan Daerah	18.102.700,00	14.967.000,00	3.135.700,00	20,95



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama Unit SKPD dan Sub Unit SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.469.000,00	9.280.100,00	(6.811.100,00)	(73,39)
31	Kantor Kecamatan Bajuin	794.700,00	821.000,00	(26.300,00)	(3,20)
32	Kantor Kecamatan Bati- Bati	1.732.500,00	1.657.200,00	75.300,00	4,54
33	Kantor Kecamatan Batu Ampar	1.830.489,00	15.576.355,00	(13.745.866,00)	(88,25)
34	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	7.119.509,00	2.375.000,00	4.744.509,00	199,77
35	Kantor Kecamatan Jorong	13.309.239,00	25.090.640,00	(11.781.401,00)	(46,96)
36	Kantor Kecamatan Kintap	2.057.400,00	4.112.000,00	(2.054.600,00)	(49,97)
37	Kantor Kecamatan Kurau	420.000,00	1.911.100,00	(1.491.100,00)	(78,02)
38	Kantor Kecamatan Pelaihari	729.500,00	654.600,00	74.900,00	11,44
39	Kantor Kelurahan Sarang Halang	898.500,00	1.430.900,00	(532.400,00)	(37,21)
40	Kantor Kelurahan Pabahanan	53.298,80	0,00	53.298,80	0,00
41	Kantor Kelurahan Angsau	1.143.364,00	0,00	1.143.364,00	0,00
42	Kantor Kelurahan Pelaihari	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00
43	Kantor Kelurahan Karang Taruna	227.000,00	445.000,00	(218.000,00)	(48,99)
44	Kantor Kecamatan Panyipatan	0,00	8.407.802,00	(8.407.802,00)	(100,00)
45	Kantor Kecamatan Takisung	1.140.250,00	1.715.800,00	(575.550,00)	(33,54)
46	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	1.396.562,00	3.202.279,00	(1.805.717,00)	(56,39)
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	136.000,00	19.375.606,00	(19.239.606,00)	(99,30)
Jumlah		11.942.753.105,94	11.438.916.856,28	503.836.249,66	4,40

Pembukuan BMD atas persediaan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dicatat dengan menggunakan metode perpetual, artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan. Sedangkan Penilaian persediaan dilakukan dengan metode harga perolehan terakhir, artinya metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.

Tabel 108 Rincian Persediaan Berasal dari dana APBD

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	308.790.150,80	313.135.522,08	(4.345.371,28)	(1,39)
2	Alat Listrik	11.747.959,00	1.015.590.901,00	(1.003.842.942,00)	(98,84)
3	Materai/Benda pos	4.810.000,00	6.290.000,00	(1.480.000,00)	(23,53)
4	Perabot Kantor	88.950.106,00	269.770.304,00	(180.820.198,00)	(67,03)
5	Natura	0,00	40.020.000,00	(40.020.000,00)	(100,00)
6	Barang Hibah	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
7	Bahan Komputer	491.794.493,00	736.335.522,00	(244.541.029,00)	(33,21)
8	Bibit Ternak / Bibit Tanaman	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)	(100,00)
9	Alat Kesehatan Habis Pakai	0,00	2.913.315.258,75	(2.913.315.258,75)	(100,00)
10	Bahan Obat-Obatan	4.925.944.850,06	5.172.506.341,45	(246.561.491,39)	(4,77)
11	Bahan Kimia	1.583.442.628,00	796.203.126,00	787.239.502,00	98,87
12	Suku Cadang	2.089.400,00	2.374.400,00	(285.000,00)	(12,00)
13	Kertas dan Cover	88.959.009,00	100.162.487,00	(11.203.478,00)	(11,19)
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	66.455.000,00	39.712.994,00	26.742.006,00	67,34
15	Bahan lainnya	4.261.468.510,08	0,00	4.261.468.510,08	0,00
16	Persediaan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat	26.926.000,00	0,00	26.926.000,00	0,00
17	Persediaan untuk tujuan strategis	81.375.000,00	0,00	81.375.000,00	0,00
Jumlah		11.942.753.105,94	11.438.916.856,28	503.836.249,66	4,40

Pada persediaan barang pakai habis sesuai dengan tabel di atas terdapat beberapa *item* barang persediaan yang mengalami kenaikan dan penurunan sesuai stock opname yang ada di SKPD antara lain sebagai berikut.

- 1) Persediaan Alat Tulis Kantor untuk tahun 2023 sebesar Rp308.790.150,80, untuk total stock opname persediaan Alat Tulis Kantor pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp Rp313.135.522,08, terjadi penurunan sebesar Rp4.345.371,28 atau sebesar 1,39%. Hal ini disebabkan adanya perubahan kode rekening kertas yang tidak masuk Alat Tulis Kantor lagi melainkan kertas dan cover;
- 2) Persediaan Alat listrik sebesar Rp11.747.959,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.015.590.901,00 sehingga ada penurunan sebesar Rp1.003.842.942,00 atau 98,84% yang disebabkan pada DPRKPLH tidak ada persediaan alat listrik pada tahun 2023, dimana PJU beralih ke Dinas Perhubungan pada 2024;
- 3) Persediaan Materai/Benda Pos sebesar Rp4.810.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.290.000,00 sehingga ada penurunan sebesar Rp1.480.000,00 atau 23,52% persediaan terbesar terdapat pada BPKAD sebesar Rp1.800.000,00 ;
- 4) Persediaan Perabot kantor sebesar Rp88.950.106,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp269.770.304,00 sehingga ada penurunan sebesar Rp180.820.198,00 atau 67,03 % persediaan terbesar terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.19.040.000,00 ;
- 5) Persediaan Natura tidak ada atau sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.020.000,00 sehingga ada penurunan sebesar Rp40.020.000,00 atau 100% ;
- 6) Persediaan barang Hibah tidak ada atau sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.000.000,00 sehingga ada penurunan sebesar Rp24.000.000,00 atau 100% ;



- 7) Persediaan Bahan Komputer sebesar Rp491.794.493,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp736.335.522,00 sehingga ada penurunan sebesar Rp244.541.029,00 atau 33,21% persediaan terbesar terdapat pada Disdukpencahil sebesar Rp.301.114.000,00;
- 8) Persediaan Bibit Ternak/Bibit Tanaman tidak ada atau sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.500.000,00 sehingga ada penurunan sebesar Rp9.500.000,00 atau 100%;
- 9) Persediaan Alat Kesehatan habis pakai tidak ada atau sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.913.315.258,75 sehingga ada penurunan sebesar Rp2.913.315.258,75 atau 100%;
- 10) Persediaan Bahan Obat-Obatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan, RSUD H.Boejasin, RSUD K. H. Mansyur dan Disnakeswan dengan total barang persediaan Rp4.925.944.850,06 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.172.506.341,45 sehingga ada penurunan sebesar Rp246.561.491,39 atau 4,77%. Hal ini dikarenakan untuk tahun 2023 barang obat-obat antara APBD dan BLUD sudah dipisah berdasarkan sumber penerimaannya masing – masing;
- 11) Persediaan Bahan Kimia pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.583.442.628,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp796.203.126,00, terjadi kenaikan sebesar Rp787.239.502,00 atau 98,87%. Bahan kimia yang paling tinggi terdapat pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan sebesar Rp891.608.236,00;
- 12) Persediaan Suku Cadang yang terdapat pada DP2KBP3A dengan total barang persediaan Suku Cadang sebesar Rp2.089.400,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.374.400,00 sehingga ada penurunan sebesar Rp285.000,00 atau 12%;
- 13) Persediaan Kertas dan cover sebesar Rp88.959.009,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100.162.487,00 sehingga ada penurunan sebesar Rp11.203.478,00 atau 11,19% persediaan terbesar terdapat pada Disdukpencahil dan Badan Pendapatan berupa kertas blanko;
- 14) Persediaan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp66.455.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 39.712.994,00 sehingga ada kenaikan sebesar Rp26.742.006,00 atau 67,34% persediaan terbesar terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.47.739.000,00;
- 15) Persediaan bahan lainnya sebesar Rp4.261.468.510,08 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada atau sebesar Rp0,00 sehingga ada kenaikan sebesar Rp4.261.468.510,08 atau 0% persediaan ini hanya terdapat pada Instalasi Farmasi, Puskesmas dan RSUD;
- 16) Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp26.926.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada atau sebesar Rp0,00 sehingga ada kenaikan sebesar Rp26.926.000,00 atau 0% persediaan ini hanya terdapat pada Dinas Sosial;
- 17) Persediaan untuk tujuan strategis sebesar Rp81.375.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada atau sebesar Rp0,00 sehingga ada kenaikan sebesar Rp81.375.000,00 atau 0% persediaan ini hanya ada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berupa cadangan pangan;

Daftar Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

Persediaan Farmasi *Recall*

Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan memiliki Persediaan Farmasi *Recall* sebesar Rp144.184.089,00.

Persediaan Farmasi *Expired Date*

RSUD Hadji Boejasin mempunyai Persediaan Farmasi yang *Expired Date* dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dari data Instalasi Farmasi RSUD Hadji Boejasin sebesar Rp630.036.546,52 Sedangkan tahun 2023 Persediaan Farmasi yang *Expired Date* RSUD Hadji Boejasin sebesar Rp43.978.492,97.

RSUD KH. Mansyur mempunyai Persediaan Farmasi yang *Expired Date* dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dari data Instalasi Farmasi RSUD KH. Mansyur sebesar Rp93.587.662,31 Sedangkan tahun 2023 Persediaan Farmasi yang *Expired Date* RSUD KH. Mansyur sebesar Rp70.989.514,80.

Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan mempunyai Persediaan Farmasi yang *Expired Date* dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp2.347.560.997,00 Sedangkan tahun 2023 Persediaan Farmasi yang *Expired Date* Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan sebesar Rp710.817.338,00.

Alat Tulis Kantor Usang

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2023 mempunyai alat tulis kantor usang sebesar Rp9.514.300,00 yang masih berupa usulan dan belum dilakukan pemusnahan /penghapusan tetapi sudah dikeluarkan dari persediaan dan berada pada pos usulan penghapusan persediaan.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen.

5.3.1.2.1 INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA

31 Desember 2023

(Rp)

35.500.000,00

31 Desember 2022

(Rp)

1.856.677.500,00

Saldo Investasi Non Permanen Neto per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 35.500.000,00 dan Rp1.856.677.000,00 sebagai berikut.

Tabel 109 Investasi Non Permanen Lainnya Bruto

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penggaduhan Ternak Sapi (Bruto)	2.003.632.500,00	4.409.992.500,00	(2.406.360.000,00)	(54,57)
	Penyisihan Penggaduhan Ternak Sapi	(1.968.132.500,00)	(2.553.315.000,00)	585.182.500,00	(22,92)
	Penggaduhan Ternak Sapi (Neto)	35.500.000,00	1.856.677.500,00	(1.821.177.500,00)	(98,09)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
2	Pengelolaan Kapal kepada Nelayan (Bruto)	13.336.512.216,00	13.336.512.216,00	0,00	0,00
	Penyisihan Pengelolaan Kapal kepada Nelayan	(13.336.512.216,00)	(13.336.512.216,00)	0,00	0,00
	Pengelolaan Kapal kepada Nelayan (Neto)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Investasi Non Permanen (Neto)		35.500.000,00	1.856.677.500,00	(1.821.177.500,00)	(98,09)

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.340.144.716,00 tersebut merupakan nilai bruto yang telah dilakukan penyisihan pada penggaduhan ternak sapi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.968.132.500,00 dan pengelolaan kapal pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp13.336.512.216,00. Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Investasi Non Permanen disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp35.500.000,00 untuk Penggaduhan Ternak Sapi dan Pengelolaan Kapal Nelayan sebesar Rp0,00. Penyisihan Investasi Non Permanen telah dilakukan penyisihan sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

Rincian investasi non permanen per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Penggaduhan Ternak Sapi

Merupakan nilai perguliran yang belum lunas pada pengelolaan ternak sapi betina sebesar Rp1.961.032.500,00 dan sapi jantan dengan nilai bruto sebesar Rp42.600.000,00 dan telah dilakukan penyisihan investasi non permanen sebesar Rp1.947.532.500,00 untuk sapi betina dan Rp20.600.000,00 untuk sapi jantan sehingga diperoleh nilai bersih yang direalisasikan sebesar Rp35.500.000,00 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lampiran Data *Aging Schedule* sapi terdapat pada **Lampiran 9.1 dan Lampiran 9.2**.

2) Pengelolaan Kapal kepada Nelayan

Merupakan nilai aset Kapal 10 GT beserta alat tangkap dan kelengkapannya berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Nelayan pada Tanggal 03 Januari 2011, 02 Januari 2012 dan 08 Januari 2013. Perjanjian ini telah berakhir pada tahun 2019 dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Ketiga atas Perubahan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut disebutkan bahwa jika perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan nelayan berakhir, maka aset kapal tersebut akan dicatat sebagai aset lain-lain. Nilai investasi kapal dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut.

Tabel 110 Nilai Investasi Kapal

No.	Uraian	Nilai Investasi (Rp)
1.	Kapal 10 GT Tahun 2010	3.843.839.426,00
2.	Kapal 10 GT Tahun 2011	4.952.080.000,00
3.	Kapal 10 GT Tahun 2012	4.540.592.790,00
Jumlah		13.336.512.216,00

Kapal Ukuran 2,6 GT beserta alat tangkapnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang dipinjam pakaikan ke nelayan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor 590 Tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pengelolaan Kapal dan Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Nelayan pada Tanggal 25 Juni 2010 telah



dihapuskan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/756-KUM/2014 tanggal 24 Desember 2014. Untuk data pengelolaan kapal kepada nelayan pada **Lampiran 9.3**.

5.3.1.2.2 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
170.343.210.534,27	144.405.364.828,06

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 170.343.210.534,27 dan Rp144.405.364.828,06 terdiri atas:

Tabel 111 Saldo Penyertaan Modal

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Bank Kalsel	138.693.146.928,00	110.374.250.000,00	28.318.896.928,00	25,66
2	PT. Air Minum Berkah Benua Kabupaten Tanah Laut	22.641.470.081,31	25.101.136.078,23	(2.459.665.996,92)	(9,80)
3	PT.BPR Tanah Laut	5.715.771.247,96	5.477.300.435,83	238.470.812,13	4,35
4	PD Baratata Tuntung Pandang	3.292.822.277,00	3.452.678.314,00	(159.856.037,00)	(4,63)
Jumlah		170.343.210.534,27	144.405.364.828,06	25.937.845.706,21	17,96

1) Bank Kalsel

Saldo penyertaan modal kepada Bank Kalsel per 31 Desember 2023 sebesar Rp138.693.146.928,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 6,36% dan penyajian penyertaan modalnya menggunakan metode biaya sama seperti tahun 2022. Penambahan Penyertaan Modal ke Bank Kalsel sebesar Rp28.318.896.928,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tanggal 30 September 2022 tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

2) PT. Air Minum Berkah Banua Kabupaten Tanah Laut

PT. Air Minum Berkah Banua sebelumnya adalah Perusahaan Daerah dengan nama PDAM Tanah Laut yang kemudian disahkan menjadi PT. Air Minum Berkah Banua dengan Salinan Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 8 Februari 2023.

Saldo penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.641.470.081,31 dengan persentase kepemilikan sebesar 87,31% dan penyajian penyertaan modalnya menggunakan metode ekuitas. Nilai penyertaan modal sebesar Rp22.641.470.081,31 ini merupakan bagian 87,31% dari total Ekuitas dalam Neraca PT. Air Minum Berkah Banua Kabupaten Tanah Laut Audited 2023 sebesar Rp25.962.275.892,00. Data dukung pada **Lampiran 10.1**.

3) PT. BPR Tanah Laut

Saldo penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.715.771.247,96 dengan persentase kepemilikan sebesar 75,41% dan penyajian penyertaan modalnya



menggunakan metode ekuitas. Saldo tersebut merupakan 75,41% dari total Ekuitas dalam Neraca PT. BPR Tanah Laut *Unaudited* 2023 sebesar Rp7.579.593.221,00. Data dukung pada **Lampiran 10.2**.

4) PD. Baratala Tuntung Pandang

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 06 tentang akuntansi penyertaan modal, Nilai 0 (Nol) tersebut dicatat Laporan Keuangan PD. Baratala Tahun 2022 bernilai negatif berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* tahun 2022. Secara administratif Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak menyetorkan penyertaan modal secara tunai, namun secara substansi Perusahaan Daerah tersebut dalam penguasaan penuh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sehingga penyajian penyertaan modalnya menggunakan metode ekuitas. Penggunaan metode ekuitas dimulai tahun 2012 sehingga laba pada tahun 2011 dianggap sebagai akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah per 31 desember 2011 sebesar Rp1.432.857.977,19 sementara dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2005 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut pada pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa Modal Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Pada tahun 2023 PD. Baratala Tuntung Pandang memberikan bagian laba ke Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp150.000.000,00. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp3.292.822.277,00 merupakan nilai Ekuitas dalam Neraca PD. Baratala Tuntung Pandang *Audited* 2023 dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar 100%. Data dukung pada **Lampiran 10.3**.

5.3.1.3 ASET TETAP

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
3.903.535.271.837,80	3.562.874.935.230,64

Saldo Aset Tetap Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.903.535.271.837,80 dan tahun 2022 sebesar Rp3.562.874.935.230,64 terdiri atas:

Tabel 112 Rincian Saldo Aset Tetap

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1.	Tanah	837.303.413.931,62	836.235.257.191,35	1.068.156.740,27	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	768.110.353.539,06	656.530.372.042,31	111.579.981.496,75	0,17
3.	Gedung dan Bangunan	1.492.231.760.740,50	1.329.095.131.735,75	163.136.629.004,75	0,12
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.856.866.485.609,42	2.533.893.026.483,34	322.973.459.126,08	0,13
5.	Aset Tetap Lainnya	4.861.045.479,00	4.830.380.283,00	30.665.196,00	0,01
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.105.053.206,40	16.586.988.476,40	3.518.064.730,00	0,21



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
7.	Akumulasi Penyusutan	2.075.942.840.668,20	1.814.296.220.981,51	261.646.619.686,69	0,14
	Jumlah	3.903.535.271.837,80	3.562.874.935.230,64	340.660.336.607,16	0,10

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut.

5.3.1.3.1

TANAH

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

837.303.413.931,62

836.235.257.191,35

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp837.303.413.931,62 dan Rp836.235.257.191,35. Realisasi Tanah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.068.156.740,27 atau sebesar 0,13% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 113 Rincian Tanah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	836.235.257.191,35	808.616.413.726,52	27.618.843.464,83	3,42
2	Penambahan:				
	- Belanja Modal	1.612.744.454,00	240.492.000,00	1.372.252.454,00	570,60
	- Penilaian:	0,00	27.683.634.600,00	(27.683.634.600,00)	(100,00)
	- Mutasi Unit Kerja	13.592.694.664,40	48.741.833.876,00	(35.149.139.211,60)	(72,11)
	- Reklasifikasi	12.490.000,00	116.782.690,00	(104.292.690,00)	(89,30)
	- Hibah dan Koreksi Tambah Aset	835.937.500,00	328.000.000,00	507.937.500,00	154,86
	Pengurangan:				
	- Mutasi Unit Kerja	13.592.694.664,40	48.741.833.876,00	(35.149.139.211,60)	(72,11)
	- Reklasifikasi	505.928.841,00	12.490.000,00	493.438.841,00	3.950,67
	- Penghapusan	887.086.372,73	604.965.825,17	282.120.547,56	46,63
	- Koreksi Kurang Aset Tetap	0,00	132.610.000,00	(132.610.000,00)	(100,00)
	Jumlah	837.303.413.931,62	836.235.257.191,35	1.068.156.740,27	0,13

Penambahan aset tetap Tanah pada tahun 2023 salah satunya berasal dari belanja modal sebesar Rp1.612.744.454,00 terdapat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan berupa biaya ganti rugi tanah jalan pabrik karet dan belanja *land clearing* pabrik karet sebesar Rp265.582.000,00, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berupa biaya konsultan appraisal pengadaan lahan olahraga Kecamatan Jorong sebesar Rp315.641.841,00, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa biaya pengurukan tanah pasar hewan sebesar Rp167.382.000,00, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan berupa biaya konsultan appraisal pengadaan tanah untuk Kantor Kelurahan Pabahanan sebesar Rp90.750.000,00, biaya konsultan appraisal pembebasan lahan jalan Desa Tebing Siring sebesar Rp99.537.000,00,



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

pengadaan tanah waduk Takisung 1 Desa Banua Tengah Kecamatan Takisung dengan total sebesar Rp335.387.613,00, dan pembebasan lahan untuk pembuatan reservoir Desa Tabanio Kecamatan Takisung sebesar Rp299.510.000,00, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa belanja penyertifikatan tanah sebesar Rp38.954.000,00.

Saldo Tanah tersebut termasuk tanah yang bersertifikat, belum proses sertifikat, proses pembuatan sertifikat dan sertifikat yang belum ditemukan senilai Rp837.303.413.931,62 yang berasal dari pembelian dan hibah saat otonomi daerah maupun hibah dari pihak ketiga lainnya. Tanah yang sudah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat senilai Rp633.795.865.175,43 yang di atasnya berdiri bangunan Perkantoran, Puskesmas, tanah SD, tanah SMP maupun lahan kosong yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Tanah yang bukti kepemilikan sertifikatnya dalam proses pembuatan sertifikat tanah senilai Rp1.051.917.620,00 yang di atasnya berdiri bangunan Puskesmas, tanah SD, SMP maupun lahan kosong yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Tanah yang bukti kepemilikan sertifikatnya belum diproses pembuatan sertifikatnya senilai Rp202.439.621.136,19 termasuk di dalamnya tanah untuk bangunan pemerintah, tanah untuk jalan serta tanah yang berasal dari proses ganti rugi. Tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang sertifikatnya belum ditemukan senilai Rp16.010.000,00.

Penambahan aset tetap tanah pada tahun 2023 yang berasal dari hibah masuk sebesar Rp835.937.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 114 Rincian Penambahan Aset Tetap Tanah

No	SKPD	No BAST	Pemberi Hibah	Nilai	Jumlah Persil
1	Kecamatan Pelaihari	000.2.3.2/02/BAST/BPKAD/2023	Gusti Rizal Wardhana Putra, ST (PT. Puri Aman Bersaudara)	240.000.000,00	1
2	Kecamatan Pelaihari	000.2.3.2/04/BAST/BPKAD/2023	Muhammad dan Kurniawati (Warga Jalan Taqwa Kelurahan Pelaihari)	72.000.000,00	1
3	Kecamatan Pelaihari	000.2.3.2/05/BAST/BPKAD/2023	H. Hamdie Effendi (Warga Jalan Pintu Air Kelurahan Pelaihari)	141.000.000,00	1
4	Kecamatan Pelaihari	000.2.3.2/06/BAST/BPKAD/2023	H. Hamdie Effendi (Warga Jalan Pintu Air Kelurahan Pelaihari)	87.000.000,00	1
5	Kecamatan Pelaihari	000.2.3.2/07/BAST/BPKAD/2023	Sohyar (Warga Jalan Majakeling Kelurahan Pelaihari)	75.937.500,00	1
6	Dinas Kesehatan	000.2.3.2/10/BAST/BPKAD/2023	Tan Selamat (Warga Desa Sungai Rasau Kec. Bumi Makmur)	15.000.000,00	1
7	Kecamatan Pelaihari	000.2.3.2/11/BAST/BPKAD/2023	Sugianto (Warga Jalan Limau Gulung Kelurahan Pabahanan)	45.000.000,00	1
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	000.2.3.2/12/BAST/BPKAD/2023	Suardana Pelangi (Warga Jalan Swadaya Desa Padang Luas Kec. Kurau)	100.000.000,00	1
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	000.2.3.2/13/BAST/BPKAD/2023	Sutiman (Warga Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar)	60.000.000,00	1
Jumlah				835.937.500,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Mutasi unit kerja tanah pada tahun 2023 sebesar Rp13.592.694.664,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 115 Rincian Mutasi Unit Kerja Tanah

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai
1	Dinas Peternakan	Kecamatan Pelaihari	70.320.000,00
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	220.720.000,00
3	Kecamatan Pelaihari	Dinas Kesehatan	107.200.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	600.000,00
		Kecamatan Kintap	190.000,00
		Dinas Perhubungan	13.193.664.664,40
Jumlah			13.592.694.664,40

Reklasifikasi tambah pada aset tetap berupa tanah sebesar Rp12.490.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 116 Rincian Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Tanah

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tanah	12.490.000,00
Jumlah				12.490.000,00

Reklasifikasi kurang pada aset tetap berupa tanah sebesar Rp505.928.841,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 117 Rincian Reklasifikasi Kurang Aset Tetap Tanah

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	Tanah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	190.287.000,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tanah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	315.641.841,00
Jumlah				505.928.841,00

Pengurangan aset tetap Tanah pada tahun 2023 diantaranya berupa penghapusan sebesar Rp887.086.372,73 karena pemindah tanganan dalam bentuk hibah pada 3 (tiga) SKPD yaitu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp66.791.240,00, Kecamatan Kintap sebesar Rp15.722.251,47, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp804.572.881,26 dengan rincian SK Penghapusan sebagai berikut.

- 000.2.4/48-BPKAD/2023 tanggal 22 November 2023 senilai Rp66.791.240,00 dikarenakan hibah ke Pemerintah Desa Muara Kintap pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 000.2.4/ 32-BPKAD/2023 tanggal 5 Oktober 2023 senilai Rp15.056.397,99 dikarenakan hibah kepada MTsN 6 Tanah Laut Kab. Tanah Laut pada Kecamatan Kintap;
- 000.2.4/ 47-BPKAD/2023 tanggal 22 November 2023 senilai Rp665.853,48 dikarenakan hibah kepada Kementerian Agama Kab. Tanah Laut pada Kecamatan Kintap;



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4. 000.2.4/ 48-BPKAD/2023 tanggal 22 November 2023 senilai Rp804.572.881,26 dikarenakan hibah kepada Pemerintah Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang.

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Tanah terdapat dalam **Lampiran 11.**

5.3.1.3.2 PERALATAN DAN MESIN

31 Desember 2023

(Rp)

768.110.353.539,06

31 Desember 2022

(Rp)

656.530.372.042,31

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp768.110.353.539,06 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp656.530.372.042,31. Realisasi peralatan dan mesin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp111.554.118.496,55 atau sebesar 16,99% dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 118 Rincian Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Saldo Awal	656.530.372.042,31	570.096.134.486,47	86.434.237.555,84	15,16
2	Penambahan :				
	- Belanja Modal	118.702.153.452,00	91.151.091.039,00	27.551.062.413,00	30,23
	- Atribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Mutasi Unit Kerja	14.833.480.932,02	10.495.120.861,75	4.338.360.070,27	41,34
	- Reklasifikasi	573.013.700,00	394.522.900,00	178.490.800,00	45,24
	- Hibah dan Koreksi Tambah Aset	773.884.008,00	2.609.225.206,00	(1.835.341.198,00)	(70,34)
3	Pengurangan :				
	- Ekstrakomptabel	229.071.477,00	197.265.470,00	31.806.007,00	16,12
	- Mutasi Unit Kerja	14.833.480.932,02	10.495.120.861,75	4.338.360.070,27	41,34
	- Reklasifikasi	3.815.265.062,00	1.359.755.110,00	2.455.509.952,00	180,58
	- Penghapusan	4.280.054.687,25	5.688.077.361,16	(1.408.022.673,91)	(24,75)
	- Koreksi Kurang Aset Tetap	144.678.437,00	475.503.648,00	(330.825.211,00)	(69,57)
	Jumlah	768.110.353.539,06	656.530.372.042,31	111.579.981.496,75	17,00

Penambahan pada aset tetap peralatan dan mesin diantaranya yaitu belanja modal sebesar Rp118.702.153.452,00 dan hibah masuk pada tahun 2023 sebesar Rp773.884.008,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 119 Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	SKPD	No BAST	Pemberi Hibah	Nilai
1	Kecamatan Kintap	000.2.3.2/14/BAST/BPKAD/2023	Prigerhani (PT. Arutmin Indonesia)	19.786.850,00
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6156/NPHD/2022	Rohani Br Tohang, S.E., M.Si (Perpustakaan Nasional RI)	30.217.158,00
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4258/C4/DM.01.02/2021	Drs. Mulyatsah, M.M (Direktur SMP, Ditjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian)	723.880.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	No BAST	Pemberi Hibah	Nilai
			Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI)	
Jumlah				773.884.008,00

Penambahan berupa mutasi unit kerja peralatan dan mesin pada Tahun 2023 sebesar Rp14.805.220.332,02 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 120 Rincian Penambahan Mutasi Unit Kerja Peralatan dan Mesin

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	683.072.900,00
		Kecamatan Pelaihari	8.158.500,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	16.372.500,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.990.000,00
		Sekretariat Daerah	285.991.500,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Pariwisata	14.910.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.250.000,00
3.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	139.250.000,00
	Dinas Sosial	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	269.500.000,00
4.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	189.668.750,00
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	207.804.250,00
6.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	30.000.000,00
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	545.000.000,00
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	710.429.000,00
9.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35.000.000,00
10.	Dinas Pariwisata	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	175.918.332,00
11.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Komunikasi dan Informatika	267.800.000,00
12.	Sekretariat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	31.289.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	514.019.250,00
		Dinas Perhubungan	113.000.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	7.361.541,00
13.	Kecamatan Pelaihari	Dinas Kesehatan	3.989.200,00
14.	Kecamatan Kurau	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	249.587.142,86
15.	Kecamatan Bumi Makmur	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	122.210.000,00
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	46.780.873,00
		Dinas Sosial	12.050.000,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	19.598.260,83
		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	17.800.000,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai
		Dinas Kesehatan	23.400.000,00
17.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	644.600.000,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	375.700.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	375.700.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	672.032.000,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	375.700.000,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	367.100.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	401.550.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	501.416.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	375.700.000,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	367.100.000,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	293.370.000,00
		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	375.700.000,00
		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	459.800.000,00
		Inspektorat	375.700.000,00
		Kecamatan Kurau	277.500.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	367.100.000,00
		Sekretariat Daerah	2.284.800.000,00
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	375.700.000,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	175.918.332,00	
	Dinas Pariwisata	139.250.000,00	
18.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	451.783.000,33
Jumlah			14.805.220.332,02

Penambahan berupa reklasifikasi tambah pada aset tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp573.013.700,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 121 Rincian Penambahan Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Gedung dan Bangunan	Peralatan Mesin	348.773.100,00
2	Dinas Kesehatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Peralatan Mesin	89.475.100,00
		Aset Tidak Berwujud	Peralatan Mesin	44.477.500,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	Belanja Barang dan Jasa	Peralatan Mesin	26.418.000,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belanja Barang dan Jasa	Peralatan Mesin	10.870.000,00
5	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Belanja Barang dan Jasa	Peralatan Mesin	53.000.000,00
Jumlah				573.013.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2023 diantaranya penghapusan sebesar Rp4.280.054.687,25 dimana penghapusan ini terdapat 20 SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 122 Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	No. SK	Tanggal SK	Nilai Penghapusan (Rp.)	Sebab Penghapusan
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	000.2.4/ 27-BPKAD/2023	2 Oktober 2023	15.563.470,00	Pemindahtanganan
		000.2.4/28-BPKAD/2023	2 Oktober 2023	14.946.166,67	
		000.2.4/ 29-BPKAD/2023	2 Oktober 2023	14.946.166,67	
		000.2.4/ 01-BPKAD/2023	6 Maret 2023	14.981.923,00	Sebab Lain (Kecurian)
2.	Badan Pendapatan Daerah	000.2.4/ 04-BPKAD/2023	25 Mei 2023	42.965.434,00	Pemusnahan
		000.2.4/77-BPKAD/2023	29 Desember 2023	106.659.039,00	
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	000.2.4/09-BPKAD/2023	12 Juli 2023	211.724.203,24	Pemusnahan
		000.2.4/72-BPKAD/2023	29 Desember 2023	264.086.766,68	
4.	Dinas Pariwisata	000.2.4/ 18-BPKAD/2023	31 Juli 2023	32.268.235,12	Pemusnahan
		000.2.4/ 78-BPKAD/2023	29 Desember 2023	79.731.945,00	
5.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	000.2.4/21-BPKAD/2023	1 Agustus 2023	83.005.000,00	Pemusnahan
6.	Sekretariat Daerah	188.45/ 744-KUM/2023	27 April 2023	14.000.000,00	Pemindahtanganan
		188.45/ 1149-KUM/2023	29 September 2023	179.960.000,00	
		188.45/ 1395-KUM/2023	4 Desember 2023	666.584.600,00	
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	000.2.4/80-BPKAD/2023	29 Desember 2023	99.061.258,92	Pemusnahan
		000.2.4/49-BPKAD/2023	22 November 2023	610.429.000,00	Pemindahtanganan
		188.45/ 746-KUM/2023	27 April 2023	122.210.000,00	
		188.45/ 745-KUM/2023	27 April 2023	30.000.000,00	
		188.45/1141-KUM/2023	27 September 2023	319.000.000,00	
		188.45/ 1135-KUM/2023	21 September 2023	14.843.373,00	
		188.45/1455-KUM/2023	18 Desember 2023	14.843.373,00	
8.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	000.2.4/73-BPKAD/2023	29 Desember 2023	75.757.259,79	Pemusnahan
9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	000.2.4/81-BPKAD/2023	29 Desember 2023	167.752.292,00	Pemusnahan
		000.2.4/23-BPKAD/2023	11 September 2023	64.869.588,00	Pemindahtanganan
10.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	000.2.4/76-BPKAD/2023	29 Desember 2023	80.427.405,00	Pemusnahan
11.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	000.2.4/74-BPKAD/2023	29 Desember 2023	144.690.289,87	Pemusnahan
12.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	000.2.4/79-BPKAD/2023	29 Desember 2023	222.251.501,00	Pemusnahan
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	000.2.4/22-BPKAD/2023	1 Agustus 2023	91.436.177,43	Pemusnahan
14.	Dinas Perhubungan	000.2.4/08-BPKAD/2023	10 Juli 2023	142.841.614,00	Pemusnahan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	No. SK	Tanggal SK	Nilai Penghapusan (Rp.)	Sebab Penghapusan
		000.2.4/75-BPKAD/2023	29 Desember 2023	100.886.625,60	
15.	Kelurahan Angsau	000.2.4/30-BPKAD/2023	3 Oktober 2023	53.886.000,00	Pemindahtanganan
16.	Kecamatan Jorong	000.2.4/71-BPKAD/2023	29 Desember 2023	14.315.847,26	Pemusnahan
17.	Kecamatan Kintap	000.2.4/84-BPKAD/2023	29 Desember 2023	55.197.534,00	Pemusnahan
18.	Kecamatan Batu Ampar	000.2.4/35-BPKAD/2023	11 Oktober 2023	19.720.000,00	Pemusnahan
19.	Kecamatan Bajuin	000.2.4/83-BPKAD/2023	29 Desember 2023	59.809.099,00	Pemusnahan
20.	Kecamatan Takisung	000.2.4/70-BPKAD/2023	29 Desember 2023	34.403.500,00	Pemusnahan
Jumlah				4.280.054.687,25	

Pengurangan berupa reklasifikasi kurang pada aset tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp3.815.265.062,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 123 Rincian Pengurangan Reklasifikasi Kurang Pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peralatan Mesin	Aset Tidak Berwujud	650.000,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	300.000.000,00
		Peralatan Mesin	Aset Tetap Lainnya	1.200.000,00
3	Dinas Kesehatan	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	143.064.672,00
		Peralatan Mesin	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.751.000,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peralatan Mesin	Aset Tetap Lainnya	3.367.599.390,00
Jumlah				3.815.265.062,00

Berdasarkan data kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki 1.797 unit kendaraan dinas bermotor senilai Rp139.712.951.378,10. Dari 1.797 unit kendaraan dinas bermotor yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 1.627 unit sudah memiliki bukti kepemilikan (BPKB) senilai Rp129.875.672.907,10.

Terdapat 170 unit kendaraan dinas bermotor senilai Rp9.837.278.471,00 yang belum memiliki bukti kepemilikan (BPKB) dengan rincian : 77 unit kendaraan dinas bermotor senilai Rp413.906.000,00 BPKB masih belum ditemukan dan dalam proses penelusuran, 21 unit kendaraan dinas bermotor senilai Rp8.135.290.000,00 BPKB masih dalam proses penerbitan BPKB (kendaraan pengadaan Tahun Anggaran 2023) serta 72 unit kendaraan dinas senilai Rp1.288.082.471,00 yang sudah memiliki bukti kepemilikan (BPKB) namun keberadaan BPKB masih di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Pemerintah Pusat.

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin terdapat dalam **Lampiran 11**.

5.3.1.3.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

31 Desember 2023
(Rp)

1.492.231.760.740,50

31 Desember 2022
(Rp)

1.329.095.131.735,75



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar dan 2022 sebesar Rp1.492.231.760.740,50 dan Rp1.329.095.131.735,75. Realisasi Gedung dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp163.136.629.004,75 atau sebesar 12,27% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 124 Rincian Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	1.329.095.131.735,75	1.234.545.603.141,82	94.549.528.593,93	7,66
2	Penambahan :				
	- Belanja Modal	181.244.711.046,00	104.788.622.560,00	76.456.088.486,00	72,96
	- Mutasi Unit Kerja	109.579.815.400,00	35.912.649.013,06	73.667.166.386,94	205,13
	- Reklasifikasi	5.320.398.287,00	7.664.878.096,00	(2.344.479.809,00)	(30,59)
	- Hibah dan Koreksi Tambah	177.749.750,00	1.170.505.247,65	(992.755.497,65)	(84,81)
3	Pengurangan :				
	- Ekstrakomptabel	13.050.000,00	6.000.000,00	7.050.000,00	117,50
	- Mutasi Unit Kerja	109.579.815.400,00	35.912.649.013,06	73.667.166.386,94	205,13
	- Reklasifikasi	8.018.804.550,00	10.129.307.001,00	(2.110.502.451,00)	(20,84)
	- Penghapusan	10.566.537.545,25	6.704.519.374,72	3.862.018.170,53	57,60
	- Koreksi Kurang Aset Tetap	5.007.837.983,00	2.234.650.934,00	2.773.187.049,00	124,10
	Jumlah	1.492.231.760.740,50	1.329.095.131.735,75	163.136.629.004,75	12,27

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan diantaranya berasal dari belanja modal Rp181.244.711.046,00, dan hibah masuk sebesar Rp177.749.750,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 125 Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Nama Barang/Jenis Barang	No. BAST	Nama Pemberi	Nilai (Rp.)
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bangunan Posyandu	000.2.3.2/01/BAST/BPKAD/2023	Hj. Ida Laila, S.Pd (Pemerintah Desa Bajuin)	116.199.750,00
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Parkir (Pertama)	000.2.3.2/03/BAST/BPKAD/2023	Mahrudin (Warga Desa Pandan Sari Kec. Kintap)	52.700.000,00
		Bangunan Parkir (Kedua)	000.2.3.2/08/BAST/BPKAD/2023	Sulistiani/Orang Tua Siswa (Komite Sekolah UPTD SMPN 8 Pelaihari)	7.500.000,00
			000.2.3.2/09/BAST/BPKAD/2023	Sulistiani/Orang Tua Siswa (Komite Sekolah UPTD SMPN 8 Pelaihari)	1.350.000,00
		Jumlah			177.749.750,00

Mutasi unit kerja aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp109.579.815.400,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 126 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	SKPD Awal	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	299.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD Awal	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	251.391.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	47.338.870.100,00
		Dinas Pariwisata	216.520.000,00
		Kecamatan Bati-Bati	216.740.000,00
		Kecamatan Takisung	216.190.000,00
		Kecamatan Panyipatan	196.358.000,00
		Kecamatan Kintap	196.539.000,00
		Kecamatan Batu Ampar	196.812.000,00
		Kecamatan Kurau	196.502.000,00
		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	413.642.000,00
		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	413.408.000,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	216.650.000,00
		Kecamatan Pelaihari	5.949.085.500,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.580.516.500,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.103.026.000,00
		Kecamatan Jorong	375.718.000,00
		Kecamatan Tambang Ulang	257.199.000,00
		Kecamatan Bajuin	276.138.000,00
		Sekretariat Daerah	5.249.625.300,00
		Dinas Kesehatan	35.939.292.400,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.003.941.400,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kecamatan Pelaihari	213.582.200,00
5	Kecamatan Pelaihari	Dinas Kesehatan	262.769.000,00
Jumlah			109.579.815.400,00

Selain itu juga terdapat reklasifikasi tambah sebesar Rp5.320.398.287,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 127 Rincian Reklasifikasi Tambah Gedung dan Bangunan

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	966.445.720,00
2	Dinas Kesehatan	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	143.064.672,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	29.117.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	256.344.532,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	950.768.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	2.475.844.311,00
5	Dinas Sosial	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	15.935.500,00
6	Kec. Tambang Ulang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	3.480.252,00
7	Kecamatan Kurau	Barang dan Jasa	Gedung dan Bangunan	25.000.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informasi	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	300.000.000,00
9	Inspektorat	Barang dan Jasa	Gedung dan Bangunan	154.398.000,00
Jumlah				5.320.398.287,00

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2023 diantaranya merupakan reklasifikasi kurang dan penghapusan. Pengurangan karena reklasifikasi kurang pada aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp8.018.804.550,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 128 Rincian Reklasifikasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.925.887.964,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.045.354.981,00
2	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.637.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Gedung dan Bangunan	Peralatan Mesin	348.773.100,00
		Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	126.091.000,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.029.617.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	177.653.376,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	122.230.860,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.202.000,00
6	Dinas Pariwisata	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	174.728.269,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.080.000,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.318.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informasi	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	23.231.000,00
Jumlah				8.018.804.550,00

Sedangkan untuk penghapusan sebesar Rp10.566.537.545,25 dimana penghapusan ini terdapat pada 13 SKPD dengan rincian SK Penghapusan sebagai berikut.

Tabel 129 Rincian Penghapusan Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	No. SK	Tanggal SK	Nilai Penghapusan (Rp.)	Sebab Penghapusan
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	000.2.4/48-BPKAD/2023	22 November 2023	563.027.000,00	pemindahtanganan
2.	Dinas Perhubungan	000.2.4/03-BPKAD/2023	4 Juli 2023	49.780.000,00	Pemusnahan
		000.2.4/34-BPKAD/2023	11 Oktober 2023	34.790.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	No. SK	Tanggal SK	Nilai Penghapusan (Rp.)	Sebab Penghapusan
3.	Dinas Pariwisata	000.2.4/02-BPKAD/2023	6 Maret 2023	203.144.400,00	Pemusnahan
		000.2.4/20-BPKAD/2023	1 Agustus 2023	35.700.889,58	
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	000.2.4/05-BPKAD/2023	22 Juni 2023	180.189.000,00	Pemusnahan
		000.2.4/24-BPKAD/2023	11 September 2023	70.677.735,66	
		000.2.4/33-BPKAD/2023	6 Oktober 2023	184.290.300,00	
		000.2.4/46-BPKAD/2023	22 November 2023	14.916.666,67	
		000.2.4/51-BPKAD/2023	18 Desember 2023	72.108.934,00	
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	000.2.4/06-BPKAD/2023	4 Juli 2023	121.156.928,10	Pemusnahan
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/PPKD	000.2.4/16-BPKAD/2023	20 Juli 2023	900.650.540,00	Pemusnahan
		000.2.4/44-BPKAD/2023	13 November 2023	24.539.000,00	
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	000.2.4/10-BPKAD/2023	12 Juli 2023	319.001.000,00	Pemusnahan
		000.2.4/11-BPKAD/2023	12 Juli 2023	140.164.200,00	
		000.2.4/12-BPKAD/2023	12 Juli 2023	25.000.000,00	
		000.2.4/13-BPKAD/2023	12 Juli 2023	214.445.017,00	
		000.2.4/37-BPKAD/2023	13 Oktober 2023	242.975.004,00	
		000.2.4/38-BPKAD/2023	13 Oktober 2023	168.945.000,00	
		000.2.4/39-BPKAD/2023	13 Oktober 2023	31.800.000,00	
		000.2.4/40-BPKAD/2023	13 Oktober 2023	240.693.000,00	
		000.2.4/41-BPKAD/2023	13 Oktober 2023	105.900.000,00	
		000.2.4/42-BPKAD/2023	13 Oktober 2023	78.815.000,00	
		000.2.4/53-BPKAD/2023	18 Desember 2023	3.119.689.762,30	
		000.2.4/54-BPKAD/2023	18 Desember 2023	578.136.019,42	
		000.2.4/55-BPKAD/2023	18 Desember 2023	1.116.604.694,52	
8.	Kecamatan Pelaihari	000.2.4/15-BPKAD/2023	19 Juli 2023	213.582.200,00	Pemusnahan
9.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	000.2.4/19-BPKAD/2023	1 Agustus 2023	135.190.000,00	Pemusnahan
		000.2.4/52-BPKAD/2023	18 Desember 2023	110.428.000,00	
10.	Sekretariat Daerah	000.2.4/ 25 -BPKAD/2023	20 September 2023	428.201.379,00	Pemusnahan
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	000.2.4/31-BPKAD/2023	4 Oktober 2023	116.199.750,00	pemindahtanganan
12.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	000.2.4/43-BPKAD/2023	20 Oktober 2023	90.530.000,00	Pemusnahan
13.	Dinas Kesehatan	000.2.4/26-BPKAD/2023	26 September 2023	333.584.000,00	Pemusnahan
14.	Badan Pendapatan Daerah	000.2.4/45-BPKAD/2023	14 November 2023	13.245.125,00	Pemusnahan
15.	Kecamatan Pelaihari (UPB Kelurahan Sarang Halang)	000.2.4/50-BPKAD/2023	18 Desember 2023	288.437.000,00	Pemusnahan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	No. SK	Tanggal SK	Nilai Penghapusan (Rp.)	Sebab Penghapusan
Jumlah				10.566.537.545,25	

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan terdapat dalam **Lampiran 11**.

5.3.1.3.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

31 Desember 2023
(Rp)

2.856.866.485.609,42

31 Desember 2022
(Rp)

2.533.893.026.483,34

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp2.856.866.485.609,42 dan Rp2.533.893.026.483,34. Realisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp322.973.459.126,08 atau sebesar 12,75% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 130 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	2.533.893.026.483,34	2.334.275.258.255,79	199.617.768.227,55	8,55
2	Penambahan :				
	- Belanja Modal	283.953.961.471,00	200.681.712.555,00	83.272.248.916,00	41,49
	- Mutasi Unit Kerja	9.614.410.514,00	63.740.000,00	9.550.670.514,00	14.983,79
	- Reklasifikasi	44.326.821.385,00	10.112.607.889,00	34.214.213.496,00	338,33
	- Hibah dan Koreksi Tambah	2.625.772.744,04	37.140.774.269,35	(34.515.001.525,31)	(92,93)
3	Pengurangan :				
	- Mutasi Unit Kerja	9.614.410.514,00	63.740.000,00	9.550.670.514,00	14.983,79
	- Reklasifikasi	5.813.533.343,00	8.773.827.959,00	(2.960.294.616,00)	(33,74)
	- Penghapusan	1.390.470.805,96	201.640.136,80	1.188.830.669,16	589,58
	- Koreksi Kurang aset tetap	729.092.325,00	39.341.858.390,00	(38.612.766.065,00)	(98,15)
Jumlah		2.856.866.485.609,42	2.533.893.026.483,34	322.973.459.126,08	12,75

Penambahan aset tetap jalan irigasi dan jaringan diantaranya berupa belanja modal sebesar Rp283.953.961.471,00 dan hibah masuk sebesar Rp2.625.772.744,04 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 131 Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	SKPD Awal	No BAST	Nama Pemberi	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	000.2.3.2/15/BAST/BP KAD/2023	Edy Purwanto (Komite Sekolah UPTD SMPN 4 Pelaihari)	25.300.000,00
		000.2.3.2/16/BAST/BP KAD/2023	Muhammad Anto (Komite Sekolah UPTD SMPN 2 Tambang Ulang)	10.000.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	359.BA/BN.07/SBG/2 023	Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI	1.537.604.310,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD Awal	No BAST	Nama Pemberi	Nilai (Rp)
3.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	27.A Tahun 2022 dan 188.45/133/BA/KUM/2022	Roy Rizali Anwar (Sekretaris Daerah Prov. Kalimantan Selatan)	982.130.934,04
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	003/BAST/CPKA-SEKDA/LEGAL/I/2023	Gunawan Chandra (Warga Jalan A. Yani Pemurus Baru Banjarmasin Selatan)	70.737.500,00
Jumlah				2.625.772.744,04

Reklasifikasi tambah pada aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp5.749.445.189,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 132 Rincian Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.925.887.964,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	27.369.000,00
2	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.751.000,00
		Aset Tak Berwujud	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.376.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	126.091.000,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.263.432.580,00
		Barang dan Jasa	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	38.577.376.196,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	177.653.376,00
5	Dinas Pariwisata	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	174.728.269,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	46.076.000,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.080.000,00
Jumlah				44.326.821.385,00

Mutasi unit kerja aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp9.614.410.514,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 133 Rincian Mutasi Unit Kerja Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	SKPD Awal	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	7.642.650.014,00
		Kecamatan Panyipatan	88.378.000,00
		Kecamatan Tambang Ulang	126.091.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Kecamatan Panyipatan	181.347.000,00
		Dinas Kesehatan	1.575.944.500,00
Jumlah			9.614.410.514,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Reklasifikasi kurang pada aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp5.813.533.343,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 134 Rincian Reklasifikasi Kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	256.344.532,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.713.290.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	2.475.844.311,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	199.179.000,00
3	Dinas Sosial	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	15.935.500,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	127.940.000,00
5	Kecamatan Kurau	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	25.000.000,00
Jumlah				5.813.533.343,00

Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2023 diantaranya adalah penghapusan sebesar Rp1.390.470.805,96 dimana penghapusan ini terdapat 2 SKPD dengan rincian SK Penghapusan sebagai berikut.

Tabel 135 Rincian Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	SKPD	No. SK	Tanggal SK	Nilai Penghapusan (Rp.)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	000.2.4/55-BPKAD/2023	18 Desember 2023	10.920.174,30	Penghapusan karena pemusnahan Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) pada SMPN 2 KINTAP
		000.2.4/55-BPKAD/2023	18 Desember 2023	66.594.331,66	Penghapusan karena sebab lain force majeure (bencana banjir) Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) pada SMPN 3 BAJUIN
2.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	000.2.4/57-BPKAD/2023	29 Desember 2023	74.587.000,00	Penghapusan karena pemindahtanganan (hibah) Sumur Artesis/Sumur Bor ke Desa Tajau Mulya
		000.2.4/58-BPKAD/2023	29 Desember 2023	77.282.800,00	Penghapusan karena pemindahtanganan (hibah) Sumur Artesis/Sumur Bor ke Desa Pantai Harapan RT.5 Kecamatan Bumi Makmur
		000.2.4/59-BPKAD/2023	29 Desember 2023	73.900.000,00	Penghapusan karena pemindahtanganan (hibah) Sumur Artesis/Sumur Bor ke Desa Sungai Jelai RT.01
		000.2.4/60-BPKAD/2023	29 Desember 2023	249.400.000,00	Penghapusan karena pemindahtanganan (hibah) Sumur Artesis/Sumur Bor ke Desa Sungai Jelai RT.04
		000.2.4/61-BPKAD/2023	29 Desember 2023	90.057.500,00	Penghapusan karena pemindahtanganan (hibah) Sumur Artesis/Sumur Bor ke Desa Sungai Jelai
		000.2.4/62-BPKAD/2023	29 Desember 2023	114.257.000,00	Penghapusan karena pemindahtanganan (hibah) Sumur Artesis/Sumur Bor ke Desa Panyipatan Rt.02 Kecamatan Panyipatan
		000.2.4/63-BPKAD/2023	29 Desember 2023	75.407.500,00	Penghapusan karena pemindahtanganan (hibah) Sumur Artesis/Sumur Bor pada RT.7 dan 8 Desa Panyipatan
000.2.4/64-BPKAD/2023	29 Desember 2023	81.350.000,00	Penghapusan karena pemindahtanganan (hibah) Sumur Artesis/Sumur Bor ke Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan		



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	No. SK	Tanggal SK	Nilai Penghapusan (Rp.)	Keterangan
		000.2.4/65-BPKAD/2023	29 Desember 2023	74.902.500,00	Penghapusan karena pemindahtanganan (hibah) Sumur Artesis/Sumur Bor ke Desa Tambak Sarinah
		000.2.4/66-BPKAD/2023	29 Desember 2023	74.602.000,00	Penghapusan karena pemindahtanganan (hibah) Sumur Artesis/Sumur Bor ke Desa Banua Raya Kec. Bati-Bati
		000.2.4/67-BPKAD/2023	29 Desember 2023	148.700.000,00	Penghapusan karena pemindahtanganan (hibah) Sumur Artesis/Sumur Bor ke Desa Benua Raya RT.02 & RT.15 Kec. Bati-Bati
		000.2.4/68-BPKAD/2023	29 Desember 2023	89.330.000,00	Penghapusan karena pemindahtanganan (hibah) Sumur Artesis/Sumur Bor ke Desa Benua Raya Samping Masjid
		000.2.4/69-BPKAD/2023	29 Desember 2023	89.180.000,00	Penghapusan karena pemindahtanganan (hibah) Sumur Artesis/Sumur Bor kepada SMUN 1 Bumi Makmur
Jumlah				1.390.470.805,96	

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat dalam **Lampiran 11**.

5.3.1.3.5 ASET TETAP LAINNYA

31 Desember 2023
(Rp)

4.861.045.479,00

31 Desember 2022
(Rp)

4.830.380.283,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp4.861.045.479,00 dan sebesar Rp4.830.380.283,00. Realisasi Aset Tetap Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp30.665.196,00 atau sebesar 0,63% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 136 Rincian Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	4.830.380.283,00	4.796.764.345,00	33.615.938,00	0,70
2	Penambahan:				
	- Belanja Modal	732.986.495,00	16.548.300,00	716.438.195,00	4.329,38
	- Mutasi Unit Kerja	172.967.000,00	0,00	172.967.000,00	100,00
	- Reklasifikasi	3.368.799.390,00	1.038.224.633,00	2.330.574.757,00	224,48
	- Hibah	14.724.034,00	30.343.400,00	(15.619.366,00)	(51,48)
3	Pengurangan:				
	- Ekstrakomptabel	3.353.313.228,00	1.041.150.395,00	2.312.162.833,00	222,08
	- Mutasi Unit kerja	172.967.000,00	0,00	172.967.000,00	100,00
	- Reklasifikasi	727.531.495,00	10.350.000,00	717.181.495,00	6.929,29
	- Penghapusan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
	- Koreksi kurang aset tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.861.045.479,00	4.830.380.283,00	30.665.196,00	0,63



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Penambahan aset tetap lainnya diantaranya berupa belanja modal sebesar Rp732.986.495,00 dan adanya berupa reklasifikasi tambah aset tetap lainnya sebesar Rp3.368.799.390,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 137 Rincian Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Lainnya

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	3.367.599.390,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	1.200.000,00
Jumlah				3.368.799.390,00

Penambahan aset tetap lainnya berupa hibah sebesar Rp14.724.034,00 yaitu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 138 Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya

No	Nama SKPD	No BAST	Nama Pemberi	Nilai (Rp)
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6156/NPHD/2022	Rohani Br Tohang, S.E., M.Si (Perpustakaan Nasional RI)	14.724.034,00
Jumlah				14.724.034,00

Pengurangan aset tetap lainnya pada tahun 2023 diantaranya adalah penghapusan sebesar Rp5.000.000,00 dengan SK Penghapusan Nomor 000.2.4/74-BPKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023 dengan nilai Rp5.000.000,00 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dan berupa reklasifikasi kurang sebesar Rp727.531.495,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 139 Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Aset Tetap Lainnya	Aset Tidak Berwujud	53.000.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aset Tetap Lainnya	Aset Tidak Berwujud	17.900.000,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aset Tetap Lainnya	Aset Tidak Berwujud	129.840.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aset Tetap Lainnya	Aset Tidak Berwujud	85.180.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Aset Tetap Lainnya	Aset Tidak Berwujud	118.573.495,00
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Aset Tetap Lainnya	Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	Aset Tetap Lainnya	Aset Tidak Berwujud	199.900.000,00
8	Inspektorat Kabupaten	Aset Tetap Lainnya	Aset Tidak Berwujud	57.638.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aset Tetap Lainnya	Aset Tidak Berwujud	15.500.000,00
Jumlah				727.531.495,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya terdapat dalam **Lampiran 11**.

5.3.1.3.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
20.105.053.206,40	16.586.988.476,40

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.105.053.206,40 dan Rp16.586.988.476,40. Realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.518.064.730,00 atau sebesar 21,21% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 140 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	16.586.988.476,40	24.530.347.182,50	(7.943.358.706,10)	(32,38)
2	Penambahan:				
	- Mutasi Unit Kerja	881.089.178,40	195.681.700,00	685.407.478,40	350,27
	- Reklasifikasi	7.906.718.682,00	5.668.102.552,00	2.238.616.130,00	39,49
3	Pengurangan:				
	- Mutasi Unit Kerja	881.089.178,40	195.681.700,00	685.407.478,40	350,27
	- Reklasifikasi	4.388.653.952,00	12.018.883.657,00	(7.630.229.705,00)	(63,49)
	- Koreksi Kurang Aset Tetap	0,00	1.592.577.601,10	(1.592.577.601,10)	(100,00)
Jumlah		20.105.053.206,40	16.586.988.476,40	3.518.064.730,00	21,21

Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2023 sebesar Rp7.906.718.682,00 merupakan jasa konsultasi perencanaan/DED yang nantinya menjadi penambahan harga perolehan pada aset tetap yang akan dibangun, dengan rincian:

Tabel 141 Rincian Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.637.000,00
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.045.354.981,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.202.000,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	127.940.000,00
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.318.000,00
		Tanah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	315.641.841,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	122.230.860,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	199.179.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.029.617.000,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.713.290.000,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	190.287.000,00
		Belanja Barang dan Jasa	Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.790.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	23.231.000,00
Jumlah				7.906.718.682,00

Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan pada Tahun 2023 sebesar Rp4.388.653.952,00 berupa jasa konsultasi perencanaan/DED sudah diatribusikan ke aset induk yang berkenaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 142 Rincian Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Kecamatan Tambang Ulang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	3.480.252,00
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	966.445.720,00
			Jalan Jaringan dan Irigasi	27.369.000,00
3	Dinas Kesehatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Peralatan dan Mesin	89.475.100,00
			Gedung dan Bangunan	29.117.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	950.768.300,00
			Jalan Jaringan dan Irigasi	2.263.432.580,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tanah	12.490.000,00
			Jalan Jaringan dan Irigasi	46.076.000,00
Jumlah				4.388.653.952,00

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat dalam **Lampiran 11**.

5.3.1.3.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

31 Desember 2023

(Rp)

2.075.942.840.668,20

31 Desember 2022

(Rp)

1.814.296.220.981,51

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tanggal Neraca. Penyusutan terhadap Aset Tetap pertama kali diterapkan pada tahun buku 2015. Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.075.942.840.668,20 dan Rp1.814.296.220.981,51 Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 143 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Kenaikan/ Penurunan		
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	(Rp)	%
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)			
1	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	428.488.626.116,60	76.743.975.003,89	3.997.597.707,70	501.235.003.412,79	72.746.377.296,19	16,98
2	Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	278.132.043.363,11	39.592.595.237,66	2.271.453.109,00	315.453.185.491,77	37.321.142.128,66	13,42
3	Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.106.025.772.013,80	151.981.063.868,84	402.383.614,00	1.257.604.452.268,64	151.578.680.254,84	13,7
4	Akum. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.649.779.488,00	420.007,00	0	1.650.199.495,00	420.007,00	0,03
Jumlah		1.814.296.220.981,51	268.318.054.117,39	6.671.434.430,70	2.075.942.840.668,20	261.646.619.686,69	14,42

Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2023 sebesar Rp268.318.054.117,39 berupa beban penyusutan sebesar Rp267.160.342.327,02 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp76.523.304.633,89
- 2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp38.924.769.590,66
- 3) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp151.711.848.095,47
- 4) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp420.007,00

Penambahan lainnya berupa koreksi perhitungan penyusutan dari aplikasi SIMDA BMD sebesar Rp1.157.711.790,37 rincian sebagai berikut.

- 1) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp220.670.370,00
- 2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp667.825.647,00
- 3) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp269.215.773,37

Sedangkan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2023 sebesar Rp6.671.434.430,70 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Pengurangan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin berupa penghapusan sebesar Rp3.993.097.707,70 dan koreksi kurang aset tetap double catat Rp4.500.000,00.
- 2) Pengurangan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan berupa penghapusan sebesar Rp2.271.453.109,00
- 3) Pengurangan akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan berupa penghapusan dan koreksi kurang sebesar Rp402.383.614,00

Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus dengan menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Jika setelah perolehan masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya perbaikan seperti renovasi (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), restorasi (kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya) dan *overhaul* (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), maka akan menambah masa manfaat.



5.3.1.4 DANA CADANGAN

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	56.160.390.391,32

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp56.160.390.391,32. Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada Tahun 2024 atau tahun lain sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening khusus Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan Daerah. Dana Cadangan yang disisihkan dari Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dengan total dana sebesar Rp75.000.000.000,00. Dana Cadangan pada tahun 2022 sebesar Rp40.000.000.000,00 telah dikeluarkan sebagai pengeluaran pembiayaan dan terdapat penambahan sebesar Rp1.160.390.391,32 yang merupakan bunga deposito dari Deposito Dana Cadangan pada Bank Kalsel dengan Nomor 0042099 Nomor Rekening AA22339K5MSJ-3201322722 yang menambah Dana Cadangan tersebut. Pada tahun 2023 Pengeluaran Pembiayaan untuk Dana Cadangan sebesar Rp20.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/519-KUM/2022 Tanggal 23 Februari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023. Pencairan dana cadangan pada tanggal 13 November 2023 ke Kas Daerah, sehingga saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00.

Tabel 144 Dana Cadangan

No.	Tahun Anggaran	Saldo Pembentukan (Rp)	Jumlah Bunga Yang Diterima (Rp)	Jumlah Pencairan (Rp)	Saldo Dana Cadangan (Rp)
1	2021	15.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00
2	2022	40.000.000.000,00	1.160.390.391,32	0,00	56.160.390.391,32
3	2023	20.000.000.000,00	3.206.530.457,40	79.366.920.848,72	0,00
Jumlah		75.000.000.000,00	4.366.920.848,72	79.366.920.848,72	0,00

5.3.1.5 ASET LAINNYA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
22.687.858.788,60	341.837.641.175,37

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.687.858.788,60 dan 2022 sebesar Rp341.837.641.175,37 terdiri atas:

Tabel 145 Rincian Saldo Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Aset Tak Berwujud	11.351.142.492,52	5.206.658.805,52	6.144.483.687,00	1,18



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud	(4.875.710.754,67)	(2.834.236.121,39)	(2.041.474.633,28)	0,72
3	Aset Lain-lain	23.324.191.026,75	349.666.114.158,06	(326.341.923.131,31)	(0,93)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(7.111.763.976,01)	(10.200.895.666,82)	3.089.131.690,81	(0,30)
Jumlah		22.687.858.788,59	341.837.641.175,37	-319.149.782.386,78	-0,93

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

5.3.1.5.1 ASET TIDAK BERWUJUD

31 Desember 2023

(Rp)

11.351.142.492,52

31 Desember 2022

(Rp)

5.206.658.805,52

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp11.351.142.492,52 dan Rp5.206.658.805,52. Aset Tidak Berwujud berupa *Software*, *Software* Lainnya, Hak Cipta, Film, Karya Seni, Lisensi dan *Franchise*, serta Kajian yang nilai bruto sebesar Rp11.351.142.492,52 dengan nilai Amortisasi senilai Rp4.875.710.754,67 sehingga nilai neto sebesar Rp6.475.431.737,85 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 146 Rincian Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023				Kenaikan/(Penurunan)	
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	(Rp)	%
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)			
1	Software	2.884.437.805,52	772.998.000,00	0,00	3.657.435.805,52	772.998.000,00	26,80
2	Software Lainnya	40.425.000,00	0,00	0,00	40.425.000,00	0,00	0,00
3	Hak Cipta	69.250.000,00	0,00	0,00	69.250.000,00	0,00	0,00
4	Film	44.990.000,00	4.797.388.692,00	0,00	4.842.378.692,00	4.797.388.692,00	10.663,23
5	Karya Seni/Budaya	23.200.000,00	0,00	0,00	23.200.000,00	0,00	0,00
6	Lisensi dan Frenchise	128.425.000,00	0,00	0,00	128.425.000,00	0,00	100,00
7	Kajian	2.015.931.000,00	574.096.995,00	0,00	2.590.027.995,00	574.096.995,00	100,00
Jumlah		5.206.658.805,52	6.144.483.687,00	0,00	11.351.142.492,52	6.144.483.687,00	118,01

Realisasi aset tak berwujud Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.144.483.687,00 atau sebesar 118.01% dari tahun sebelumnya.

Penambahan aset tak berwujud berasal dari belanja modal aset tak berwujud sebesar Rp6.143.833.687,00 dan reklasifikasi dari peralatan dan mesin sebesar Rp650.000,00 berupa *software video editor*.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Nilai Kenaikan Aset Tak Berwujud untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.144.483.687,00. Adapun rincian Amortisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 147 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023				Kenaikan/(Penurunan)	
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	(Rp)	%
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)			
1	Software	2.031.987.721,39	507.373.295,87	0,00	2.539.361.017,26	507.373.295,87	24,97
2	Software Lainnya	21.626.000,00	8.085.000,00	0,00	29.711.000,00	8.085.000,00	37,39
3	Hak Cipta	41.450.000,00	13.850.000,00	0,00	55.300.000,00	13.850.000,00	33,41
4	Film	26.994.000,00	968.475.738,40	0,00	995.469.738,40	968.475.738,40	3.587,74
5	Karya Seni/Budaya	23.200.000,00	0,00	0,00	23.200.000,00	0,00	0,00
6	Lisensi dan Franchise	51.370.000,00	25.685.000,00	0,00	77.055.000,00	25.685.000,00	50,00
7	Kajian	637.608.400,00	518.005.599,00	0,00	1.155.613.999,00	518.005.599,00	81,24
	Jumlah	2.834.236.121,39	2.041.474.633,27	0,00	4.875.710.754,66	2.041.474.633,27	72,03

Saldo Akumulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwujud Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.041.474.633,27 atau sebesar 72.03% dari tahun sebelumnya.

Penambahan nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud berasal dari beban amortisasi aset tidak berwujud Tahun 2023 sebesar Rp2.041.474.633,27.

5.3.1.5.2 ASET LAIN-LAIN

**31 Desember 2023
(Rp)**

23.324.191.026,75

**31 Desember 2022
(Rp)**

349.666.114.158,06

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp23.324.191.026,75 dan Rp349.666.114.158,06. Realisasi Aset Lain-lain Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp323.252.791.440,50 atau sebesar 95,22% dari tahun sebelumnya. Nilai bruto Aset Lain-lain sebesar Rp23.324.191.026,75 dengan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp7.111.763.976,01 sehingga nilai neto sebesar Rp16.212.427.050,74. Adapun rincian Aset Lain-Lain terdiri atas:

Tabel 148 Rincian Aset Lain-Lain

No.	Uraian	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Kenaikan / (Penurunan)	
		2023 (Rp)	2022 (Rp)	(Rp)	%
1	Uang persediaan yang hilang dicuri	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00	0,00
2	Aset tidak ditemukan keberadaannya	11.081.953.717,40	15.784.174.468,10	(4.702.220.750,70)	(29,79)
3	Aset yang direncanakan akan dihapuskan	3.874.456.442,35	4.603.317.966,96	(728.861.524,61)	(15,83)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Kenaikan / (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
4	Jasa Konsultasi Perencanaan	8.358.860.867,00	8.358.860.867,00	0,00	0,00
5	Transfer DBH berupa TDF	0,00	320.910.840.856,00	(320.910.840.856,00)	(100,00)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(7.111.763.976,01)	(10.200.895.666,82)	3.089.131.690,81	(30,28)
Jumlah		16.212.427.050,74	339.465.218.491,24	(323.252.791.440,50)	(95,22)

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 terdiri atas:

- 1) Dalam saldo 31 Desember 2021 masih terdapat Uang Persediaan Tahun 2008 pada Dinas Peternakan sebesar Rp8.920.000,00 yang hilang akibat pencurian di Kantor Dinas Peternakan sebagaimana diungkapkan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian No.Pol: STPL/77/XI/2008/SPK tanggal 25 November 2008. Uang Persediaan yang hilang tersebut masih dalam proses penghapusan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan melakukan proses permintaan keterangan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Nomor: 700/03/LHK/NSP/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Laporan Hasil Permintaan Keterangan tentang Kehilangan Uang Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil penelusuran Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dinyatakan memang terbukti telah terjadi pencurian uang kas yang dikelola bendahara pengeluaran pada Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut yang terjadi pada tanggal 25 November 2008 senilai Rp8.920.000,00 untuk selanjutnya diusulkan dilakukan proses penghapusan;
- 2) Aset Tetap yang Tidak Ditemukan pada penguasaan pengguna sebesar Rp11.081.953.717,40 pada 21 SKPD berdasarkan hasil Inventarisasi/Sensus Aset Daerah dan masih dalam tahap konfirmasi yang selanjutnya akan dihapuskan atau direklasifikasi kembali ke Aset Tetap sampai dengan diperolehnya hasil penelitian dan pengkajian oleh tim. Penurunan aset tetap yang tidak ditemukan sebesar Rp4.702.220.750,70 karena adanya penghapusan dengan rincian sebagai berikut.
 - a. 000.2.4/56-BPKAD/2023 tanggal 27 Desember 2023 Rp4.654.572.150,70 dikarenakan sebab lain (hilang tidak ditemukan) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, , Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, RSUD H. Boejasin Pelaihari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kecamatan Kurau, Kantor Kecamatan Takisung dan Kantor Kecamatan Jorong;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp7.000.000,00 dengan SK Nomor: 000.2.4/09-BPKAD/2023 tanggal 12 Juli 2023;
 - c. Kecamatan Bajuin penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp 10.640.850,00 dengan SK Nomor : 000.2.4/83-BPKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023;
 - d. Kecamatan Batu Ampar penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp19.250.000,00 dengan SK Nomor : 000.2.4/35-BPKAD/2023 tanggal 11 Oktober 2023;



- e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp 10.757.750,00 dengan SK Nomor : 000.2.4/80-BPKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023
- 3) Aset tetap yang akan dihapuskan pada Tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan adanya penghapusan sebesar Rp728.861.524,61 dengan sebagai berikut.
 - a. RSUD H. Boejasin penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai sebesar Rp119.100.835,00 dengan SK Nomor : 000.2.4/17-BPKAD/2023 tanggal 31 Juli 2023;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai sebesar Rp1.876.533,00 dengan SK Nomor : 000.2.4/73-BPKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai sebesar Rp433.053.382,37 dengan SK Nomor : 000.2.4/36-BPKAD/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
 - d. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai sebesar Rp51.934.774,24 dengan SK Nomor : 000.2.4/ 14-BPKAD/2023 tanggal 12 Juli 2023;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai sebesar Rp4.620.000,00 dengan SK Nomor : 000.2.4/82-BPKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023;
 - f. Dinas Kesehatan dikarenakan pemusnahan dengan nomor SK 000.2.4/07-BPKAD/2023 tanggal 10 Juli 2023 dengan nilai sebesar Rp10.350.000,00;
 - g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai sebesar Rp107.926.000,00 dengan SK Nomor : 000.2.4/80-BPKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023

Sehingga saldo akhir aset tetap yang akan dihapuskan dengan nilai Rp3.874.456.442,35 dengan rincian sebagai berikut.

- Aset rusak berat hasil sensus BMD Tahun 2013 sebesar Rp136.297.500,00 dan aset rusak berat hasil Sensus BMD Tahun 2018 sebesar Rp2.752.041.347,35;
 - Alsintan yang rencana akan dihapuskan sebesar Rp194.843.095,00 merupakan reklasifikasi dari Investasi non Permanen;
 - Aset sisa P3D Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp716.405.700,00;
 - Selisih aset sisa P3D Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp74.868.800,00.
 - Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp8.358.860.867,00 merupakan jasa konsultansi perencanaan/DED yang sudah tidak akan digunakan lagi, direncanakan untuk dihapuskan, dan jasa konsultansi perencanaan/DED yang belum diketahui kapan keberlanjutan atas pekerjaan fisiknya.
- 4) Akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp7.111.763.976,01 yang terdiri dari:
 - a. Akumulasi penyusutan aset lain-lain untuk hasil sensus BMD Tahun 2018 sebesar Rp6.541.230.424,36.
 - b. Akumulasi penyusutan aset lain-lain untuk Aset sisa P3D Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp570.533.551,65.

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.



5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
236.503.253.918,34	45.004.188.394,46

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp236.503.253.918,34 dan Rp45.004.188.394,46 terdiri atas:

Tabel 149 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Diterima Di muka	301.876.795,34	346.108.795,96	(44.232.000,62)	(0,13)
2	Utang Belanja	12.200.423.960,00	3.509.128.545,50	8.691.295.414,50	2,48
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	224.000.953.163,00	41.148.951.053,00	182.852.002.110,00	4,44
Jumlah		236.503.253.918,34	45.004.188.394,46	191.499.065.523,88	4,26

Penjelasan atas saldo masing-masing Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

5.3.2.1.1 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
301.876.795,34	346.108.795,96

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp301.876.795,34 dan Rp346.108.795,96. Saldo tersebut berasal dari:

- Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa tanah dan bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp94.712.256,42
- Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Pajak Reklame yang diterima di tahun 2023 sebesar Rp207.164.538,92 pada Badan Pendapatan Daerah. Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 150 Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa tanah dan bangunan	94.712.256,42	143.767.606,65	(49.055.350,23)	(0,34)
2	Pendapatan Diterima Dimuka atas pajak reklame	207.164.538,92	202.341.189,31	4.823.349,61	0,02
Jumlah		301.876.795,34	346.108.795,96	(44.232.000,62)	(0,13)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Rincian Pendapatan diterima dimuka atas sewa dan pajak reklame bisa dilihat pada **Lampiran 12.1** dan **Lampiran 12.2**.

5.3.2.1.2 UTANG BELANJA

31 Desember 2023

(Rp)

12.200.423.960,00

31 Desember 2022

(Rp)

3.509.128.545,50

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp12.200.423.960,00 dan Rp3.509.128.545,50. Utang Belanja terdiri dari Utang Barang dan Jasa sebesar Rp8.328.472.156,00 dan Utang Pegawai sebesar Rp3.871.951.804,00. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

Tabel 151 Rincian Utang Belanja Rutin dan Jasa medis SKPD

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	DPUPRP	24.703.682,00	23.996.601,00	707.081,00	2,95
2	Dinas Perhubungan	7.514.626,00	6.746.098,00	768.528,00	11,39
3	Inspektorat Kabupaten	6.420.871,00	6.190.328,00	230.543,00	3,72
4	DPMPTSP	6.851.864,00	6.624.072,00	227.792,00	3,44
5	Kecamatan Jorong	565.800,00	1.333.900,00	(768.100,00)	(57,58)
6	DP2KBP3A	16.246.557,00	7.906.818,00	8.339.739,00	105,48
7	DPMD	2.479.530,00	1.864.524,00	615.006,00	32,98
8	Sekretariat DPRD	31.713.441,00	26.219.259,00	5.494.182,00	20,95
9	BPBD	207.000,00	441.000,00	(234.000,00)	(53,06)
10	Dinas Pariwisata	9.535.718,00	2.016.361,00	7.519.357,00	372,92
11	Kecamatan Batu Ampar	1.768.650,00	1.434.688,00	333.962,00	23,28
12	Kecamatan Kintap	3.148.538,00	1.460.400,00	1.688.138,00	115,59
13	Kecamatan Bumi Makmur	1.273.742,00	1.213.242,00	60.500,00	4,99
14	Badan Pendapatan Daerah	0,00	5.778.306,00	(5.778.306,00)	(100,00)
15	Dinas Kesehatan	7.986.630.612,00	3.190.498.047,50	4.796.132.564,50	150,33
16	DPRKPLH	10.786.392,00	2.824.720,00	7.961.672,00	281,86
17	Disdikbud	0,00	15.835.366,00	(15.835.366,00)	(100,00)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.887.784,00	12.087.859,00	1.799.925,00	14,89
19	Dinas Sosial	6.004.324,00	2.137.292,00	3.867.032,00	180,93
20	Disnakerind	9.540.033,00	9.269.432,00	270.601,00	2,92
21	DKPP	2.241.936,00	0,00	2.241.936,00	0,00
22	Disdukcapil	12.428.343,00	13.547.439,00	(1.119.096,00)	(8,26)
23	Diskopdag	4.046.960,00	4.837.622,00	(790.662,00)	(16,34)
24	Dispora	10.557.846,00	11.414.548,00	(856.702,00)	(7,51)
25	Dispusip	7.154.175,00	9.637.188,00	(2.483.013,00)	(25,76)
26	Distanhorbun	12.181.570,00	12.222.348,00	(40.778,00)	(0,33)
27	Disnakeswan	7.046.870,00	7.432.855,00	(385.985,00)	(5,19)
28	Sekretariat Daerah	90.923.967,00	76.976.550,00	13.947.417,00	18,12



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
29	Kecamatan Pelayari	285.000,00	3.167.291,00	(2.882.291,00)	(91,00)
30	Kecamatan Tambang Ulang	210.234,00	996.899,00	(786.665,00)	(78,91)
31	Kecamatan Kurau	2.159.384,00	1.620.302,00	539.082,00	33,27
32	Kecamatan Bati-Bati	4.349.803,00	3.374.656,00	975.147,00	28,90
33	Kecamatan Panyipatan	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Takisung	4.386.558,00	3.503.619,00	882.939,00	25,20
35	Kecamatan Bajuin	1.516.781,00	2.181.317,00	(664.536,00)	(30,46)
36	Bappeda	2.965.000,00	9.182.270,00	(6.217.270,00)	(67,71)
37	BPKAD	14.026.368,00	13.753.851,00	272.517,00	1,98
38	Bapenda	3.011.979,00	0,00	3.011.979,00	100,00
39	BKPSDM	5.613.320,00	4.509.208,00	1.104.112,00	24,49
40	Badan Kesbangpol	4.086.898,00	4.892.269,00	(805.371,00)	(16,46)
Jumlah		8.328.472.156,00	3.509.128.545,50	4.819.343.610,50	137,34

Utang belanja barang dan jasa SKPD pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.819.343.610,50 atau sebesar 137,34% dari tahun sebelumnya, utang belanja jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.986.630.612,00 merupakan utang rutin, utang belanja pegawai, utang iuran jaminan kesehatan dan juga utang BLUD. Utang belanja pegawai sebesar Rp3.871.951.804,00 terdiri dari:

Tabel 152 Rincian Utang belanja pegawai SKPD

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	43.375.230,00	0,00	43.375.230,00	100,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82.524.418,00	0,00	82.524.418,00	100,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.094.301,00	0,00	12.094.301,00	100,00
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	43.091.931,00	0,00	43.091.931,00	100,00
5	Dinas Kesehatan	1.344.246.047,00	0,00	1.344.246.047,00	100,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.190.354,00	0,00	1.190.354,00	100,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagang	31.055.272,00	0,00	31.055.272,00	100,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	39.049.086,00	0,00	39.049.086,00	100,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31.082.725,00	0,00	31.082.725,00	100,00
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.373.073.814,00	0,00	1.373.073.814,00	100,00
11	DP2KBP3A	54.915.271,00	0,00	54.915.271,00	100,00
12	Dinas Perhubungan	36.642.662,00	0,00	36.642.662,00	100,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	67.222.410,00	0,00	67.222.410,00	100,00
14	DPRKPLH	121.613.521,00	0,00	121.613.521,00	100,00
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	47.181.256,00	0,00	47.181.256,00	100,00
16	Dinas Sosial	23.526.199,00	0,00	23.526.199,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
17	Distanhorbun	210.363.914,00	0,00	210.363.914,00	100,00
18	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12.201.945,00	0,00	12.201.945,00	100,00
19	Kecamatan Bajuin	26.891.003,00	0,00	26.891.003,00	100,00
20	Kecamatan Bati-Bati	11.350.688,00	0,00	11.350.688,00	100,00
21	Kecamatan Batu Ampar	19.787.941,00	0,00	19.787.941,00	100,00
22	Kecamatan Bumi Makmur	70.390.848,00	0,00	70.390.848,00	100,00
23	Kecamatan Jorong	11.609.575,00	0,00	11.609.575,00	100,00
24	Kecamatan Kintap	5.422.092,00	0,00	5.422.092,00	100,00
25	Kecamatan Kurau	5.500.827,00	0,00	5.500.827,00	100,00
26	Kecamatan Panyipatan	35.093.619,00	0,00	35.093.619,00	100,00
27	Kecamatan Pelaihari	78.923.390,00	0,00	78.923.390,00	100,00
28	Kecamatan Takisung	9.548.085,00	0,00	9.548.085,00	100,00
29	Kecamatan Tambang Ulang	8.781.849,00	0,00	8.781.849,00	100,00
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.064.955,00	0,00	10.064.955,00	100,00
31	Sekretariat DPRD	4.136.576,00	0,00	4.136.576,00	100,00
Jumlah		3.871.951.804,00	0,00	3.871.951.804,00	100,00

Utang BLUD RSUD dan Puskesmas sebesar Rp6.986.247.197,00 terdiri dari:

Tabel 153 Utang BLUD RSUD dan Puskesmas

NO	NAMA SKPD	SALDO AKHIR 2023
1	PKM ANGSAU	701.680,00
2	PKM ASAM-ASAM	4.761.330,48
3	PKM BATAKAN	5.833.799,79
4	PKM BATI-BATI	31.814.960,00
5	PKM BUMI MAKMUR	16.580.380,00
6	PKM JORONG	19.871.562,10
7	PKM KAIT-KAIT	0,00
8	PKM KINTAP	1.577.100,00
9	PKM KURAU	7.751.700,00
10	PKM PANYIPATAN	2.270.703,00
11	PKM PADANG LUAS	1.706.830,00
12	PKM PELAIHARI	0,00
13	PKM SUNGAI RIAM	7.646.100,00
14	PKM TAJAU PECAH	15.435.000,00
15	PKM TAKISUNG	32.334.399,63
16	PKM TAMBANG ULANG	4.935.700,00
17	PKM TANJUNG HABULU	933.100,00
18	PKM TIRTA JAYA	11.837.700,00
19	PKM SUNGAI CUKA	18.929.480,00
20	PKM BENTOK KAMPUNG	44.365.280,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

NO	NAMA SKPD	SALDO AKHIR 2023
21	PKM DURIAN BUNGKUK	26.002.280,00
22	PKM PANGGUNG	2.931.600,00
23	RSUD H. BOEJASIN	5.729.232.945,00
24	RSUD KH.MANSYUR	998.793.567,00
Jumlah		6.986.247.197,00

Rincian utang BLUD pada Lampiran 13.1

Tabel 154 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Jasa telepon	32.870.919,00	31.859.402,00	1.011.517,00	3,17
2	Beban Jasa air	47.302.746,00	52.293.500,00	(4.990.754,00)	(9,54)
3	Beban Jasa listrik	573.363.960,00	543.758.385,00	29.605.575,00	5,44
4	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	6.352.934,00	1.900.550,00	4.452.384,00	234,27
5	Beban Jasa Medis	6.986.247.197,00	2.879.316.708,50	4.106.930.488,50	142,64
6	Beban Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	682.334.400,00	0,00	682.334.400,00	100,00
Jumlah		8.328.472.156,00	3.509.128.545,50	4.819.343.610,50	137,34

5.3.2.1.3 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

31 Desember 2023

(Rp)

224.000.953.163,00

31 Desember 2022

(Rp)

41.148.951.053,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp224.000.953.163,00 dan Rp41.148.951.053 terjadi kenaikan sebesar Rp182.852.002.110,00 atau sebesar 444,37%. Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023 merupakan Utang Lebih Salur DBH Pajak dan SDA. Rincian untuk utang jangka pendek lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 155 Utang Lebih Salur DBH

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	DBH PBB	802.704.102,00	591.314.888,00	211.389.214,00	35,75
2	DBH Cukai Hasil Tembakau CHT)	5.227,00	0,00	5.227,00	100,00
3	DBH SDA Pertambangan Umum (Mineral dan Batubara)	222.729.510.289,00	40.384.163.241,00	182.345.347.048,00	451,53
4	DBH SDA Perikanan	468.733.545,00	173.472.924,00	295.260.621,00	170,21
Jumlah		224.000.953.163,00	41.148.951.053,00	182.852.002.110,00	444,37

Rincian utang Lebih Salur DBH Pajak dan SDA dapat dilihat pada **Lampiran 13.2**.

Saldo Utang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat merupakan Dana Bagi Hasil yang lebih bayar dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia



PMK No. 38 /KM.7/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

5.3.3 EKUITAS

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.065.446.359.495,41	4.991.132.313.394,95

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp5.065.446.359.495,41 dan Rp4.991.132.313.394,95. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas diperoleh dari Ekuitas Awal atau Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.991.132.313.394,95 ditambah dampak kumulatif akibat kesalahan mendasar, dampak kumulatif ada disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya adanya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya serta adanya perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Selanjutnya ditambah surplus/defisit Laporan Operasional adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa Tahun 2023, dengan penjelasan sebagai berikut.

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2022	4.991.132.313.394,95
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	5.932.568.081,19
Surplus/defisit Operasional	68.381.478.019,27
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023	5.065.446.359.495,41

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5.4.1 KEGIATAN OPERASIONAL

5.4.1.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 156 Pendapatan LO

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	219.284.083.564,32	168.093.093.620,29	51.190.989.944,03	30,45
2	Pendapatan Transfer	1.656.311.358.586,85	2.138.379.085.769,35	(482.067.727.182,50)	(22,54)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.699.252.440,04	5.172.105.677,00	(472.853.236,96)	(9,14)
	Jumlah	1.880.294.694.591,21	2.311.644.285.066,64	(431.349.590.475,43)	(18,66)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi masing-masing pada akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp219.284.083.564,32 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp168.093.093.620,29.

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2023 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 157 Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pajak Hotel	73.185.181,00	88.001.904,00	(14.816.723,00)	(16,84)
2	Pajak Restoran	6.718.943.786,48	4.792.261.448,80	1.926.682.337,68	40,20
	- Pajak Rumah Makan dan sejenisnya	792.811.642,00	487.100.153,00	305.711.489,00	62,76
	- Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya	5.926.132.144,48	4.305.161.295,80	1.620.970.848,68	37,65
3	Pajak Hiburan	87.546.100,00	65.345.000,00	22.201.100,00	33,98
4	Pajak Reklame	490.972.154,67	560.605.913,77	(69.633.759,10)	(12,42)
	- Papan/ <i>Billboard/ Videotron/ Megatron</i>	448.862.279,67	489.924.998,77	(41.062.719,10)	(8,38)
	- Pajak Reklame Kain	36.234.675,00	46.717.875,00	(10.483.200,00)	(22,44)
	- Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	18.087.840,00	(18.087.840,00)	(100,00)
	- Pajak Reklame Berjalan	5.875.200,00	5.875.200,00	0,00	0,00
5	Pajak Penerangan	26.119.223.496,00	24.940.489.239,00	1.178.734.257,00	4,73
	- Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	26.082.634.396,00	24.887.516.287,00	1.195.118.109,00	4,80
	- Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	36.589.100,00	52.972.952,00	(16.383.852,00)	(30,93)
6	Pajak Parkir	215.947.600,00	118.382.800,00	97.564.800,00	82,41
7	Pajak Air Tanah	1.476.416.123,00	1.357.979.711,00	118.436.412,00	8,72
8	Pajak Sarang Burung Walet	78.524.200,00	75.090.000,00	3.434.200,00	4,57
9	Mineral bukan Logam dan Batuan lainnya	2.720.337.870,20	1.630.843.755,00	1.089.494.115,20	66,81
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.917.054.348,00	6.610.538.542,00	1.306.515.806,00	19,76
11	BPHTB	8.890.005.641,00	6.460.243.716,00	2.429.761.925,00	37,61



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
	- BPHTB - Pemindahan Hak Baru	5.820.353.896,00	5.448.746.032,00	371.607.864,00	6,82
	- BPHTB - Pemberian Hak Baru	3.069.651.745,00	1.011.497.684,00	2.058.154.061,00	203,48
	Jumlah	54.788.156.500,35	46.699.782.029,57	8.088.374.470,78	17,32

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.088.374.470,78 atau sebesar 17,32%.

Terdapat Perbedaan antara Pendapatan Pajak (LRA) dan Pendapatan Pajak (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 158 Perbedaan Pendapatan Pajak LRA dan LO

Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	52.667.553.207,68
Pendapatan Pajak Daerah (LO)	54.788.156.500,35
Selisih	(2.120.603.292,67)

Perbedaan Pendapatan Pajak LRA dan LO dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 159 Selisih Pendapatan Pajak LRA dan Pendapatan Pajak LO

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Pajak LRA	52.667.553.207,68
2	Selisih LRA dan LO	2.120.603.292,67
	Pembayaran Piutang Pajak	(898.580.066,00)
	Penambahan Piutang Pajak	3.024.006.708,28
	Penambahan Pendapatan Diterima dimuka atas Pajak Reklame	(207.164.538,92)
	Pengurangan Pendapatan Diterima dimuka atas Pajak Reklame	202.341.189,31
3	Pendapatan Pajak LO (1+2)	54.788.156.500,35

5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut.

Tabel 160 Pendapatan Retribusi

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	194.760.000,00	223.380.000,00	(28.620.000,00)	(12,81)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	80.100.000,00	82.700.000,00	(2.600.000,00)	(3,14)
4	Retribusi Pelataran	541.494.000,00	562.209.000,00	(20.715.000,00)	(3,68)
5	Retribusi Los	321.560.000,00	425.476.000,00	(103.916.000,00)	(24,42)
6	Retribusi Kios	783.390.000,00	739.232.000,00	44.158.000,00	5,97
7	Retribusi PKB	248.843.000,00	306.330.500,00	(57.487.500,00)	(18,77)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000,00	22.330.000,00	(11.530.000,00)	(51,63)
9	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	351.762.750,00	314.499.500,00	37.263.250,00	11,85
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	571.265.600,00	562.424.000,00	8.841.600,00	1,57
11	Retribusi Penyewaan Bangunan	857.120.500,00	337.995.000,00	519.125.500,00	153,59
12	Retribusi Pemakaian Laboratorium	658.380.000,00	495.792.500,00	162.587.500,00	32,79
13	Retribusi Pemakaian Ruangan	77.590.000,00	46.214.000,00	31.376.000,00	67,89
14	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	75.185.000,00	72.915.000,00	2.270.000,00	3,11
15	Retribusi Pemakaian Alat	255.250.000,00	448.916.500,00	(193.666.500,00)	(43,14)
16	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	179.049.000,00	189.442.000,00	(10.393.000,00)	(5,49)
17	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	84.962.000,00	81.700.500,00	3.261.500,00	3,99
18	Retribusi Tempat Khusus Parkir	369.570.000,00	484.163.000,00	(114.593.000,00)	(23,67)
19	Retribusi Rumah Potong Hewan	45.576.000,00	59.796.000,00	(14.220.000,00)	(23,78)
20	Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.145.842.000,00	899.829.000,00	246.013.000,00	27,34
21	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan	1.179.055.500,00	933.559.507,00	245.495.993,00	26,30
	Jumlah	8.031.555.350,00	7.288.904.007,00	742.651.343,00	10,19

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp742.651.343,00 atau sebesar 10,19%. Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi (LRA) dan Pendapatan Retribusi (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 161 Perbedaan Pendapatan Retribusi LRA dan LO

Pendapatan Retribusi Daerah (LRA)	7.682.930.350,00
Pendapatan Retribusi Daerah (LO)	8.031.555.350,00
Selisih	(348.625.000,00)

Perbedaan Pendapatan Retribusi LRA dan LO dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 162 Selisih Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Retribusi LRA	7.682.930.350,00
2	Selisih LRA dan LO	348.625.000,00
	Pembayaran Piutang Retribusi	(68.335.000,00)
	Penambahan Piutang Retribusi	416.960.000,00
3	Pendapatan Retribusi LO (1+2)	8.031.555.350,00

5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan dividen dan hasil investasi atas penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dan pada Bank Kalsel. Pendapatan dividen diperoleh dari penyertaan modal pada Bank Kalsel dengan kepemilikan saham minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya.

Tabel 163 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Bank Kalsel	11.394.363.814,00	10.425.528.033,00	968.835.781,00	9,29
2	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada PT. BPR Tanah Laut	909.465.245,00	838.743.041,28	70.722.203,72	8,43
3	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada PD. Baratala Tuntung Pandang	291.634.730,00	1.273.886.134,00	(982.251.404,00)	(77,11)
Jumlah		12.595.463.789,00	12.538.157.208,28	57.306.580,72	0,46

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp57.306.580,72 atau sebesar 0,46%. Perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LRA) dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 164 Perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA dan LO

Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (LRA)	12.005.672.488,00
Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (LO)	12.595.463.789,00
Selisih	(589.811.301,00)

Perbedaan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA dan LO dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 165 Selisih Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA dan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA	12.005.672.488,00
2	Selisih LRA dan LO	589.811.301,00
	Penambahan Piutang Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00
	Bagian Laba Penyertaan Modal pada BUMD PT. BPR Tanah Laut	448.156.571,00
	Bagian Laba Penyertaan Modal pada BUMD PD. Baratala	141.634.730,00
3	Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO (1+2)	12.595.463.789,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.1.1.4 Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 166 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	70.591.200,00	126.026.425,00	(55.435.225,00)	(43,99)
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	633.491.532,21	490.894.106,53	142.597.425,68	29,05
	Hasil Sewa BMD	539.691.532,21	445.894.106,53	93.797.425,68	21,04
	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO	93.800.000,00	45.000.000,00	48.800.000,00	108,44
3	Jasa Giro	8.612.248.391,34	19.615.759.014,29	(11.003.510.622,95)	(56,10)
	Jasa Giro Kas Daerah	9.465.098.770,06	18.071.530.348,14	(8.606.431.578,08)	(47,62)
	Jasa Giro Kas Bendahara	274.578.375,84	383.838.274,83	(109.259.898,99)	(28,47)
	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO	(1.160.390.391,32)	1.160.390.391,32	(2.320.780.782,64)	(200,00)
	Pendapatan Lain-lain Dana BOS	32.961.636,76	0,00	32.961.636,76	100,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	(2.100.000,00)	30.000.000,00	-32.100.000,00	107,00
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	42.010.212.457,56	0,00	42.010.212.457,56	100,00
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	1.406.019.447,50	518.315.758,00	887.703.689,50	171,27
7	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	0,00	410.125,00	(410.125,00)	(100,00)
8	Pendapatan Denda	502.574.356,50	1.930.440.371,84	(1.427.866.015,34)	(73,97)
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	123.184.677,36	1.622.030.176,84	(1.498.845.499,48)	(92,41)
	Pendapatan Denda Pajak Reklame	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan	379.381.679,14	308.410.195,00	70.971.484,14	23,01
9	Pendapatan dari Pengembalian	2.367.240.549,18	565.087.472,00	1.802.153.077,18	318,92
	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Taperum Rakyat	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
	Pajak Penghasilan Pasal 21				
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja BBM dan Pelumas-LO	198.319.100,00	0,00	198.319.100,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa-LO	245.377.639,75	0,00	245.377.639,75	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO	23.830.000,00	0,00	23.830.000,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung-LO	279.054.549,65	0,00	279.054.549,65	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Jalan dan Jembatan-LO	1.059.347.920,78	0,00	1.059.347.920,78	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi- Bangunan Air-LO	353.344.350,00	0,00	353.344.350,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-LO	54.118.900,00	0,00	54.118.900,00	100,00
	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	152.681.089,00	401.587.962,00	(248.906.873,00)	(61,98)
	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran (JKK)	0,00	161.499.510,00	(161.499.510,00)	(100,00)
10	Pendapatan BLUD	88.266.529.990,68	77.978.126.479,63	10.288.403.511,05	13,19



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.100.000,00	30.972.500,00	(28.872.500,00)	(93,22)
12	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	202.387.485,03	(202.387.485,03)	(100,00)
13	Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	0,00	77.830.638,12	(77.830.638,12)	(100,00)
Jumlah		143.868.907.924,97	101.566.250.375,44	42.302.657.549,53	41,65

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp42.302.657.549,53 atau sebesar 41,65%.

Perbedaan antara Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (LRA) dan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 167 Perbedaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA dan LO

Lain-lain PAD Yang Sah (LRA)	139.368.491.328,60
Lain-lain PAD Yang Sah (LO)	143.868.907.924,97
Selisih	4.500.416.599,37

Perbedaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah LRA dan LO dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 168 Selisih Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah LRA dan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah LO

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah LRA	139.368.491.328,60
2	Selisih LRA dan LO	4.500.416.599,37
	Pembayaran Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(4.609.518.843,52)
	Penambahan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	10.219.532.644,00
	Penambahan Pendapatan Diterima dimuka atas Lain-Lain PAD Yang Sah	(131.966.034,00)
	Pengurangan Pendapatan Diterima dimuka atas Lain-Lain PAD Yang Sah	182.759.221,21
	Giro Dana Cadangan	(1.160.390.391,32)
3	Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah LO (1+2)	143.868.907.924,97

5.4.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 169 Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.456.308.913.328,00	1.946.912.915.925,00	(490.604.002.597,00)	(25,20)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	0,00	10.342.946.000,00	(10.342.946.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.002.445.258,85	181.123.223.844,35	18.879.221.414,50	10,42
Jumlah		1.656.311.358.586,85	2.138.379.085.769,35	(482.067.727.182,50)	(22,54)

5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 170 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	718.614.120.258,00	1.216.551.769.067,00	(497.937.648.809,00)	(40,93)
2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	511.784.754.631,00	491.839.636.893,00	19.945.117.738,00	4,06
3	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.466.496.948,00	89.691.850.759,00	(23.225.353.811,00)	(25,89)
4	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	159.443.541.491,00	148.829.659.206,00	10.613.882.285,00	7,13
Jumlah		1.456.308.913.328,00	1.946.912.915.925,00	(490.604.002.597,00)	(25,20)

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut.

Tabel 171 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	DBH PBB	69.551.692.884,00	28.080.787.140,00	41.470.905.744,00	147,68
2	DBH PPh Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29	15.285.023.078,00	8.877.959.820,00	6.407.063.258,00	72,17
3	DBH Cukai Hasil Tembakau	(43.202,00)	47.161,00	(90.363,00)	(191,61)
4	DBH SDA Minyak Bumi	210.923.345,00	(92.432.908,00)	303.356.253,00	(328,19)
5	DBH SDA Gas Bumi	180.114.300,00	0,00	180.114.300,00	100,00
6	DBH SDA Mineral dan Batu Bara-Land Rent	(1.893.592.365,00)	1.647.232.617,00	(3.540.824.982,00)	(214,96)
7	DBH SDA Mineral dan Batu Bara-Royalty	624.963.211.769,00	1.175.277.961.081,00	(550.314.749.312,00)	(46,82)
8	DBH SDA Kehutanan-PSDH	320.313.958,00	605.928.849,00	(285.614.891,00)	(47,14)
9	DBH SDA Kehutanan-IIUPH	7.918.622.112,00	0,00	7.918.622.112,00	100,00
10	DBH SDA Perikanan	2.077.854.379,00	2.154.285.307,00	(76.430.928,00)	(3,55)
11	Dana Alokasi Umum	511.784.754.631,00	491.839.636.893,00	19.945.117.738,00	4,06



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
12	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler	10.495.301.303,00	11.242.522.680,00	(747.221.377,00)	(6,65)
13	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler	1.157.755.000,00	21.091.856.293,00	(19.934.101.293,00)	(94,51)
14	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Reguler	0,00	5.977.020.000,00	(5.977.020.000,00)	(100,00)
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler	14.747.012.010,00	0,00	14.747.012.010,00	100,00
16	DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DAK Fisik Bidang Pertanian-Penugasan	0,00	5.256.882.750,00	(5.256.882.750,00)	(100,00)
18	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	357.771.036,00	(357.771.036,00)	(100,00)
19	DAK Fisik Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.778.380.000,00	10.762.859.500,00	11.015.520.500,00	102,35
20	DAK Fisik Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	16.454.105.000,00	(16.454.105.000,00)	(100,00)
21	DAK Fisik Bidang Air Minum Reguler	14.238.048.635,00	11.033.469.000,00	3.204.579.635,00	29,04
22	DAK Fisik Bidang Sanitasi Reguler	4.050.000.000,00	1.950.000.000,00	2.100.000.000,00	107,69
23	DAK Fisik Bidang Air Minum Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DAK Fisik Bidang Sanitasi Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DAK Fisik Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	4.274.239.500,00	(4.274.239.500,00)	(100,00)
26	DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup-Penugasan	0,00	1.291.125.000,00	(1.291.125.000,00)	(100,00)
27	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	36.763.903.862,00	34.913.634.262,00	1.850.269.600,00	5,30
28	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	2.160.000.000,00	1.240.000.000,00	920.000.000,00	74,19
29	DAK Non Fisik TPG PNSD	92.107.620.000,00	87.015.173.489,00	5.092.446.511,00	5,85
30	DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD	1.748.096.950,00	1.485.145.500,00	262.951.450,00	17,71
31	DAK Non Fisik BOP PAUD	6.993.640.286,00	6.659.495.000,00	334.145.286,00	5,02
32	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	1.920.877.346,00	1.546.200.000,00	374.677.346,00	24,23
33	DAK Non Fisik BOKKB BOKB	3.683.415.108,00	14.983.944.401,00	(11.300.529.293,00)	(75,42)
34	DAK Non Fisik PK2UKM	334.149.250,00	293.245.149,00	40.904.101,00	13,95



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
35	DAK Non Fisik/Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
36	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal-LO	341.004.873,00	244.776.000,00	96.228.873,00	39,31
37	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	0,00	354.013.405,00	(354.013.405,00)	(100,00)
38	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	12.304.720.400,00	0,00	12.304.720.400,00	100,00
39	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	1.086.113.416,00	94.032.000,00	992.081.416,00	1.055,05
Jumlah		1.456.308.913.328,00	1.946.912.915.925,00	(490.604.002.597,00)	(25,20)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp490.604.002.597 atau sebesar 25,20%. Antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (LRA) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (LO) terdapat perbedaan, sebagai berikut.

Tabel 172 Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA dan LO

Uraian	Nominal
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan (LRA)	1.846.765.324.246,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (LO)	1.456.308.913.328,00
Selisih	390.456.410.918,00

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA dan LO dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 173 Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA	1.846.765.324.246,00
2	Selisih LRA dan LO	(390.456.410.918,00)
	Pembayaran Piutang Transfer Pemerintah Pusat	(27.954.140.000,00)
	Penambahan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	254.106.557.256,00
	Pembayaran Utang Transfer Pemerintah Pusat	27.954.140.000,00
	Penambahan Utang Transfer Pemerintah Pusat	(210.806.144.998,00)
	Dana Desa	(112.845.982.320,00)
	Pencairan Dana TDF	(320.910.840.856,00)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO (1+2)	1.456.308.913.328,00

Untuk Pendapatan Dana Desa yang tidak diakui sebagai Pendapatan LO sebesar Rp112.845.982.320,00 sesuai Penerapan Buletin Teknis 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Dana Desa (Non Provinsi) tidak diakui sebagai Pendapatan LO.

5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 174 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	DID	0,00	10.342.946.000,00	(10.342.946.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	10.342.946.000,00	(10.342.946.000,00)	(100,00)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.342.946.000,00 atau sebesar 100,00%. Tidak ada DID pada Tahun 2023.

Penerapan Buletin Teknis 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Dana Desa tidak diakui sebagai Pendapatan LO.

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 175 Pendapatan Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	200.002.445.258,85	181.123.223.844,35	18.879.221.414,50	10,42
2	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		200.002.445.258,85	181.123.223.844,35	18.879.221.414,50	10,42

Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut.

Tabel 176 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.072.218.952,35	14.676.101.732,51	1.396.117.219,84	9,51
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.984.812.395,28	6.667.069.287,15	7.317.743.108,13	109,76
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	151.081.666.420,22	140.544.616.751,68	10.537.049.668,54	7,50
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	717.270.113,00	621.860.148,01	95.409.964,99	15,34



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	18.146.477.378,00	18.613.575.925,00	(467.098.547,00)	(2,51)
6	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten / Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		200.002.445.258,85	181.123.223.844,35	18.879.221.414,50	10,42

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp18.879.221.414,50 atau sebesar 10,42%.

Tabel 177 Perbedaan Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA dan LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Transfer Antar Daerah (LRA)	200.714.842.692,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah (LO)	200.002.445.258,85
Selisih	712.397.433,15

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA dan LO dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 178 Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah LRA dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah LO

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah LRA	200.714.842.692,00
2	Selisih LRA dan LO	712.397.433,15
	Pembayaran Piutang Transfer Pemerintah Daerah	(59.157.295.828,00)
	Penambahan Piutang Transfer Pemerintah Daerah	58.444.898.394,85
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah LO (1+2)	200.002.445.258,85

5.4.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023:

Tabel 179 Pendapatan Hibah

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.428.068.036,04	2.639.568.606,00	(1.788.499.430,04)	(67,76)
2	Pendapatan Hibah Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri	51.220.225,00	0,00	51.220.225,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	0,00	305.000.000,00	(305.000.000,00)	(100,00)
4	Sumbangan Pihak Ketiga / Sejenis	219.964.179,00	2.143.662.071,00	(1.923.697.892,00)	(89,74)
5	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	83.875.000,00	(83.875.000,00)	(100,00)
Jumlah		4.699.252.440,04	5.172.105.677,00	(472.853.236,96)	(9,14)

Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp472.853.236,96 atau sebesar 9,14%.

Tabel 180 Perbedaan Pendapatan Hibah LRA dan LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Hibah (LRA)	271.184.404,00
Pendapatan Hibah (LO)	4.699.252.440,04
Selisih	(4.428.068.036,04)

Perbedaan sebesar Rp4.428.068.036,04 merupakan Hibah Aset/Barang yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang hanya dicatat Pendapatan Hibah LO.

5.4.1.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 181 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp0,00.

5.4.1.2 BEBAN

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.797.118.685.935,35 merupakan Rp1.796.577.785.936,35 Beban Daerah serta Rp540.899.999,00 adalah Beban Luar Biasa dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.615.548.306.693,39 merupakan Rp1.614.801.880.693,39 total Beban Daerah ditambah Rp746.426.000,00 Beban Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 182 Rincian Beban

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pegawai	684.618.804.115,00	653.956.945.688,00	30.661.858.427,00	4,69
2	Persediaan	76.679.393.246,90	67.714.598.060,22	8.964.795.186,68	13,24
3	Jasa	380.525.290.046,50	343.585.705.542,38	36.939.584.504,12	10,75
4	Pemeliharaan	64.821.548.316,00	67.165.991.058,00	(2.344.442.742,00)	(3,49)
5	Perjalanan Dinas	66.348.777.851,00	45.122.102.741,00	21.226.675.110,00	47,04
6	Hibah	103.264.959.125,00	44.321.201.603,00	58.943.757.522,00	132,99
7	Bantuan Sosial	10.031.820.000,00	22.416.500.000,00	(12.384.680.000,00)	(55,25)
8	Penyusutan dan Amortisasi	269.201.816.960,29	242.528.344.798,91	26.673.472.161,38	11,00
9	Penyisihan Piutang	7.433.210.224,66	3.796.434.962,30	3.636.775.262,36	95,79
10	Lain-lain	1.845.394.705,00	4.057.803.099,58	(2.212.408.394,58)	(54,52)
11	Transfer	131.806.771.346,00	120.136.253.140,00	11.670.518.206,00	9,71
12	Luar Biasa	540.899.999,00	746.426.000,00	(205.526.001,00)	(27,53)
Jumlah		1.797.118.685.935,35	1.615.548.306.693,39	181.570.379.241,96	11,24

Realisasi Beban Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp181.570.379.241,96 atau sebesar 11,24% dari tahun sebelumnya. Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut.

5.4.1.2.1 BEBAN OPERASI

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

Tabel 183 Rincian Beban Operasi

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Pegawai	684.618.804.115,00	653.956.945.688,00	30.661.858.427,00	4,69
2	Beban Barang dan Jasa	588.375.009.460,40	523.588.397.401,60	64.786.612.058,80	12,37
3	Beban Hibah	103.264.959.125,00	44.321.201.603,00	58.943.757.522,00	132,99
4	Beban Bantuan Sosial	10.031.820.000,00	22.416.500.000,00	(12.384.680.000,00)	(55,25)
5	Beban Penyisihan Piutang	7.433.210.224,66	3.796.434.962,30	3.636.775.262,36	95,79
6	Beban Lain-lain	1.845.394.705,00	4.057.803.099,58	(2.212.408.394,58)	(54,52)
Jumlah		1.395.569.197.630,06	1.252.137.282.754,48	143.431.914.875,58	11,45



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.2.1.1 **BEBAN PEGAWAI**

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp684.618.804.115,00 dan Rp653.956.945.688,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut.

Tabel 184 Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Kenaikan / (Penurunan)	
		2023 (Rp)	2022 (Rp)	(Rp)	%
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	255.939.644.115,00	255.040.274.160,00	899.369.955,00	0,35
2	Beban Tunjangan Keluarga	22.184.462.938,00	22.297.525.913,00	(113.062.975,00)	(0,51)
3	Beban Tunjangan Jabatan	5.043.915.000,00	5.110.735.876,00	(66.820.876,00)	(1,31)
4	Beban Tunjangan Fungsional	22.176.624.329,00	21.329.458.775,00	847.165.554,00	3,97
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	2.104.022.005,00	2.735.531.851,00	(631.509.846,00)	(23,09)
6	Beban Tunjangan Beras	13.809.264.615,00	13.926.293.558,00	(117.028.943,00)	(0,84)
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.392.824.537,00	808.178.326,00	10.584.646.211,00	1309,69
8	Beban Pembulatan Gaji	3.532.642,00	3.603.657,00	(71.015,00)	(1,97)
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	20.892.884.245,00	20.795.767.496,00	97.116.749,00	0,47
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	548.692.958,00	525.785.207,00	22.907.751,00	4,36
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.577.165.961,00	1.562.879.316,00	14.286.645,00	0,91
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	159.989.182.244,00	0,00	159.989.182.244,00	100,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	35.870.673.600,00	0,00	35.870.673.600,00	100,00
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.437.236.439,00	0,00	4.437.236.439,00	100,00
15	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.619.394.875,00	1.353.008.250,00	266.386.625,00	19,69
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	233.825.691,00	215.039.065,00	18.786.626,00	8,74
17	Beban Uang Representasi DPRD	766.080.000,00	764.505.000,00	1.575.000,00	0,21
18	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	66.255.000,00	65.404.500,00	850.500,00	1,30
19	Beban Tunjangan Beras DPRD	82.993.320,00	81.979.440,00	1.013.880,00	1,24
20	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.110.816.000,00	1.108.532.250,00	2.283.750,00	0,21
21	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	115.968.825,00	111.713.439,00	4.255.386,00	3,81
22	Beban Uang Paket DPRD	66.717.000,00	66.559.500,00	157.500,00	0,24
23	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	85.503.600,00	67.652.286,00	17.851.314,00	26,39
24	Beban Uang Jasa Pengabdian	31.500.000,00	1.575.000,00	29.925.000,00	1900,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Kenaikan / (Penurunan)	
		2023 (Rp)	2022 (Rp)	(Rp)	%
25	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	42.900.000,00	54.600.000,00	(11.700.000,00)	(21,43)
26	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.310.000,00	2.940.000,00	(630.000,00)	(21,43)
27	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	98.280.000,00	(21.060.000,00)	21,43
28	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.389.860,00	2.607.120,00	(217.260,00)	(8,33)
29	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.622.320,00	1.783.156,00	(160.836,00)	(9,02)
30	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.540,00	1.680,00	(140,00)	(8,33)
31	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	4.006.800,00	5.351.760,00	(1.344.960,00)	(25,13)
32	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	84.240,00	251.040,00	(166.800,00)	(66,44)
33	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	252.720,00	668.880,00	(416.160,00)	(62,22)
34	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	0,00	312.450.000,00	(312.450.000,00)	(100,00)
35	Tunjangan Profesi Guru PNSD	97.146.070.423,00	83.944.522.200,00	13.201.548.223,00	15,73
36	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	1.417.750.000,00	1.503.097.500,00	(85.347.500,00)	(5,68)
37	Tunjangan Transportasi	6.112.000.000,00	6.112.000.000,00	0,00	0,00
38	Tambahan Khusus Guru PNSD	287.482.200,00	269.775.000,00	17.707.200,00	6,56
39	Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	1.092.000.000,00	1.543.500.000,00	(451.500.000,00)	(29,25)
40	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	998.460,00	998.460,00	0,00	0,00
41	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.239.961.420,00	6.374.193.904,00	(134.232.484,00)	(2,11)
42	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	0,00	186.014.882.695,00	(186.014.882.695,00)	(100,00)
43	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	0,00	7.028.229.355,00	(7.028.229.355,00)	(100,00)
44	Beban Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.389.000.000,00	6.129.900.000,00	(1.740.900.000,00)	(28,40)
45	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH	0,00	600.000.000,00	(600.000.000,00)	(100,00)
46	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	589.234.500,00	492.003.000,00	97.231.500,00	19,76
47	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	73.839.693,00	67.907.073,00	5.932.620,00	8,74
48	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	0,00	201.600.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
49	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	540.000.000,00	0,00	540.000.000,00	100,00
50	Beban Pegawai BLUD	6.248.900.000,00	5.425.000.000,00	823.900.000,00	15,19
Jumlah		684.618.804.115,00	653.956.945.688,00	30.661.858.427,00	4,69

Realisasi Beban Pegawai Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp30.661.858.427,00 atau sebesar 4,69% dari tahun sebelumnya. Antara Belanja pegawai dan beban pegawai terdapat perbedaan sebesar Rp3.695.724.591,00 disebabkan karena adanya utang belanja atas PPh 21. Selisih antara Belanja Pegawai dan Beban Pegawai dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 185 Selisih Beban Pegawai

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai - LRA	680.923.079.524,00
Beban Pegawai - LO	684.618.804.115,00
Selisih	3.695.724.591,00

5.4.1.2.1.2 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp588.375.009.460,40 dan Rp523.588.397.401,60. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

1) Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp76.679.393.246,90 dan Rp67.714.598.060,22. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut.

Tabel 186 Rincian Beban Persediaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	6.643.677.193,36	6.173.039.676,48	470.637.516,88	7,62
2	Kertas dan Cover	1.603.690.044,68	1.346.781.561,60	256.908.483,08	19,08
3	Perabot Kantor	1.179.501.443,79	1.554.458.137,44	(374.956.693,65)	(24,12)
4	Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.382.742.282,60	1.757.611.414,00	625.130.868,60	35,57
5	Perlengkapan Dinas	118.905.310,00	1.042.050.254,00	(923.144.944,00)	(88,59)
6	Pendukung Olahraga	1.285.877.255,00	357.368.978,33	928.508.276,67	259,82
7	Souvenir/Cendera Mata	825.443.800,00	631.507.891,00	193.935.909,00	30,71
8	Benda Pos	264.908.394,00	242.688.006,00	22.220.388,00	9,16
10	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.429.946.378,00	3.364.685.816,00	1.065.260.562,00	31,66



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
12	Pengisian Isi Tabung Gas	8.402.320,00	1.050.000,00	7.352.320,00	700,22
13	Barang Cetak	227.173.200,00	54.545.100,00	172.628.100,00	316,49
14	Bahan-Bahan Baku	376.823.560,00	566.681.265,00	(189.857.705,00)	(33,50)
15	Bahan-Bahan Lainnya	3.578.395.365,21	(3.066.310.143,90)	6.644.705.509,11	(216,70)
16	Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.061.650.483,00	10.944.519.346,00	4.117.131.137,00	37,62
17	Bahan/Bibit Tanaman	125.346.145,00	134.169.935,00	(8.823.790,00)	(6,58)
18	Bibit Ternak	47.331.000,00	11.900.000,00	35.431.000,00	297,74
19	Bahan Obat-obatan	3.512.628.735,03	2.688.127.314,45	824.501.420,58	30,67
20	Obat-Obatan Lainnya	1.045.817.615,00	3.165.630.842,00	(2.119.813.227,00)	(66,96)
21	Bahan Kimia	640.224.446,73	827.633.042,50	(187.408.595,77)	(22,64)
22	Makanan dan Minuman Rapat	9.359.875.012,00	6.867.647.739,00	2.492.227.273,00	36,29
23	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.292.965.850,00	2.113.564.000,00	179.401.850,00	8,49
24	Penambah Daya Tahan Tubuh	1.073.632.800,00	927.091.500,00	146.541.300,00	15,81
25	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.066.441.500,00	5.740.848.540,00	2.325.592.960,00	40,51
26	Bahan Komputer	1.901.429.785,50	1.780.857.102,50	120.572.683,00	6,77
28	Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	738.727.674,00	1.381.586.050,00	(642.858.376,00)	(46,53)
29	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.906.235.364,00	7.216.748.452,00	(4.310.513.088,00)	(59,73)
30	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	70.470.000,00	(70.470.000,00)	(100,00)
33	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	129.798.400,00	(129.798.400,00)	(100,00)
34	Suku Cadang Alat Laboratorium	106.000.000,00	0,00	106.000.000,00	100,00
35	Suku Cadang Lainnya	125.937.523,00	7.528.724.102,82	(7.402.786.579,82)	(98,33)
36	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	1.474.190.571,00	1.561.389.713,00	(87.199.142,00)	(5,58)
37	Natura dan Pakan	105.884.500,00	212.225.575,00	(106.341.075,00)	(50,11)
38	Persediaan Penelitian	0,00	9.570.000,00	(9.570.000,00)	(100,00)
39	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	185.427.000,00	124.200.000,00	61.227.000,00	49,30
40	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	93.828.500,00	0,00	93.828.500,00	100,00
41	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	18.622.500,00	0,00	18.622.500,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
42	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	560.032.000,00	0,00	560.032.000,00	100,00
43	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00	100,00
44	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	56.050.000,00	0,00	56.050.000,00	100,00
45	Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	40.090.000,00	(40.090.000,00)	(100,00)
46	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	56.295.000,00	0,00	56.295.000,00	100,00
47	Pakaian Adat Daerah	407.200.000,00	29.500.000,00	377.700.000,00	1.280,34
48	Pakaian Batik Tradisional	847.639.750,00	135.582.200,00	712.057.550,00	525,19
49	Pakaian Olahraga	292.746.396,00	24.392.250,00	268.354.146,00	1.100,16
50	Beban Pakaian Paskibraka	367.064.000,00	0,00	367.064.000,00	100,00
51	Beban Komponen-Komponen Jembatan Baja	2.185.432.550,00	0,00	2.185.432.550,00	100,00
52	Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.250.000,00	3.498.000,00	(2.248.000,00)	(64,27)
53	Pipa-Pipa Lainnya	0,00	18.676.000,00	(18.676.000,00)	(100,00)
	Jumlah	76.679.393.246,90	67.714.598.060,22	8.964.795.186,68	13,24

Realisasi Beban Persediaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.964.795.186,68 atau sebesar 13,24% dari tahun sebelumnya.

Perbedaan antara Belanja persediaan dan beban persediaan Rp61.590.437,00 disebabkan karena adanya koreksi kurang aset tetap sebesar Rp151.878.437,00 dan adanya reklasifikasi dari aset tetap ke beban barang dan jasa sebesar Rp90.288.000,00, perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 187 Selisih Beban Persediaan

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan (1)	72.398.550.977,00
Beban Persediaan (2)	76.679.393.246,90
Saldo Awal Persediaan (3)	22.842.008.750,19
Saldo Akhir Persediaan (4)	18.622.756.917,29
Selisih {5=1- (2+4-3)}	(61.590.437,00)

2) Beban Jasa

Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp380.525.290.046,50 dan Rp343.585.705.542,38. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 188 Rincian Beban Jasa

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Jasa telepon	1.056.522.213,00	858.804.744,00	197.717.469,00	23,02
2	Beban Jasa air	517.894.802,00	1.058.015.931,00	(540.121.129,00)	(51,05)
3	Beban Jasa listrik	15.964.630.249,00	14.174.133.565,00	1.790.496.684,00	12,63
4	Beban Jasa Surat Kabhar/Majalah	213.340.000,00	181.395.220,00	31.944.780,00	17,61
5	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	4.087.363.661,00	3.830.707.296,00	256.656.365,00	6,70
6	Beban Jasa Paket/Pengiriman	9.533.861,00	22.876.896,00	(13.343.035,00)	(58,33)
7	Beban Jasa Transaksi Keuangan	16.375.500,00	14.678.955,00	1.696.545,00	11,56
8	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	3.297.294.220,00	1.186.163.600,00	2.111.130.620,00	177,98
9	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	166.300.000,00	2.600.000,00	163.700.000,00	6.296,15
10	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	34.861.500,00	(34.861.500,00)	(100,00)
11	Beban Jasa Kalibrasi	314.242.000,00	203.774.000,00	110.468.000,00	54,21
12	Beban Jasa Pengolahan Sampah	224.412.252,00	350.815.324,00	(126.403.072,00)	(36,03)
13	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.748.267.000,00	2.045.597.000,00	702.670.000,00	34,35
14	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	38.146.425.000,00	38.110.520.000,00	35.905.000,00	0,09
15	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	15.301.861.487,00	17.118.605.505,00	(1.816.744.018,00)	(10,61)
16	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	361.487.000,00	338.819.740,00	22.667.260,00	6,69
17	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.006.016.361,00	9.971.048.200,00	(4.965.031.839,00)	(49,79)
18	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.731.875.000,00	5.230.470.000,00	501.405.000,00	9,59
19	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	817.920.000,00	51.600.000,00	766.320.000,00	1.485,12
20	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.168.400.000,00	0,00	1.168.400.000,00	100,00
21	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	417.600.000,00	0,00	417.600.000,00	100,00
22	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	66.400.000,00	88.300.000,00	(21.900.000,00)	(24,80)
23	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	100,00
24	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	31.600.000,00	317.600.000,00	(286.000.000,00)	(90,05)
25	Beban Jasa Tenaga Administrasi	24.908.800.000,00	25.267.980.000,00	(359.180.000,00)	(1,42)
26	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	19.135.000,00	0,00	19.135.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
27	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	613.900.000,00	680.400.000,00	(66.500.000,00)	(9,77)
28	Beban Jasa Tenaga Ahli	13.865.139.900,00	0,00	13.865.139.900,00	100,00
29	Beban Jasa Tenaga ahli/narasumber/instruktur	0,00	11.498.258.334,00	(11.498.258.334,00)	(100,00)
30	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	7.861.875.000,00	72.000.000,00	7.789.875.000,00	10.819,27
31	Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.468.300.000,00	3.206.800.000,00	(738.500.000,00)	(23,03)
32	Beban Jasa Tenaga Supir	261.600.000,00	767.800.000,00	(506.200.000,00)	(65,93)
33	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	13.000.000,00	7.240.000,00	5.760.000,00	79,56
34	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	193.406.400,00	0,00	193.406.400,00	100,00
35	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	223.950.000,00	252.500.000,00	(28.550.000,00)	(11,31)
36	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	133.374.000,00	58.968.392,00	74.405.608,00	126,18
37	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.839.925.250,00	3.142.365.000,00	697.560.250,00	22,20
38	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.818.895.000,00	5.082.263.007,00	4.736.631.993,00	93,20
39	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	106.750.000,00	0,00	106.750.000,00	100,00
40	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.024.132.000,00	2.466.523.141,00	(442.391.141,00)	(17,94)
41	Beban Honorarium Rohaniwan	137.500.000,00	177.000.000,00	(39.500.000,00)	(22,32)
42	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	313.480.000,00	220.840.000,00	92.640.000,00	41,95
43	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
44	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	100,00
45	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	86.500.000,00	90.000.000,00	(3.500.000,00)	(3,89)
46	Beban Penambahan Daya	0,00	151.567.170,00	(151.567.170,00)	(100,00)
47	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.112.302,00	3.537.419,00	(1.425.117,00)	(40,29)
48	Beban Pengolahan Air Limbah	0,00	184.404.300,00	(184.404.300,00)	(100,00)
49	Beban Medical Check Up	0,00	57.957.000,00	(57.957.000,00)	(100,00)
50	Beban Registrasi/Keanggotaan	6.000.000,00	6.391.130,00	(391.130,00)	(6,12)
51	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	0,00	1.519.461.517,00	(1.519.461.517,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
52	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	54.796.621.308,00	55.241.944.492,00	(445.323.184,00)	(0,81)
53	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	1.331.503.200,00	674.038.400,00	657.464.800,00	97,54
54	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.564.972.023,00	4.484.682.840,00	80.289.183,00	1,79
55	Beban Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja	981.057.751,00	232.995.028,00	748.062.723,00	321,06
56	Beban Premi Asuransi Jaminan Kematian	952.488.115,00	292.698.100,00	659.790.015,00	225,42
57	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
58	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	35.640.000,00	0,00	35.640.000,00	100,00
59	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	0,00	187.100.000,00	(187.100.000,00)	(100,00)
60	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.500.000,00	109.880.000,00	(108.380.000,00)	(98,63)
61	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
62	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	313.839.200,00	78.278.400,00	235.560.800,00	300,93
63	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	106.775.000,00	0,00	106.775.000,00	100,00
64	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	160.000.000,00	(160.000.000,00)	(100,00)
65	Beban Sewa Bangunan Terbuka	263.552.800,00	624.172.000,00	(360.619.200,00)	(57,78)
66	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.424.058.800,00	2.431.127.000,00	(7.068.200,00)	(0,29)
67	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.135.116.000,00	2.043.295.091,00	91.820.909,00	4,49
68	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.525.000,00	44.650.000,00	(28.125.000,00)	(62,99)
69	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	100,00
70	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	538.846.120,00	0,00	538.846.120,00	100,00
71	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
72	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	34.554.000,00	(34.554.000,00)	(100,00)
73	Beban Sewa Mebel	280.856.190,00	200.832.550,00	80.023.640,00	39,85
74	Beban Sewa Alat Dapur	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	100,00
75	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	130.406.930,00	0,00	130.406.930,00	100,00
76	Beban Sewa Alat Pendingin	0,00	22.700.000,00	(22.700.000,00)	(100,00)
77	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	281.046.000,00	214.600.000,00	66.446.000,00	30,96
78	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	33.244.400,00	49.000.000,00	(15.755.600,00)	(32,15)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
79	Beban Sewa Sumber Tenaga	56.755.550,00	94.150.000,00	(37.394.450,00)	(39,72)
80	Beban Sewa Peralatan Jaringan	319.680.000,00	19.980.000,00	299.700.000,00	1.500,00
81	Beban Sewa Musik Lainnya	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	100,00
82	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	4.392.000,00	0,00	4.392.000,00	100,00
83	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
84	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
85	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	100,00
86	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur	198.053.065,00	0,00	198.053.065,00	100,00
87	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-	3.911.103.735,00	0,00	3.911.103.735,00	100,00
88	Beban Jasa Konsultansi Spesialis	87.960.000,00	0,00	87.960.000,00	100,00
89	Beban Jasa Konsultansi Lainnya	945.711.960,00	0,00	945.711.960,00	100,00
90	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi	387.543.000,00	0,00	387.543.000,00	100,00
91	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan	2.721.790.492,00	0,00	2.721.790.492,00	100,00
92	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata	392.075.000,00	0,00	392.075.000,00	100,00
93	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	4.401.671.600,00	(4.401.671.600,00)	(100,00)
94	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	3.419.761.062,00	(3.419.761.062,00)	(100,00)
95	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	56.430.000,00	(56.430.000,00)	(100,00)
96	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	51.777.700,00	46.742.150,00	5.035.550,00	10,77
97	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	800.000.000,00	280.000.000,00	520.000.000,00	185,71
98	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.403.566.172,00	3.940.592.024,00	4.462.974.148,00	113,26
99	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	242.264.375,00	205.001.250,00	37.263.125,00	18,18
100	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.406.437.000,00	3.250.950.000,00	(844.513.000,00)	(25,98)
101	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	13.930.000.000,00	1.667.500.000,00	12.262.500.000,00	735,38
102	Beban Beasiswa	1.014.100.000,00	0,00	1.014.100.000,00	100,00
103	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	10.200.000,00	5.705.400.000,00	(5.695.200.000,00)	(99,82)
104	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	300.000.000,00	3.743.999.698,00	(3.443.999.698,00)	(91,99)
105	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
106	Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	10.237.360,00	0,00	10.237.360,00	100,00
107	Beban Barang dan Jasa BOS	26.643.247.178,00	27.527.531.405,00	(884.284.227,00)	(3,21)
108	Beban Barang dan Jasa BLUD	85.672.041.164,50	71.990.304.566,38	13.681.736.598,12	19,00
Jumlah		380.525.290.046,50	343.585.705.542,38	36.939.584.504,12	10,75

Realisasi Beban Jasa Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp36.939.584.504,12 atau sebesar 10,75% dari tahun sebelumnya.

Antara Belanja Jasa dan Beban Jasa terdapat selisih sebesar Rp3.914.462.404,20 yang merupakan utang belanja pegawai Rp3.871.951.804,00, koreksi atas beban jasa kesehatan BLUD Rp2.602.457,20, koreksi saldo awal barang dan jasa BLUD berkurang senilai Rp676.942,80, reklas dari aset tak berwujud ke beban sewa sebesar Rp53.000.000,00 serta reklas dari beban jasa konsultansi ke aset konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp98.790.000,00. Selisih antara Belanja Jasa dan Beban Jasa dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 189 Selisih Beban Jasa

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Jasa	375.748.457.036,00
Beban Jasa	380.525.290.046,50
Saldo Awal Utang Jasa Medis	3.509.128.545,30
Saldo Akhir Utang Beban	12.200.423.960,00
Selisih	3.914.462.404,20

3) BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp64.821.548.316,00 dan Rp67.165.991.058,00. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut.

Tabel 190 Rincian Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.626.239.214,00	10.387.510.351,00	238.728.863,00	2,30
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.265.280.771,00	1.257.145.157,00	6.008.135.614,00	477,92
3	Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan	46.930.028.331,00	55.518.935.550,00	(8.588.907.219,00)	(15,47)
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(100,00)
Jumlah		64.821.548.316,00	67.165.991.058,00	(2.344.442.742,00)	(3,49)

Realisasi Beban Pemeliharaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.344.442.742,00 atau sebesar 3,49% dari tahun sebelumnya. Antara Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan terdapat selisih sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Rp32.994.843.888,00 yang merupakan koreksi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Beban Pemeliharaan senilai Rp5.007.837.983,00, adanya koreksi kurang dari Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp154.398.000,00 serta adanya koreksi tambah Aset Tetap Jalan Khusus ke Beban Pemeliharaan senilai Rp729.092.325,00 dan koreksi kurang dari Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap Jalan sebesar Rp 38.577.376.196,00. Selisih antara Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 191 Selisih Beban Pemeliharaan

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pemeliharaan (1) LRA	97.816.392.204,00
Beban Pemeliharaan (2) LO	64.821.548.316,00
Selisih {3=1- 2}	32.994.843.888,00

4) BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp66.348.777.851,00 dan Rp45.122.102.741,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut.

Tabel 192 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.273.609.008,00	13.958.773.981,00	3.314.835.027,00	23,75
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	48.509.743.843,00	31.153.328.760,00	17.356.415.083,00	55,71
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	136.000.000,00	0,00	136.000.000,00	100,00
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	429.425.000,00	0,00	429.425.000,00	100,00
Jumlah		66.348.777.851,00	45.122.102.741,00	21.226.675.110,00	47,04

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp21.226.675.110,00 atau sebesar 47,04% dari tahun sebelumnya. Antara Belanja Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas tidak terdapat perbedaan realisasi sebesar Rp66.348.777.851,00.

5.4.1.2.1.3 BEBAN HIBAH

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Kabupaten Tanah Laut atas pemberian hibah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2023 Tanggal 21 Juli 2023 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Berdasarkan kelompok penerima Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp103.264.959.125,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44.321.201.603,00. Rincian Beban Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 193 Rincian Beban Hibah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	48.462.722.000,00	1.920.000.000,00	46.542.722.000,00	2424,10
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	9.856.468.800,00	1.268.021.000,00	8.588.447.800,00	677,31
3	Beban Hibah Uang kepada BUMD	456.618.582,00	0,00	456.618.582,00	100,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.112.197.509,00	11.723.798.571,00	(4.611.601.062,00)	(39,34)
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.444.897.400,00	0,00	1.444.897.400,00	100,00
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.082.369.000,00	8.956.671.120,00	125.697.880,00	1,40
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.212.383.820,00	8.280.602.804,00	(68.218.984,00)	(0,82)
8	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	17.172.603.464,00	10.333.459.582,00	6.839.143.882,00	66,18
9	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	373.949.976,00	(373.949.976,00)	(100,00)
10	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.464.698.550,00	1.464.698.550,00	0,00	0,00
Jumlah		103.264.959.125,00	44.321.201.603,00	58.943.757.522,00	132,99

Realisasi Beban Hibah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp58.943.757.522,00 atau sebesar 132,99% dari tahun sebelumnya. Antara



Belanja Hibah dan Beban Hibah tidak terdapat perbedaan realisasi senilai Rp103.264.959.125,00.

5.4.1.2.1.4 BEBAN BANTUAN SOSIAL

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2023 Tanggal 21 Juli 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.031.820.000,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.416.500.000,00. Adapun Rincian Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Tabel 194 Rincian Beban Bantuan Sosial

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	495.600.000,00	0,00	495.600.000,00	100,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	7.360.020.000,00	22.416.500.000,00	(15.056.480.000,00)	(67,17)
3	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Individu	2.176.200.000,00	0,00	2.176.200.000,00	100,00
Jumlah		10.031.820.000,00	22.416.500.000,00	(12.384.680.000,00)	(55,25)

Realisasi Beban Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp12.384.680.000,00 atau sebesar 55,25% dari tahun sebelumnya. Antara Belanja Bantuan Sosial dan Beban Bantuan Sosial tidak terdapat perbedaan realisasi senilai Rp10.031.820.000,00.

5.4.1.2.1.5 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrual pada Tahun Anggaran 2017, kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan piutang.

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.433.210.224,66 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.796.434.962,30. Rincian Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut.

Tabel 195 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.146.801.940,72	907.982.238,39	238.819.702,33	26,30
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	132.672.325,00	74.056.945,00	58.615.380,00	79,15
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD	(95.250.000,00)	(30.000.000,00)	(65.250.000,00)	217,50
4	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	6.408.407.302,50	2.990.064.400,00	3.418.342.902,50	114,32
5	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(35.715.031,90)	(171.252.254,64)	135.537.222,74	(79,14)
6	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	173.984.886,05	(173.984.886,05)	(100,00)
7	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(18.297.714,00)	0,00	(18.297.714,00)	100,00
8	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	(100.000.000,00)	100.000.000,00	(100,00)
9	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	120.497,50	(120.497,50)	(100,00)
10	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	(14.043.313,00)	(3.521.750,00)	(10.521.563,00)	298,76
11	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	(45.000.000,00)	45.000.000,00	(100,00)
12	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(93.800.000,00)	0,00	(93.800.000,00)	(100,00)
13	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.434.715,34	0,00	2.434.715,34	100,00
Jumlah		7.433.210.224,66	3.796.434.962,30	3.636.775.262,36	95,79

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.636.775.262,36 atau sebesar 95,79% dari tahun sebelumnya.

5.4.1.2.1.6 BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.845.394.705,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.057.803.099,58. Rincian Beban Lain-Lain adalah sebagai berikut.

Tabel 196 Rincian Beban Lain-Lain

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	2.813.387.234,58	(2.813.387.234,58)	-100,00
2	Beban Lain-lain	1.845.394.705,00	1.244.415.865,00	600.978.840,00	48,29
Jumlah		1.845.394.705,00	4.057.803.099,58	(2.212.408.394,58)	(54,52)

Realisasi Beban Lain-lain Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami

penurunan sebesar Rp2.212.408.394,58 atau sebesar 54,52% dari tahun sebelumnya.

5.4.1.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan dan amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud tahun anggaran 2023 sebesar Rp 269.201.816.960,29 dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp242.528.344.798,91.

1) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan merupakan penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp267.160.342.327,02 sedangkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp241.648.364.857,84 Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut.

Tabel 197 Rincian Beban Penyusutan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	76.523.304.633,89	66.637.384.198,18	9.885.920.435,71	14,84
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	38.924.769.590,66	35.659.351.170,67	3.265.418.419,99	9,16
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	151.711.848.095,47	139.349.686.532,99	12.362.161.562,48	8,87
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	420.007,00	1.942.956,00	(1.522.949,00)	(78,38)
Jumlah		267.160.342.327,02	241.648.364.857,84	25.511.977.469,18	10,56

Realisasi Beban Penyusutan pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp25.511.977.469,18 atau sebesar 10,56% dari tahun sebelumnya.

2) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi merupakan amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.041.474.633,27 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp879.979.941,07. Adapun rincian Beban Amortisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 198 Rincian Beban Amortisasi

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	879.979.941,07	(879.979.941,07)	(100,00)
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	2.041.474.633,27	0,00	2.041.474.633,27	100,00
Jumlah		2.041.474.633,27	879.979.941,07	1.161.494.692,20	131,99

Realisasi Beban Amortisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.161.494.692,20 atau sebesar 131,99% dari tahun sebelumnya.

5.4.1.2.3 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp131.806.771.346,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp120.136.253.140,00. Beban Transfer terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sesuai Penerapan Buletin Teknis 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Beban Transfer Dana Desa (Non Provinsi) tidak diakui dalam Laporan Operasional (LO). Rincian Beban Transfer adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 199 Rincian Beban Transfer

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.917.100.000,00	4.100.025.000,00	817.075.000,00	19,93
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.194.680.450,00	0,00	1.194.680.450,00	100,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	125.694.990.896,00	115.040.966.190,00	10.654.024.706,00	9,26
4	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
5	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	0,00	795.261.950,00	(795.261.950,00)	(100,00)
Jumlah		131.806.771.346,00	120.136.253.140,00	11.670.518.206,00	9,71

Realisasi Beban Transfer Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.670.518.206,00 atau sebesar 9,71% dari tahun sebelumnya.

5.4.1.2.4 BEBAN TAK TERDUGA

Beban Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp540.899.999,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp746.426.000,00. Beban Tak Terduga tahun 2023 yang dialokasikan untuk keadaan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan/atau bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, Beban Tak Terduga adalah sebagai berikut.

Tabel 200 Rincian Beban Luar Biasa

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Tak Terduga	540.899.999,00	746.426.000,00	(205.526.001,00)	(27,53)
Jumlah		540.899.999,00	746.426.000,00	(205.526.001,00)	(27,53)

Realisasi Beban Tak Terduga Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp205.526.001,00 atau sebesar 27,53% dari tahun sebelumnya. Antara Belanja Tak Terduga dan Beban Tak Terduga tidak terdapat perbedaan realisasi senilai Rp 540.899.999,00.

5.4.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

5.4.2.1 DEFISIT NON OPERASIONAL

Beban Defisit Non Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.826.630.636,79 dan



Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.651.798.009,56. Rincian Beban Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut.

Tabel 201 Rincian Beban Defisit Non Operasional

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Defisit Penghapusan Aset Lainnya	14.826.630.636,79	9.651.798.009,56	5.174.832.627,23	53,62
Jumlah		14.826.630.636,79	9.651.798.009,56	5.174.832.627,23	53,62

Realisasi Beban Defisit Non Operasional Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.174.832.627,23 atau 53,62% dari tahun sebelumnya.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

PENJELASAN UMUM LAPORAN ARUS KAS

TUJUAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk, arus kas keluar, dan perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi pada tanggal pelaporan.

Definisi

- 1) Arus kas yaitu arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas.
- 2) Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
- 3) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dengan jumlah tertentu serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Aktivitas Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

5.5.1 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>2.259.311.607.516,28</u>	<u>2.159.068.634.674,87</u>

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Penerimaan/arus masuk kas dari aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan pajak daerah, penerimaan transfer pusat, dan penerimaan transfer provinsi. Sedangkan pengeluaran/arus keluar kas dari aktivitas operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi pada Tahun 2023 dan 2022 terdiri atas:

Tabel 202 Masuk Kas Aktivitas Operasi

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	52.667.553.207,68	45.363.440.225,80	7.304.112.981,88	16,10
2	Penerimaan Retribusi Daerah	7.682.930.350,00	6.971.598.007,00	711.332.343,00	10,20
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.005.672.488,00	11.010.810.384,00	994.862.104,00	9,04
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	139.204.100.128,60	130.373.140.712,07	8.830.959.416,53	6,77
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	996.224.548.856,00	936.789.879.264,00	59.434.669.592,00	6,34
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	511.784.754.631,00	491.839.636.893,00	19.945.117.738,00	4,06
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	225.910.038.439,00	238.521.509.965,00	(12.611.471.526,00)	(5,29)
8	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	10.342.946.000,00	(10.342.946.000,00)	(100,00)
9	Penerimaan Dana penyesuaian -Dana Alokasi Desa	112.845.982.320,00	104.093.790.400,00	8.752.191.920,00	8,41
10	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	200.714.842.692,00	181.618.220.753,00	19.096.621.939,00	10,51
11	Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Penerimaan Hibah	271.184.404,00	2.143.662.071,00	(1.872.477.667,00)	(87,35)
13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.259.311.607.516,28	2.159.068.634.674,87	100.242.972.841,41	4,64

5.5.2 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Tahun 2023
(Rp)

1.651.725.690.382,00

Tahun 2022
(Rp)

1.466.604.325.738,92

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi pada Tahun 2023 dan 2022 terdiri atas:

Tabel 203 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pembayaran Pegawai	680.923.079.524,00	653.956.945.688,00	26.966.133.836,00	4,12
2	Pembayaran Barang dan Jasa	612.312.178.068,00	520.933.208.907,92	91.378.969.160,08	17,54
3	Pembayaran Hibah	103.264.959.125,00	44.321.201.603,00	58.943.757.522,00	132,99
4	Pembayaran Bantuan Sosial	10.031.820.000,00	22.416.500.000,00	(12.384.680.000,00)	(55,25)
5	Pembayaran Bantuan Keuangan	238.540.973.216,00	219.334.756.590,00	19.206.216.626,00	8,76
6	Pembayaran Tak Terduga	540.899.999,00	746.426.000,00	(205.526.001,00)	(27,53)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	6.111.780.450,00	4.100.025.000,00	2.011.755.450,00	49,07
8	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	795.261.950,00	(795.261.950,00)	(100,00)
Jumlah		1.651.725.690.382,00	1.466.604.325.738,92	185.121.364.643,08	12,62

5.5.3 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Tahun 2023

(Rp)

164.391.200,00

Tahun 2022

(Rp)

171.026.425,00

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan pada Tahun 2023 dan 2022 terdiri atas:

Tabel 204 Arus Masuk Kas Investasi

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	164.391.200,00	171.026.425,00	(6.635.225,00)	(3,88)
Jumlah		164.391.200,00	171.026.425,00	(6.635.225,00)	(3,88)

5.5.4 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Tahun 2023

(Rp)

591.761.712.610,00

Tahun 2022

(Rp)

397.257.596.454,00

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap setara investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan pada Tahun 2023 dan 2022 terdiri atas:

Tabel 205 Arus Keluar Kas Investasi

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Perolehan Tanah	1.612.744.454,00	240.492.000,00	1.372.252.454,00	570,60
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	118.702.153.452,00	91.151.091.039,00	27.551.062.413,00	30,23
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	181.244.711.046,00	104.788.622.560,00	76.456.088.486,00	72,96



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	283.953.961.471,00	200.681.712.555,00	83.272.248.916,00	41,49
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	732.986.495,00	395.678.300,00	337.308.195,00	85,25
7	Perolehan Aset Lainnya	5.515.155.692,00	0,00	5.515.155.692,00	100,00
Jumlah		591.761.712.610,00	397.257.596.454,00	194.504.116.156,00	48,96

5.5.5 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Tahun 2023

(Rp)

75.250.360.500,00

Tahun 2022

(Rp)

6.335.623.100,00

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan pada Tahun 2023 dan 2022 terdiri atas:

Tabel 206 Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	248.360.500,00	6.004.455.100,00	(5.756.094.600,00)	(95,86)
2	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	2.000.000,00	331.168.000,00	(329.168.000,00)	(99,40)
3	Pencairan Dana Cadangan	75.000.000.000,00	0,00	75.000.000.000,00	100,00
Jumlah		75.250.360.500,00	6.335.623.100,00	68.914.737.400,00	1087,73

5.5.6 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN / PEMBIAYAAN

Tahun 2023

(Rp)

58.318.896.928,00

Tahun 2022

(Rp)

75.000.000.000,00

Arus kas keluar dari Aktivitas pendanaan/pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terdiri atas:

Tabel 207 Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
2	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	40.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(50,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	28.318.896.928,00	25.000.000.000,00	3.318.896.928,00	13,28
Jumlah		58.318.896.928,00	75.000.000.000,00	(16.681.103.072,00)	(22,24)

5.5.7 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>133.918.657.433,51</u>	<u>95.613.172.096,80</u>

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus masuk kas dari aktivitas Transitoris/Non Anggaran pada Tahun 2023 dan 2022 terdiri atas:

Tabel 208 Arus Masuk Kas Transitoris

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	133.918.657.433,51	95.613.172.096,80	38.305.485.336,71	40,06
Jumlah		133.918.657.433,51	95.613.172.096,80	38.305.485.336,71	40,06

5.5.8 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>133.918.657.433,51</u>	<u>95.613.172.096,80</u>

Arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp133.918.657.433,51 dan Rp95.613.172.096,80 terjadi kenaikan pada Tahun 2023 sebesar Rp38.305.485.336,71 atau sebesar 40,06%.

5.5.9 KENAIKAN/PENURUNAN KAS

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>32.920.059.296,28</u>	<u>226.713.362.006,95</u>

Kenaikan atau penurunan kas adalah jumlah semua arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris dengan rincian sebagai berikut.

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp607.585.917.134,28 mengalami penurunan sebesar Rp84.878.391.801,67 dari tahun 2022. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp591.597.321.410,00 mengalami penurunan sebesar Rp194.510.751.381,00 dari tahun 2022, sedangkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan sebesar Rp16.931.463.572,00 mengalami kenaikan sebesar Rp85.595.840.472,00 dari tahun 2022.

5.5.10 SALDO AWAL KAS

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>831.703.550.940,78</u>	<u>604.990.188.933,83</u>



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo awal kas Tahun 2023 dan 2022 terdiri atas:

Tabel 209 Saldo Awal Kas

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Kas Daerah - Bank Kalsel	762.266.975.672,06	541.773.574.626,45	220.493.401.045,61	40,70
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kas Di Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kas Badan Layanan Umum Daerah	65.761.548.698,67	59.162.059.397,36	6.599.489.301,31	11,15
6	Kas di Bendahara BOS	3.626.594.575,05	4.054.554.910,02	(427.960.334,97)	(10,56)
7	Kas Lainnya	48.431.995,00	0,00	48.431.995,00	100,00
Jumlah		831.703.550.940,78	604.990.188.933,83	226.713.362.006,95	37,47

5.5.11 SALDO AKHIR KAS

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>864.623.610.237,06</u>	<u>831.703.550.940,78</u>

Saldo akhir Kas Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp822.762.733.899,50, Rp39.376.080.137,75 dan Rp2.484.796.200,81. Kas tersebut berada dalam penguasaan BUD, Bendahara BLUD, dan Bendahara di sekolah-sekolah penerima BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 210 Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Kas Daerah - Bank Kalsel	822.762.733.899,50	762.266.975.672,06	60.495.758.227,44	7,94
2	Kas Badan Layanan Umum Daerah	39.376.080.136,75	65.761.548.698,67	(26.385.468.561,92)	(40,12)
3	Kas Di Dana BOS	2.484.796.200,81	3.626.594.575,05	(1.141.798.374,24)	(31,48)
4	Kas Lainnya	0,00	48.431.995,00	(48.431.995,00)	(100,00)
Jumlah		864.623.610.237,06	831.703.550.940,78	32.920.059.296,28	3,96

5.6 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022.

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.065.446.359.495,41 berasal dari saldo awal Ekuitas per 1 Januari 2023 sebesar Rp4.991.132.313.394,95 ditambah Surplus LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp68.349.378.019,07 ditambah dampak kumulatif kesalahan mendasar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.964.668.081,39.

5.6.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.991.132.313.394,95. Nilai tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2022.



5.6.2 SURPLUS/(DEFISIT)-LO TAHUN ANGGARAN 2023

Surplus/ (Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp68.349.378.019,07 berasal dari pendapatan (LO) dikurangi beban Tahun Anggaran 2023. Mengenai hal tersebut penjelasan lebih lengkap pada Catatan atas Laporan Operasional.

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar berupa pengurangan sebesar Rp5.964.668.081,39, Rincian untuk masing-masing koreksi ekuitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 211 Koreksi Ekuitas

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Koreksi ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi	0,00	282,00
2	Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang	0,00	24.562.414,50
3	Koreksi ekuitas - Aset Tetap	0,00	22.156.838.543,97
4	Koreksi Ekuitas – Lainnya	5.964.668.081,39	(4.760.500,00)
5	Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	0,00	837.319.999,93
6	Koreksi ekuitas -Kewajiban jangka pendek lainnya	0,00	47.005.094.283,21
7	Koreksi ekuitas -Investasi Jangka Panjang	0,00	2.777.835.329,48
8	Koreksi ekuitas -Pendapatan diterima dimuka	0,00	(4.169.512,00)
9	Koreksi ekuitas - Piutang	0,00	928.409.915,79
Jumlah Koreksi Ekuitas		5.964.668.081,39	73.721.130.756,88

Tabel 212 Rincian Koreksi Ekuitas

No.	Uraian	Koreksi	
		Kurang	Tambah
1	Koreksi Ekuitas Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		5.027.767.129,00
2	Koreksi Ekuitas Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		3.473.404.629,00
3	Koreksi Ekuitas Piutang PTAM Berkah Banua		25.452.920,00
4	Koreksi Ekuitas Piutang PTAM Berkah Banua	127.264,60	
5	Koreksi Ekuitas Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		4,33
6	Koreksi Ekuitas Piutang Sapi Betina	45.200.000,00	
7	Koreksi Ekuitas Piutang Sapi Jantan	80.720.600,00	
8	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Bentok Kampung	49.000,00	
9	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Kintap		3.328.400,00
10	Koreksi Saldo Awal Utang DBH Pusat		2.888,00
11	Koreksi Ekuitas Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		1.478.583,00
12	Koreksi Ekuitas Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		183.973.717,00
13	Koreksi Ekuitas Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	209.685.758,87	
14	Koreksi Ekuitas Laba Tahun sebelumnya pada PTAM		67.075.546,04



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Koreksi	
		Kurang	Tambah
15	Koreksi Nilai Penyertaan Modal pada PTAM	504.276.471,16	
16	Koreksi Ekuitas Dana Bergulir kepada Masyarakat	1.698.217.500,00	
17	Koreksi Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.737.836,98	
18	Koreksi Piutang Sapi Betina		798.017.500,00
19	Koreksi Penyisihan Piutang Sapi Betina	8.827.613,00	
20	Koreksi Piutang Sapi jantan		90.103.100,00
21	Koreksi Penyisihan Piutang Sapi Jantan	9.382.500,00	
22	Koreksi Kurang Saji INP Sapi Jantan		5.500.000,00
23	Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		4.500.000,00
24	Koreksi penambahan akumulasi penyusutan Aset Tetap	1.157.711.790,37	
	Jumlah	3.715.936.334,98	9.680.604.416,37



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

6.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

6.1.1 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) BANK KALSEL

Rapat Umum Pemegang Saham Bank Kalsel untuk Tahun Buku 2023 dan RUPS Luar Biasa (LB) tahun 2023 dilaksanakan tanggal 31 Januari 2023 di Banjarmasin yang dihadiri seluruh Pemegang Saham Bank Kalsel baik Gubernur, Bupati/Walikota dan Perwakilan dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan *Dividen* sebesar Rp14.226.686.396,00 dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 2 Februari 2023.

6.1.2 BAGI HASIL PAJAK DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pada tahun 2024 diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi meliputi Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 100.3.3.1/0150/KUM/2024 Tanggal 25 Februari 2024 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan/Kabupaten/Kota periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 213 Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Uraian	No. Peraturan Gubernur	Nilai Yang Disalurkan (Rp)
1.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Pergub Nomor 101 Tahun 2023	47.272.851.903,22
2	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pergub Nomor 100.3.3.1/010/KUM/2024	4.301.386.146,35
3	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pergub Nomor 100.3.3.1/010/KUM/2024	3.648.325.531,28
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	Pergub Nomor 100.3.3.1/010/KUM/2024	147.726.897,00
5	Pajak Rokok	Pergub Nomor 100.3.3.1/010/KUM/2024	3.074.607.917,00
Jumlah			58.444.898.394,85



BAB VII

PENUTUP

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2023 realisasi penerimaan pendapatan daerah telah terlampaui dari target yang ditetapkan dan terjadi efisiensi pengeluaran belanja daerah. Selain itu, LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dari segi pendapatan ditargetkan sebesar Rp1.739.292.358.915,00,00 dan terealisasi sebesar Rp2.259.475.998.716,28 atau 129,91%. Belanja dianggarkan sebesar Rp2.255.923.276.182,00 yang terealisasi sebesar Rp1.998.834.649.326,00 atau 88,60%. Transfer dianggarkan Rp246.343.464.346,00 yang terealisasi Rp244.652.753.666,00 atau 99,31%. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp906.703.550.940,00 dan terealisasi sebesar Rp906.953.911.440,78 atau 100,03%. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp58.318.896.928,00 dan terealisasi sebesar Rp58.318.896.928,00 atau 100,00%. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp848.635.014.512,78. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bertekad meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut, baik dari segi penyempurnaan regulasi/aturan dan segi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 kami sajikan dengan mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang konstruktif, sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di masa mendatang akan semakin meningkat. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPD secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

